



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN 2016 - 2021





BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun, pedoman penyusunan rencana kerja tahunan serta pedoman pengendalian dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 masih menyebutkan nomenklatur Perangkat Daerah dan belum menyebutkan urusan pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaannya belum terdapat kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 harus disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016-2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Klaten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi

Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
20. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
25. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
26. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah

nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
 30. Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah Kabupaten Klaten.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 32. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - i. BAB IX : Penutup.

- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2015.
- (2) RPJM Daerah berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota lainnya dan RPJMN.
4. Ketentuan BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah; dan
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah;
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - c. hasil RPJM Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
 - (7) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
 - (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

Tahapan penyusunan RPJM Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJM Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Agustus 2018
BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (13/2018)

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019	I-7
1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	I-9
1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029	I-11
1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025	I-11
1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	I-13
1.3.6 Keselarasan dan Kesenambungan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Tetangga	I-15
1.3.7 Keterkaitan RPJMD dengan RENSTRA – Perangkat Daerah	I-16
1.3.8 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD	I-16
1.4 Sistematika RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	I-16
1.5 Maksud dan Tujuan	I-18
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-14
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-31
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-90
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2017.....	III-12
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III-19
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	VI-1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	VI-2
4.1.1 Permasalahan Pembangunan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	VI-2
4.1.2 Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum.....	VI-5
4.1.3 Permasalahan Pada Aspek Daya Saing Daerah.....	VI-10
4.2 Isu-isu Strategis.....	VI-14
4.2.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Klaten.....	VI-14
4.2.2 Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Klaten.....	VI-17
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi.....	V-1
5.2 Misi.....	V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran.....	V-4
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	VI-1
6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi.....	VI-1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan.....	VI-1
6.3 Program Pembangunan Daerah.....	VI-1
BAB VII	VII-1
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pentahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	I-2
Gambar 1.2	Bagan alir perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	I-4
Gambar 1.3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah	I-7
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Klaten	II-1
Gambar 2.2	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klaten	II-10
Gambar 2.3	Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Klaten	II-11
Gambar 2.4	Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2014	II-12
Gambar 2.5	Perkembangan Jumlah KK pada Tahun 2013-2017	II-14
Gambar 2.6	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2013-2017	II-14
Gambar 2.7	Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-17
Gambar 2.8	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-17
Gambar 2.9	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	II-18
Gambar 2.10	Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.	II-20
Gambar 2.11	Perkembangan Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017	II-31
Gambar 2.12	Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-31
Gambar 2.13	Angka Kelulusan (AL)	II-36
Gambar 2.14	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-37
Gambar 2.15	Rasio Murid dan Guru Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-39
Gambar 2.16	Komparasi Angka Melek di Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II-42
Gambar 2.17	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-49
Gambar 2.18	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-52
Gambar 2.19	Kecenderungan Prevalensi Stunting dan Underweight pada Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017	II-58
Gambar 2.20	Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)	II-61
Gambar 2.21	Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2009-2018	II-67
Gambar 2.22	PMKS yang Memperoleh Bantuan	II-68
Gambar 2.23	Perkembangan Lahan Kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II-73
Gambar 2.24	Trend Jumlah Tenaga Kerja Di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2013 – 2017	II-81
Gambar 2.25	Angka Kriminalitas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-83
Gambar 2.26	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017	II-88
Gambar 3.1	Tingkat Pertumbuhan PAD di Kab Klaten Tahun 2013- 2017 (%)	III-2
Gambar 3.2	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kab Klaten Tahun 2013 - 2017 (%)	III-3
Gambar 3.3	Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan APBD (%)	III-23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019	I-8
Tabel 1.2	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	I-10
Tabel 1.3	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025	I-12
Tabel 1.4	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	I-14
Tabel 1.5	Keselarasan dan Kesenambungan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Lainnya	I-15
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014-2017 dan Laju Pertumbuhan di Kabupaten Klaten	II-13
Tabel 2.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rp.Juta)	II-15
Tabel 2.3	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rp.Juta)	II-16
Tabel 2.4	Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-18
Tabel 2.5	Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah di Kabupaten Klaten	II-19
Tabel 2.6	Beberapa Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2015	II-20
Tabel 2.7	Persentase UMK terhadap KHL di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II-21
Tabel 2.8	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Klaten Tahun 2011– 2015	II-21
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Periode 2013-2017	II-22
Tabel 2.10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2013-2017	II-22
Tabel 2.11	Data Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten	II-23
Tabel 2.12	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2011-2015	II-23
Tabel 2.13	Program dan Kegiatan Penunjang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017	II-23
Tabel 2.14	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2016	II-26
Tabel 2.15	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2013 - 2017	II-26
Tabel 2.16	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sampai dengan tahun 2017	II-26
Tabel 2.17	Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2013-2017	II-27
Tabel 2.18	Produksi dan Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2013 - 2017	II-27
Tabel 2.19	Realisasi Pemberangkatan Transmigrasi PIR	II-28
Tabel 2.20	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-29
Tabel 2.21	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2017	II-29
Tabel 2.22	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2017	II-30
Tabel 2.23	Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten tahun 2017	II-32
Tabel 2.24	Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-32
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Kasar PAUD, Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-33
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017	II-34
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.28	Perkembangan Prosentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-35

Tabel 2.29	Perkembangan Persentase Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-36
Tabel 2.30	Perkembangan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-36
Tabel 2.31	Perkembangan Penanganan Pendidikan Keaksaraan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 2.32	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-38
Tabel 2.33	Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2017	II-38
Tabel 2.34	Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-39
Tabel 2.35	Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-40
Tabel 2.36	Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-40
Tabel 2.37	Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-41
Tabel 2.38	Komparasi Angka Melek di Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2017	II-42
Tabel 2.39	Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah Dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK	II-42
Tabel 2.40	Gedung, Ruang Kelas Sekolah Negeri Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-43
Tabel 2.41	Gedung, Ruang Kelas Sekolah Swasta Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-43
Tabel 2.42	Perkembangan Prosentase ruang kelas Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-44
Tabel 2.43	Data Pokok SD/MI Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-45
Tabel 2.44	Data Pokok SMP/MTs Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-45
Tabel 2.45	Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUS TS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	II-46
Tabel 2.46	Perkembangan Prosentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.47	Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-47
Tabel 2.48	Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017	II-49
Tabel 2.49	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.50	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.51	Jumlah Tenaga Medis Menurut Puskesmas dan Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-51
Tabel 2.52	Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017	II-52
Tabel 2.53	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-53
Tabel 2.54	Perkembangan Jumlah Penderita AIDS/HIV Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-54
Tabel 2.55	Kasus Hipertensi dan Diabetusmilitus yang Terlaporkan lewat Puskesmas Tahun 2013-2017	II-55
Tabel 2.56	Jumlah Kasus Gizi Buruk Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-56
Tabel 2.57	Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-57
Tabel 2.58	Capaian Rumah tangga Sehat Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017	II-59
Tabel 2.59	Sarana Kesehatan Yang Berizin di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 2.60	Jumlah Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-60
Tabel 2.61	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017*	II-63
Tabel 2.62	Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang	II-64

Tabel 2.63	Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Klaten	II-64
Tabel 2.64	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Pelacuran	II-66
Tabel 2.65	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Miras	II-66
Tabel 2.66	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum di Kabupaten Klaten	II-67
Tabel 2.67	Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2009-2018	II-67
Tabel 2.68	Perkembangan Pemberian Bantuan Kepada PMKS Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	II-69
Tabel 2.69	Perkembangan Penanganan PMKS Kabupaten Klaten tahun 2016-2017	II-69
Tabel 2.70	Penderita Disabilitas Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Klaten Tahun 2012 - 2016	II-70
Tabel 2.71	Timbulan Sampah dan Kapasitas Terangkut di Kabupaten Klaten	II-71
Tabel 2.72	Data Izin Lingkungan/ Perlindungan Lingkungan	II-72
Tabel 2.73	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.74	Penduduk Kabupaten Klaten Belum Memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.75	Sosialisasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-75
Tabel 2.76	Lembaga Ekonomi Perdesaan	II-76
Tabel 2.77	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.78	Pelatihan Siskeudes	II-77
Tabel 2.79	Lokasi Pengembangan Wisata	II-78
Tabel 2.80	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-79
Tabel 2.81	Data Pelayanan KB Berdasarkan PUS	II-79
Tabel 2.82	Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-79
Tabel 2.83	Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2013 – 2017	II-81
Tabel 2.84	Data Jumlah Kejahatan Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	II-83
Tabel 2.85	Data Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Klaten	II-84
Tabel 2.86	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.87	Jumlah Pengunjung berdasarkan kalangan	II-84
Tabel 2.88	Jenis Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-85
Tabel 2.89	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2017	II-85
Tabel 2.90	Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	II-86
Tabel 2.91	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-87
Tabel 2.92	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.93	Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2013 - 2017	II-88
Tabel 2.94	Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten	II-89
Tabel 2.95	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2015-2017	II-90
Tabel 2.96	Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2011–2015	II-90
Tabel 2.97	Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011– 2015	II-91
Tabel 2.98	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-91
Tabel 2.99	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisnus dan Wisman Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.100	Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.101	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisnus dan Wisman Tahun 2013-2017	II-94
Tabel 2.102	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-95

Tabel 2.103	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017	II-95
Tabel 2.104	Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.105	Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.106	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.107	Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-97
Tabel 2.108	Produksi Holtikultura (Buah-buahan dan Sayuran) Tahun 2013-2017	II-97
Tabel 2.109	Populasi Ternak Tahun 2013-2017	II-98
Tabel 2.110	Produksi Peternakan Tahun 2013-2017	II-98
Tabel 2.111	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.112	Data Pemasangan Perlengkapan Jalan	II-100
Tabel 2.113	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Klaten	II-100
Tabel 2.114	Alat Uji Sarana dan Prasaran Angkutan	II-101
Tabel 2.115	Data Uji Sarana dan Prasarana Angkutan	II-101
Tabel 2.116	Jumlah Perlintasan Sebidang Kereta Api	II-101
Tabel 2.117	Data Operasional Penertiban Lalu Lintas	II-102
Tabel 2.118	Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-102
Tabel 2.119	KWH Terjual PLN Menurut Bulan Tahun 2015	II-103
Tabel 2.120	Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2015	II-103
Tabel 2.121	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (Km)	II-104
Tabel 2.122	Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam km)	II-105
Tabel 2.123	Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten	II-105
Tabel 2.124	Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-105
Tabel 2.125	Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2013-2017	II-106
Tabel 2.126	Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2013-2017	II-108
Tabel 2.127	Pasar Menurut Jenisnya Tahun 2013–2017	II-109
Tabel 2.128	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II-110
Tabel 2.129	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2017	II-110
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-2
Tabel 3.2	Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-2
Tabel 3.3	Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-3
Tabel 3.4	Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-3
Tabel 3.5	Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-4
Tabel 3.6	Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-5
Tabel 3.7	Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah)	III-6
Tabel 3.8	Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III-8
Tabel 3.9	Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-9
Tabel 3.10	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rupiah)	III-11
Tabel 3.11	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Klaten	III-13
Tabel 3.12	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-15
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III-16
Tabel 3.14	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III-17
Tabel 3.15	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-17

Tabel 3.16	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2017	III-18
Tabel 3.17	Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III-19
Tabel 3.18	Proyeksi Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021	III-22
Tabel 3.19	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021	III-25
Tabel 3.20	Prediksi Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021	III-26
Tabel 3.21	Prediksi Perkembangan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021	III-28
Tabel 3.22	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Guna Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021	III-29
Tabel 3.23	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten 2016 -2021	III-30
Tabel 3.24	Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021	III-31
Tabel 3.25	Proyeksi APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2021	III-32

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun dengan mempedomani pada tahap ketiga (tahun 2015-2020) atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005–2025. Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran atas visi, misi, janji dan program Pasangan Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, program pembangunan daerah prioritas, kerangka kebutuhan pendanaan bersifat indikatif, indikator kinerja tujuan/sasaran/program prioritas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah pasangan kepala daerah dilantik. Adapun Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Klaten periode tahun 2016–2021 dilantik pada tanggal 17 Februari 2016, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-502 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah Atas Nama Hj. Sri Hartini, SE sebagai Bupati Klaten, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-503 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah Atas Nama Hj. Sri Mulyani sebagai Wakil Bupati.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten periode Tahun 2016-2021 menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi, misi, janji dan program Bupati dan Wakil Bupati yang diselaraskan dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2014-2019.

Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD), Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Adapun pentahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana Gambar 1.1



Gambar 1.1 Pentahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Sumber : *Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.*

Saat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 telah memasuki tahun ketiga (2018), Pemerintah Kabupaten Klaten akan melakukan perubahan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Hal ini didasarkan adanya : **(1)** Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 15 Juni 2016 ; **(2)** Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Audit “Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Aspek Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014-2016” merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten guna melaksanakan “*evaluasi, penyesuaian dan melengkapi data*” materi Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dan **(3)** Pergantian kepemimpinan kepala daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut selanjutnya dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam bentuk ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru hasil penggabungan ataupun pengurangan urusan sehingga indikator kinerja OPD yang ada dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas obyek pemeriksaan (*obrik*) Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten guna melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi dan menyesuaikan :
1. Data jalan kabupaten
 2. Indikator prosentase irigasi dalam keadaan baik pada Bab V
 3. Permasalahan pada RPJMD dengan kondisi yang sebenarnya melalui pembahasan dengan SKPD terkait
 4. Kondisi awal ketercapaian 11 indikator capaian kinerja yang disajikan pada Bab V RPJMD tetapi tidak dijelaskan pada Bab II
 5. Target awal dan target akhir 6 indikator yang ditetapkan berbeda pada Bab V dan Bab VII
 6. Target akhir rata-rata lama sekolah dan rasio Rumah Tidak Layak Huni yang ditetapkan berbeda pada Bab V dan Bab VII
 7. Target capaian pada Bab VIII yang melebihi 100%
 8. Program-program pada Bab VII dan VIII
 9. Sasaran yang berbeda antara Bab V dan Bab VII
- b. Mengevaluasi dan menyesuaikan :
- Melengkapi 20 Indikator kinerja Daerah pada Bab IX RPJMD yang tidak ditetapkan target capain setiap tahunnya.
- c. Menetapkan Renstra SKPD dengan SK Kepala SKPD.

Mengingat obyek pemeriksaan (*obrik*) berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten maka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu juga harus disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. Adapun tata laksana penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 itu wajib mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

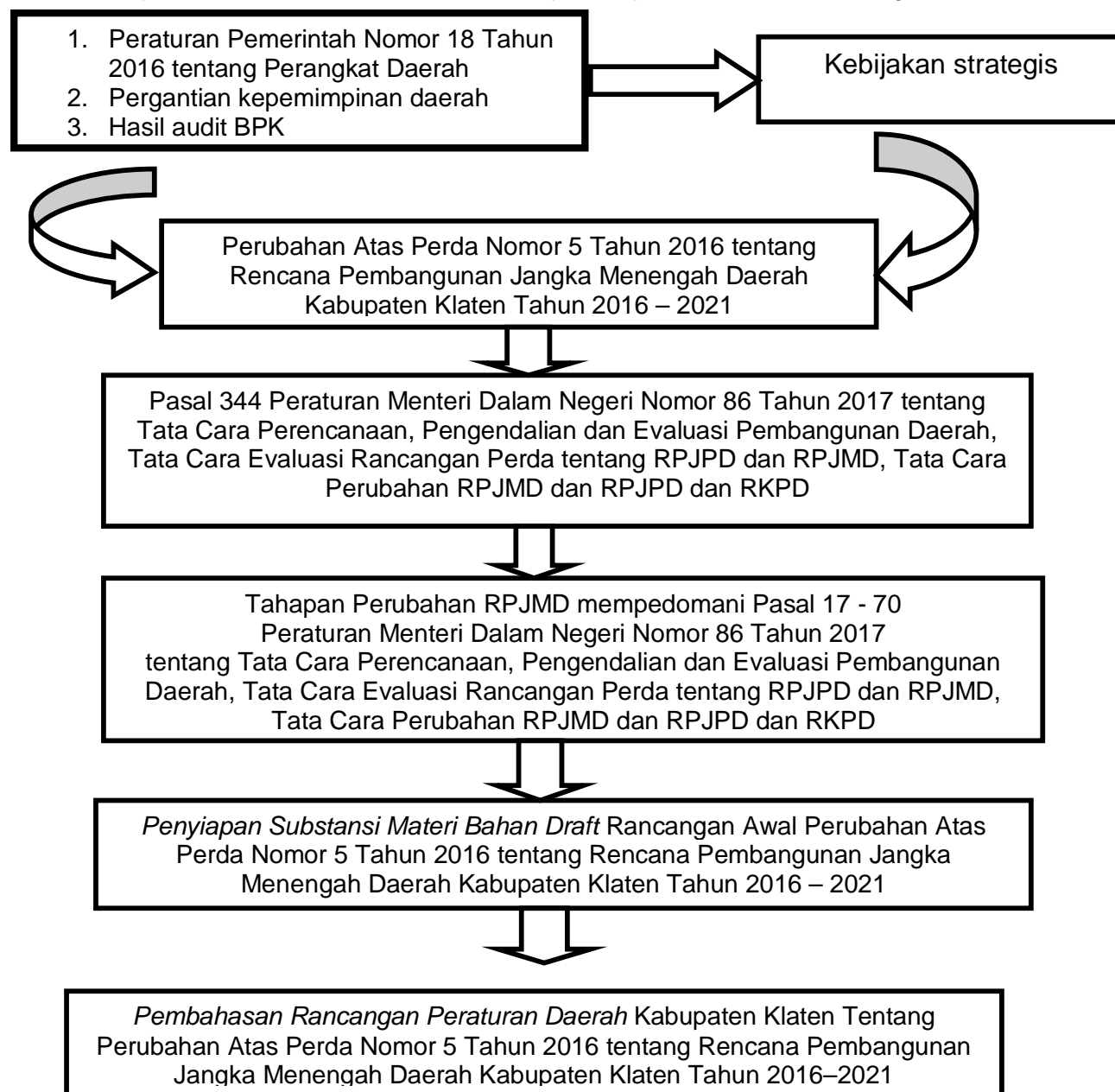
Adapun perubahan kepemimpinan kepala daerah yang terjadi adanya pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Klaten Atas Nama Hj. Sri Mulyani sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *Nomor 131.33-8601 Tahun 2017* tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah. Meskipun terjadi perubahan kepemimpinan daerah namun dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 nantinya tetap mendasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih periode 2016-2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, LHP BPK dan pergantian kepemimpinan daerah itu dikategorikan sebagai **kebijakan strategis yang layak menjadi dasar pertimbangan perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.**

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa *Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai dengan pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.*

Bagan alir perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut :



Gambar 1.2 Bagan alir perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 didasarkan pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Polusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan

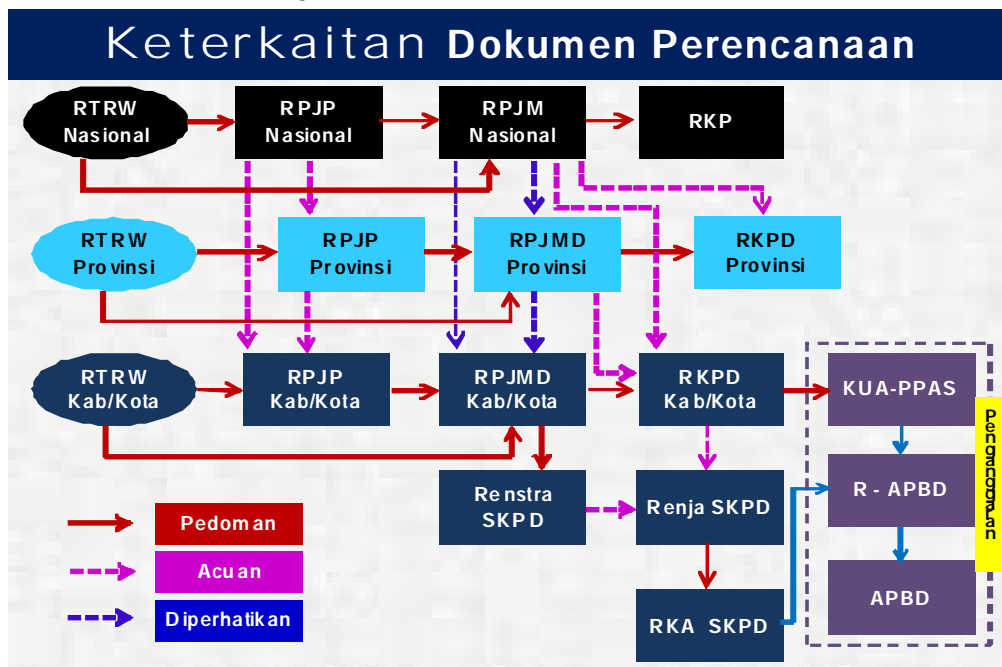
- Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMD merupakan *sub sistem* dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 wajib mengacu pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.

Sehingga dokumen RPJMD yang disusun harus menjamin adanya kesinambungan dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain dengan: RPJPD, RTRW, RKPD, Renstra-PD, Renja Kerja Perangkat Daerah, dan RAPBD yang merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tidak terpisahkan.

Adapun sebagai gambaran, hubungan antar dokumen perencanaan dapat disajikan pada Gambar 1.3 sebagai berikut:



Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Sumber : *Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*

Dari Gambar 1.3 di atas tampak keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

RPJMN Tahun 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan visi: “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dengan agenda misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan ;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati-diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari uraian di atas, keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 1.1. Dari Tabel 1.1 di bawah ini dapat dijelaskan bahwa :

- a. **Misi 1 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 1, 2, 3 dan 6 RPJMD Kabupaten Klaten
- b. **Misi 2 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 2 RPJMD Kabupaten Klaten
- c. **Misi 3 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 2 dan 6 RPJMD Kabupaten Klaten
- d. **Misi 4 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 1 dan 6 RPJMD Kabupaten Klaten
- e. **Misi 5 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 5 dan 7 RPJMD Kabupaten Klaten
- f. **Misi 6 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 8 RPJMD Kabupaten Klaten
- g. **Misi 7 RPJMN** memiliki keterkaitan dengan misi 6 RPJMD Kabupaten Klaten

Tabel 1.1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	RPJMN	RPJMD KABUPATEN KLATEN
1.	VISI	<i>Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</i>	<i>Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing</i>
2.	MISI	1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1) Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya. 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 3) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal. 6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
		1) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
		3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
		4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.	1) Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya. 6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
		5) Mewujudkan bangsa yang berdaya	5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan

NO	URAIAN	RPJMN	RPJMD KABUPATEN KLATEN
		saing.	kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah. 7) Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
		6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	8) Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.
		7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014.

Salah satu klausul menyatakan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah harus berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 juga akan wajib memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi* " dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan: *mboten korupsi, mboten ngapusi*;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah Lingkungan.

Berdasarkan uraian itu, hubungan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No (1)	Uraian (2)	RPJM Provinsi Jawa Tengah (3)	RPJM Kabupaten Klaten (4)
1	VISI	<i>Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Boten Korupsi, Boten Ngapusi</i>	<i>Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing</i>
2	MISI	<p>1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.</p> <p>2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran</p> <p>5) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan: <i>mboten korupsi, mboten ngapusi.</i></p> <p>4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.</p> <p>5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.</p> <p>6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat</p> <p>7) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah Lingkungan</p>	<p>2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.</p> <p>3) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.</p> <p>6) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.</p> <p>1) Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.</p> <p>2) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.</p> <p>2) Mewujudka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.</p> <p>8) Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.</p> <p>1) Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.</p> <p>6) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian</p> <p>5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah.</p> <p>7) Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.</p> <p>2) Mewujudka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.</p> <p>8) Meningkatkan kapasitas pelayanan publik</p> <p>4) Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat</p>

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Misi 1 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 2, 3 dan 6 RPJMD Kabupaten Klaten
2. Misi 2 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 1 dan 2 RPJMD Kabupaten Klaten
3. Misi 3 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 2 dan 8 RPJMD Kabupaten Klaten
4. Misi 4 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 1 dan 6 RPJMD Kabupaten Klaten
5. Misi 5 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 5 dan 7 RPJMD Kabupaten Klaten
6. Misi 6 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 2 dan 8 RPJMD Kabupaten Klaten
7. Misi 7 RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan dengan misi 4 RPJMD Kabupaten Klaten.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dinyatakan bahwa dalam rangka pengembangan wilayah maka Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 8 sistem perwilayahan (*regionalisasi*) berdasarkan perpaduan aspek homogenitas, modalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan dimaksud adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukawonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Banglor. Kabupaten Klaten merupakan bagian dari perwilayahan Subosukowonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) dengan cakupan wilayah, potensi dan arah pengembangan sebagai berikut :

1. Klaten ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga menjadi kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
2. Delanggu dan Prambanan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sehingga menjadi kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
3. Dalam sistem perwilayahan Kabupaten Klaten yang termasuk dalam Wilayah Subosukawonosraten berfungsi sebagai pengembangan Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional.
4. Klaten ditetapkan sebagai bagian pengembangan kawasan strategis ditinjau dari sudut pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten dan koridor Perbatasan Klaten-Sukoharjo-Wonosari/Gunung Kidul (Kesukosari).

1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang (20 tahun), disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten disusun dengan berpedoman pada Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten dipakai sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pasangan Kepala Daerah.

Prioritas pembangunan daerah Tahap Ketiga (2015-2020) dalam dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.
6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi (BERSINAR).

Berdasarkan program prioritas di atas maka RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada tahap ketiga (tahun 2015-2020) RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025. Konsistensi ini dapat dilihat pada keterkaitan antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan agenda program prioritas RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 ditunjukkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

No	Program Prioritas RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2015	Misi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
(1)	(2)	(3)
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, mandiri, dan berbudaya.	Butir pertama program prioritas RPJPD, selanjutnya diacu dan dipedomani dalam rumusan misi ke-1 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya</i>
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.	Butir kedua program prioritas RPJPD, selanjutnya diacu dan dipedomani dalam rumusan misi ke-3 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.</i>
3	Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.	Butir ketiga program prioritas RPJPD, selanjutnya dirumuskan menjadi misi ke-2 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</i> dan misi ke-8 yang berbunyi <i>Meningkatkan kapasitas pelayanan publik</i>
4	Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.	Butir keempat program prioritas RPJPD, selanjutnya diacu dan dipedomani dalam rumusan misi ke-4 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat</i>
5	Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.	Butir kelima program prioritas RPJPD, selanjutnya diacu dan dipedomani dalam rumusan misi ke-7 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian</i>
6	Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi (BERSINAR).	Butir keenam program prioritas RPJPD, selanjutnya diacu dan dipedomani dalam rumusan misi ke-5 RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah</i>

1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten juga berpedoman pada RTRW Kabupaten Klaten dalam bentuk penyelarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031. Hal ini mengingat peran RTRW Kabupaten Klaten merupakan acuan guna mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten.

Penyelarasan RPJMD dengan rencana tata ruang kabupaten guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten lainnya terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Selain itu penyelarasan RPJMD dengan RTRW juga untuk menjawab isu-isu strategis yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten, antara lain :

1. Perkembangan Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta yang sangat cepat berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Klaten khususnya sebagai penyangga kebutuhan perumahan dan permukiman bagi kedua kota itu.
2. Volume lalu lintas jalan raya nasional Surakarta-Yogyakarta yang semakin meningkat selain mengakibatkan meningkatnya tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas juga berdampak meningkatnya waktu tempuh proses produksi distribusi barang/jasa dari Klaten ke kota/wilayah lain begitu juga sebaliknya.
3. Perlunya Kabupaten Klaten membuat kebijakan *dis-insentif* dalam rangka mengendalikan tingginya angka perubahan pemanfaatan lahan dari pertanian ke non pertanian mengingat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 mengamanatkan bahwa Kabupaten Klaten merupakan penyangga produksi pangan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C (*pasir , kerikil dan batu*) khususnya yang tidak berijin dan lokasinya di luar zona yang ditentukan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 di kawasan Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko yang fungsinya sebagai kawasan resapan air selain mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten mengakibatkan kerusakan lingkungan (perubahan bentang alam dan menurunnya potensi air tanah) yang diperlukan bagi kehidupan dan pengairan pertanian selain itu juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan

- dan jembatan yang dilewati armada pengangkut mengingat beban armada pengangkut melebihi kemampuan kualifikasi teknis jalan yang dilewati.
5. Terjadinya kesenjangan (*disparitas*) perkembangan wilayah di mana wilayah/jalur tengah sepanjang jalan nasional Surakarta-Yogyakarta memiliki perkembangan sangat pesat sedangkan wilayah utara dan selatan relatif kurang berkembang/*stagnan*.
 6. Terjadinya ketimpangan (*disparitas*) ketersediaan air bersih perdesaan di mana Wilayah Kecamatan Kalunharjo plus (Karanganom, Tulung, Polanharjo dan Delanggu) berlimpah air bersih sedangkan wilayah Kecamatan Kemalang dan beberapa wilayah selatan (Bayat, Cawas dan Karangdowo) rawan air bersih.
 7. Wilayah Kabupaten Klaten dapat dikatakan sebagai "*laboratorium bencana alam*" mengingat memiliki kawasan rawan terjadinya bencana alam (gempa bumi, letusan Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, angin serta kekeringan).

Adapun konsistensi keterkaitan antara Misi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dan kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

No	RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
(1)	(2)	(3)
1	Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mendorong Pertumbuhan wilayah sehingga meminimalisir ketimpangan antar wilayah.	Misi ke-3 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi : <i>Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal</i> konsisten dengan Butir kesatu kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031. Misi ke-1, ke-2 dan ke-5 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 dalam konstelasi kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 berfungsi sebagai pendukung dan penyumbang konsistensi pelaksanaan RTRW diukur dengan ketaatan pelaksanaan RTRW.
2	Peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan prasarana melalui pengembangan sistem transportasi ke seluruh wilayah dalam rangka pemerataan pertumbuhan Kabupaten Klaten.	Misi ke-4 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat</i> konsisten dengan Butir kedua kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031
3	Pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung.	Misi ke-5 Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah konsisten dengan Butir ketiga kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031.
4	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang dikelola secara optimal, terintegrasi, sesuai dengan daya dukung wilayah dan ramah lingkungan.	Misi ke-4 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat</i> dan Misi ke-5 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah</i> konsisten dengan Butir keempat kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031.

No	RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
(1)	(2)	(3)
5	Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian sumber daya alam, hayati, dan budaya Kabupaten Klaten.	Misi ke-3, RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal</i> ; dan ke-5 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah</i> konsisten dengan Butir ke-5 kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031.
6	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan.	Misi ke-8 RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021 yang berbunyi: <i>Meningkatkan kapasitas pelayanan publik</i> , konsisten dengan Butir ke-6 kebijakan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031.

1.3.6 Keselarasan dan Kesenambungan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Tetangga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun saat RPJPD Kabupaten Klaten memasuki tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025. Serta memperhatikan huruf f ayat (2) Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa penelaahan RPJMD kabupaten/kota lainnya wajib diperhatikan keselarasannya, dan kesinambungan pembangunan antar wilayah.

Adapun keselarasan dan kesinambungan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 dengan RPJMD kabupaten/kota lainnya, ditunjukkan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Keselarasan dan Kesenambungan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 dengan RPJMD Kabupaten Lainnya

No	RPJMD SLEMAN	RPJMD GUNUNG KIDUL	RPJMD KLATEN	RPJMD BOYOLALI	RPJMD SUKOHARJO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VISI					
	Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sitem <i>e-government</i> menuju <i>smart regency</i> pada Tahun 2021	Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera Tahun 2025	Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing	Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera	Terus Membangun Sukoharjo yang lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang professional
MISI					
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya	Boyolali Melanjutkan semangat Pro Investasi Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan
2	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Boyolali membangun untuk perubahan	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

No	RPJMD SLEMAN	RPJMD GUNUNG KIDUL	RPJMD KLATEN	RPJMD BOYOLALI	RPJMD SUKOHARJO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatkan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan	Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian	Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal	Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera	Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan menggerakkan Sektor Unggulan Daerah
4	Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan	Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah	Meningkatkan kapa- sitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat	Boyolali sehat, produktif, berdaya saing	Meningkatkan kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat
5	Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional	Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai	Meningkatkan kapasi- tas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah	Boyolali Lumbung Padi dan Pangan Nasional	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang tenteram, aman dan dinamis
6		Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian	Boyolali, kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan	
7			Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Boyolali lebih maju dan berteknologi	

1.3.7 Keterkaitan RPJMD dengan RENSTRA – Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

1.3.8 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemertintah Kabupaten Klaten yang memuat program prioritas dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan dimaksud merupakan pengganti atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan. Bagian ini menjelaskan gambaran umum agar substansi pada bab-bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Klaten yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/ misi kepala daerah dan arah kebijakan daerah yang mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan serta kerangka pendanaan yang mencakup proyeksi pendapatan dan belanja, analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah yang relevan dan juga isu-isu strategis yang berasal dari dunia internasional, nasional maupun regional yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016–2021 yang mana merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini diuraikan keterkaitan antara tujuan, sasaran dan strategi dalam rangka pencapaian sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan antara program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan secara singkat fungsi dan peran dokumen perubahan RPJMD yang ditetapkan.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Maksud adanya Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 dalam rangka menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintahan daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih masa bakti tahun 2016-2021 sehingga seluruh upaya yang dilakukan dapat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi serta tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Melakukan penajaman penjabaran visi dan misi daerah dalam agenda pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai periode tahun 2021, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Merumuskan kembali gambaran keuangan daerah dengan aspek-aspek di dalamnya agar sinergis terkait dengan kerangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai periode tahun 2021;
- c. Merumuskan kembali dan menajamkan program pembangunan prioritas daerah yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai periode tahun 2021;
- d. Merumuskan kembali indikator capaian kinerja keberhasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta indikator capaian kinerja perangkat daerah jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai periode tahun 2021.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografis

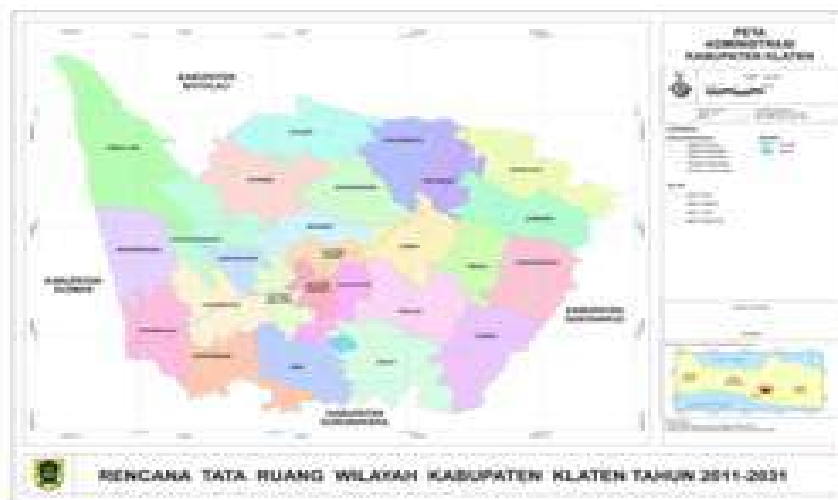
Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7^o32'19" Lintang Selatan sampai 7^o48'33" Lintang Selatan dan antara 110^o26'14" Bujur Timur sampai 110^o47'51" Bujur Timur.

2.1.2. Letak Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY); dan,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambar Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten
Sumber : RTRW Kabupaten Klaten 2009-2031

2.1.3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dan dengan ketinggian antara 76-1.600m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

- Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
- Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan-kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
- Wilayah berbukit/ gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100m dpl meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
- Wilayah dengan ketinggian antara 100-200m dpl meliputi Kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 200-400m dpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum(di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000m dpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
- Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

2.1.4. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28-30⁰C, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20-25 km/jam. Pada tahun 2015 curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Kecamatan Ngawen yaitu 374 mm, sedangkan jumlah intensitas hujannya 13.308mm/tahun. Sedangkan curah hujan terendah tercatat di Stasiun Bayat.

2.1.5. Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Klaten dapat diklasifikasikan berdasar jenis tanah, yaitu :

- Litosol, merupakan bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.
- Regosol Kelabu, sejenis bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten

Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

- Grumusol Kelabu Tua, bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat didaerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
- Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua, adalah sejenis bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
- Regosol Coklat Kekelabuan, sejenis bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

2.1.6. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (duapuluh) Kecamatan. Dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

2.1.7. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2013-2017 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.220 Ha pada tahun 2013, menjadi 33.116 Ha pada tahun 2014, menjadi 33.111 Ha pada tahun 2015, menjadi 33.066 Ha pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 33.022 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2014 seluas 54,1504 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40,4893 Ha dan Industri 13,6611 Ha. Sedangkan pada tahun 2015 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40,8997 Ha dan Industri 13,6631 Ha. Kemudian tahun 2016 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,392 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 33,058 Ha, Industri 8,910 Ha, Perusahaan 0,113 Ha dan Jasa 3,311 Ha. Untuk tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,761 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 40,298 Ha, Industri 4,515 Ha dan Jasa 0,948 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian maupun agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah bahkan nasional. Selanjutnya untuk meningkatkan tata kelola penggunaan lahan, perlu ada pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai potensi wilayah yang diselaraskan dengan tata ruang wilayah.

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah disusun dengan mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten diarahkan dengan memperhatikan pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis.

2.1.8.1. Pola Ruang

Pola Ruang Kabupaten Klaten yang direncanakan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya

A. Kawasan lindung terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung, mencakup luas kurang lebih 29 hektar berada di Kecamatan Bayat.
2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya (resapan air) meliputi wilayah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
3. Kawasan Perlindungan Setempat, merupakan sempa dan sungai mencakup luasan kurang lebih 3.963 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dataran sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar,
 - b. Dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 meter dari tepi sungai; dan
 - c. Dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 meter dari tepi sungai.
4. Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk ; yang dimaksud adalah kawasan sekitar danau atau waduk berupa daratan dengan jarak 50 meter sampai dengan 100 meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi, dengan luas kurang lebih 34 hektar berada di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat.
5. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, adalah kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 8.557 Ha atau 42% dari luas kawasan perkotaan yang sekitar 20.018 Ha.
6. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya yang terdiri atas:
 - a. Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 893 Ha yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemalang; dan
 - b. Kawasan cagar budaya meliputi:
 - 1) Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi

Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67Ha.

- 2) Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko dengan luas kurang lebih 1 Ha.
- 3) Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 Ha.

B. Kawasan budidaya terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi, yang terdiri atas:
 - a. Hutan produksi terbatas mencakup luasan kurang lebih 185 Ha berada di Kecamatan Bayat.
 - b. Hutan produksi tetap mencakup luasan kurang lebih 429 Ha meliputi kecamatan Bayat dan Kalikotes.
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat, yang mencakup luasan kurang lebih 1.514 Ha meliputi kecamatan Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wedi.
3. Kawasan peruntukan pertanian, mencakup luasan kurang lebih 28.949 Ha berada diseluruh kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kawasan peruntukan hortikultura mencakup luasan kurang lebih 2.422 Ha meliputi kecamatan: Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi dan Wonosari.
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan kurang lebih 1.080 Ha meliputi komoditas:
 - 1) Kelapa deres meliputi kecamatan: Bayat, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Wedi.
 - 2) Kapuk meliputi kecamatan: Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan Tulung.
 - 3) Kopi meliputi kecamatan: Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Tulung dan Manisrenggo.
 - 4) Tembakau rajangan dan asepan meliputi kecamatan: Bayat, Ceper, Kalikotes, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Prambanan, Karangnongko, Tulung, Manisrenggo dan Kemalang.
 - 5) Tembakau Virginia meliputi kecamatan: Pedan, dan Trucuk.
 - 6) Tembakau Vorsternland meliputi kecamatan: Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten Utara dan Wedi.

- 7) Cengkeh meliputi kecamatan: Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo dan Tulung.
 - 8) Tebu meliputi kecamatan: Bayat, Ceper, Pedan, Jatinom, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara dan Prambanan.
- c. Kawasan peruntukan peternakan diantaranya: penangkaran burung, sapi, kelinci, ayam, kambing dengan luasan kurang lebih 434 Ha meliputi:
- 1) Kecamatan Bayat;
 - 2) Kecamatan Cawas;
 - 3) Kecamatan Gantiwarno;
 - 4) Kecamatan Jatinom;
 - 5) Kecamatan Jogonalan;
 - 6) Kecamatan Karangdowo;
 - 7) Kecamatan Karangnongko;
 - 8) Kecamatan Kebonarum;
 - 9) Kecamatan Kemalang;
 - 10) Kecamatan Manisrenggo;
 - 11) Kecamatan Ngawen;
 - 12) Kecamatan Prambanan;
 - 13) Kecamatan Tulung; dan
 - 14) Kecamatan Wedi.
- d. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 32.451 Ha ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).
4. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi :
- a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap, dengan area luasan mencakup seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.
 - b. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya, yang meliputi:
 - 1) Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 170 Ha Kecamatan Bayat.
 - 2) Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 Hahektar meliputi kecamatan: Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan, Wonosari dan Tulung.
 - 3) Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem ke wilayahan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditasikan nila meliputi kecamatan: Karanganom, Polanharjo, dan Tulung.
5. Kawasan Peruntukan Pertambangan, adalah suatu kawasan yang

terdiri atas mineral serta minyak dan gas bumi, yang terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi:
 - 1) Pertambangan andesit berada di Kecamatan Karangdowo.
 - 2) Pertambangan batu gamping di Kecamatan Kalikotes.
 - 3) Pertambangan lempung alluvial meliputi kecamatan: Ceper, Gantiwarno, Jogonalan, Karanganom, Karangnongko dan Ngawen.
 - 4) Pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 69Ha berada di Kecamatan Kemalang
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten.
6. Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan industri besar meliputi:
 - 1) Kecamatan Ceper dengan luas kurang lebih 342 Ha.
 - 2) Kecamatan Pedan dengan luas kurang lebih 147 Ha; dan
 - 3) Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 127 Ha.
 - b. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi:
 - 1) Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 71Ha.
 - 2) Kecamatan Karanganom dengan luas kurang lebih 22Ha.
 - 3) Kecamatan Delanggu dengan luas kurang lebih 51 Ha, dan
 - 4) Kecamatan Jogonalan dengan luas kurang lebih 56 Ha.
 - c. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi:
 - 1) industri pengecoran logam berada di Kecamatan Ceper.
 - 2) industri pandai besi meliputi kecamatan: Delanggu, Jatinom, Karanganom, Manisrenggo dan Polanharjo.
 - 3) industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi kecamatan: Bayat, Cawas, Juwiring, Karangdowo dan Pedan.
 - 4) industri konveksi meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes, Klaten Selatan, Ngawen, Pedan, dan Wedi.
 - 5) industri genteng meliputi kecamatan: Ceper, Kalikotes, Karanganom, Klaten Selatan, Ngawen, dan Wonosari.
 - 6) industri meubel/ furniture meliputi kecamatan Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten Utara, Ngawen, Trucuk dan Wonosari.
 - 7) industri gerabah/keramik berada di wilayah kecamatan Bayat, Wedi dan Wonosari.
 - 8) industri pengolahan tembakau meliputi kecamatan Gantiwarno, Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk dan Wedi.
 - 9) industri soon berada di wilayah kecamatan Ngawen dan

Tulung.

- 10) industri makanan kecil meliputi kecamatan Jogonalan dan Polanharjo.
7. Kawasan Peruntukan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, mencakup;
 - 1) Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/ Gana, Candi Lor/ Candi rejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan.
 - 2) Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko.
 - 3) Museum Gula Jawa Tengah berada di Kecamatan Jogonalan.
 - 4) Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi Yaqowiyu berada di Kecamatan Jatinom.
 - 5) Makam Ki Ageng Pandanaran berada di Kecamatan Bayat.
 - 6) Makam Ki Ageng Ronggowarsito berada di Kecamatan Trucuk.
 - 7) Makam Ki Ageng Perwito berada di Kecamatan Wonosari; dan
 - 8) Keunikan local desa wisata meliputi desa :
 - a) Desa Wisata Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan;
 - b) Desa Wisata Melikan Kecamatan Wedi;
 - c) Desa Wisata Duwet Kecamatan Ngawen;
 - d) Desa Wisata Soran Kecamatan Ngawen;
 - e) Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo;
 - f) Desa Wisata Plawikan Kecamatan Jogonalan;
 - g) Desa Wisata Jimbung Kecamatan Kalikotes;
 - h) Desa Wisata Krakitan Kecamatan Bayat;
 - i) Desa Wisata Pokak Kecamatan Ceper; dan
 - j) Desa Wisata lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam mencakup lokasi :
 - 1) Deles Indah berada di Kecamatan Kemalang.
 - 2) Gunung Watu Prau dan Pegunungan Kidul berada di Kecamatan Bayat.
 - 3) Kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat.
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan mencakup lokasi :
 - 1) Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan Bayat.
 - 2) Obyek Wisata Mata Air Cokro (OMAC), Pemandian

Lumban Tirto, Kecamatan Tulung dan Pemancingan Janti berada di Kecamatan Polanharjo.

- 3) Pemandian Umbul Ponggok berada di Kecamatan Polanharjo
- 4) Pemandian Jolotundo berada di Kecamatan Karangnom, dan
- 5) Pemandian Tirto mulyono dan Pemandian Tirto mulyani berada di Kecamatan Kebonarum.

8. Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi :

- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan mencakup luasan kurang lebih 10.480 Ha meliputi desa dan kelurahan pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.
- b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan mencakup luasan kurang lebih 19.935 Ha meliputi desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten.
- c. Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) mandiri di kawasan perkotaan.

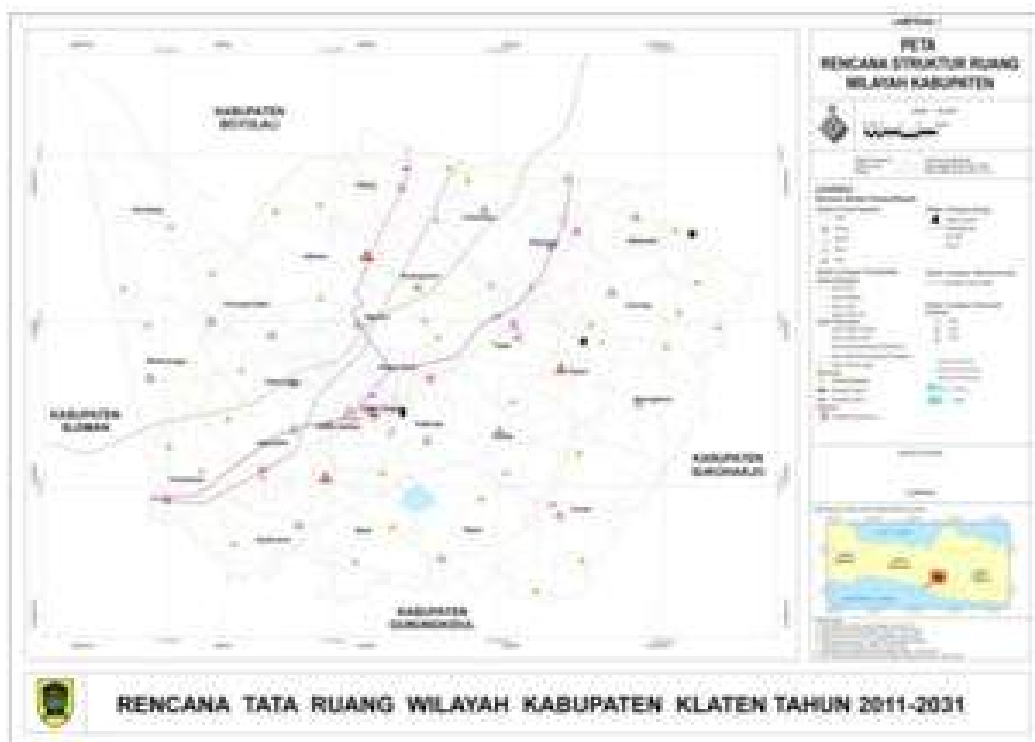
9. Kawasan Peruntukan Lainnya, yang meliputi:

- a. Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur) berada di Kecamatan Klaten Selatan dengan luas kurang lebih 29 Ha.
- b. Komando Distrik Militer (Kodim) Klaten berada di Kecamatan Klaten Tengah dengan luas kurang lebih 1 Ha.
- c. Kepolisian Resor (Polres) Klaten berada di Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 3 Ha.
- d. Lapangan tembak berada di Kecamatan Trucuk dengan luas kurang lebih 5 Ha.
- e. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan
- f. Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di wilayah Kabupaten.

2.1.8.2. Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri dari sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem pusat kegiatan ini perlu direncanakan untuk mengurangi disparitas perkembangan wilayah dimana kawasan/jalur tengah memiliki perkembangan yang sangat pesat, dan wilayah bagian utara dan selatan kurang berkembang. Sistem perkotaan terdiri dari PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) meliputi Kecamatan Klaten Selatan, Klaten Tengah, dan Klaten Utara; PKL (Pusat Kegiatan Lokal) meliputi Kecamatan Delanggu dan Kecamatan Prambanan, PKLP (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) meliputi Kecamatan Jatinom, Pedan, dan Wedi, PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi 18 kecamatan yang lain.

Sedangkan pada sistem perdesaan dikembangkan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Pengembangan Struktur Ruang dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klaten
Sumber : RTRW Kabupaten Klaten 2009-2031

2.1.8.3. Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten Klaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Klaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berdasarkan kawasan strategis provinsi meliputi:

a. kawasan perkotaan Surakarta–Boyolali – Sukoharjo –Karanganyar–Wonogiri–Sragen–Klaten (Subosukawonosraten); dan

b. kawasan koridor perbatasan Klaten–Sukoharjo–Wonosari (Kesukosari).

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

a. Kawasan Perkotaan Klaten, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan, industri dan permukiman perkotaan;

b. Kawasan Perkotaan Prambanan, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama pariwisata, perdagangan, industri dan permukiman perkotaan;

c. Kawasan Perkotaan Delanggu, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan, dan permukiman perkotaan;

d. Kawasan Perkotaan Wedi, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan, industri kecil, dan permukiman perkotaan;

e. Kawasan Perkotaan Pedan, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan, industri, dan permukiman perkotaan;

f. Kawasan Perkotaan Jatinom, dengan pengembangan fungsi kegiatan utama perdagangan dan permukiman perkotaan;

g. Kawasan agropolitan yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan

h. Kawasan minapolitan meliputi:

1. Kecamatan Polanharjo;
2. Kecamatan Tulung; dan
3. Kecamatan Karangnom.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya kawasan strategis nasional berupa Kawasan Candi Prambanan berada di Kecamatan Prambanan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berdasarkan kawasan strategis nasional berupa Kawasan Gunung Merapi dan Sekitarnya meliputi:

- a. Kecamatan Kemalang;
- b. Kecamatan Manisrenggo; dan
- c. Kecamatan Karangnongko.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari:

a. kawasan resapan air meliputi:

- 1) Kecamatan Kemalang;
- 2) Kecamatan Manisrenggo;
- 3) Kecamatan Karangnongko;
- 4) Kecamatan Jatinom; dan
- 5) Kecamatan Tulung.

b. kawasan DAS Bengawan Solo dan Sub DAS Sungai Dengkeng



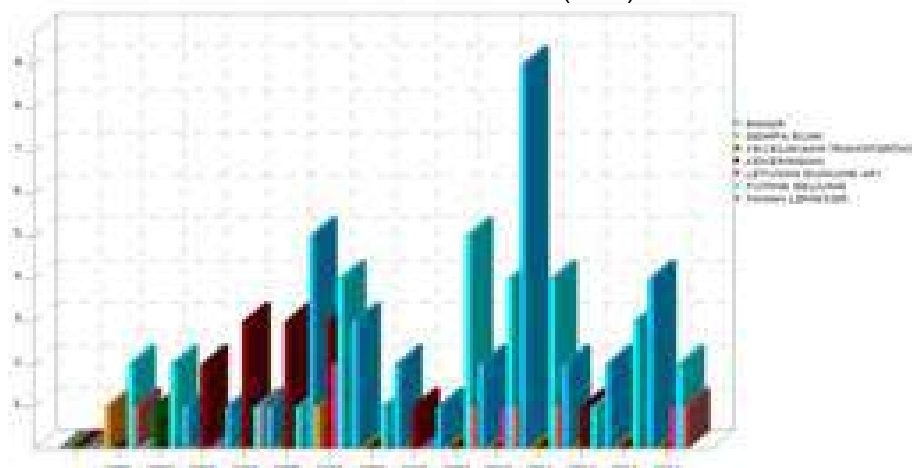
Gambar 2.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Klaten
Sumber : RTRW Kabupaten Klaten 2009-2031

2.1.9. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam. Jenis dan kawasan rawan bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- A. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor mencakup wilayah :
 1. Kecamatan Bayat.
 2. Kecamatan Cawas.
 3. Kecamatan Gantiwarno.
 4. Kecamatan Kemalang.
 5. Kecamatan Manisrenggo.
 6. Kecamatan Prambanan, dan
 7. Kecamatan Wedi.
- B. Kawasan rawan bencana alam banjir mencakup wilayah :
 1. Kecamatan Bayat.
 2. Kecamatan Cawas.
 3. Kecamatan Ceper.
 4. Kecamatan Gantiwarno.
 5. Kecamatan Juwiring.
 6. Kecamatan Karangdowo.
 7. Kecamatan Pedan.
 8. Kecamatan Prambanan.
 9. Kecamatan Trucuk.
 10. Kecamatan Wedi, dan
 11. Kecamatan Wonosari.
- C. Kawasan rawan bencana angin topan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten.

Potensi ancaman bencana yang sudah ada di Kabupaten Klaten akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat. Berbagai persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten Klaten seperti perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana. Berikut adalah rekaman kejadian bencana di Kabupaten Klaten yang terekam di dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam 15 tahun terakhir:



Gambar 2.4 Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2014
Sumber: <http://dibi.bnppb.go.id>

Dari Gambar 2.4 bencana banjir adalah kejadian yang paling sering terjadi dalam lima belas tahun terakhir di Kabupaten Klaten (33 kali), kemudian

cuaca ekstrim (30 kali), kekeringan (13 kali), tanah longsor (6 kali), erupsi gunung berapi (4 kali) dan gempa bumi (2 kali).

Kejadian bencana tersebut berdampak kepada penduduk seperti menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan mengungsi. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan bangunan (rumah, fasilitas pendidikan dan kesehatan) serta lahan pertanian. Gambar 2.4 di atas juga menunjukkan bahwa:

1. Kejadian banjir memiliki kecenderungan meningkat, dengan puncaknya pada Tahun 2011.
2. Cuaca ekstrim (Puting Beliung) cenderung meningkat, dengan puncaknya pada Tahun 2009.
3. Kekeringan dan tanah longsor cenderung menurun.
4. Gempa bumi dan gunung api cenderung tetap.

2.1.10. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2014 sebanyak 1.261.606 jiwa, naik menjadi sebanyak 1.308.712 jiwa pada tahun 2017, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1,22% dan kepadatan penduduk 19.963 jiwa/km². Gambaran jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.1

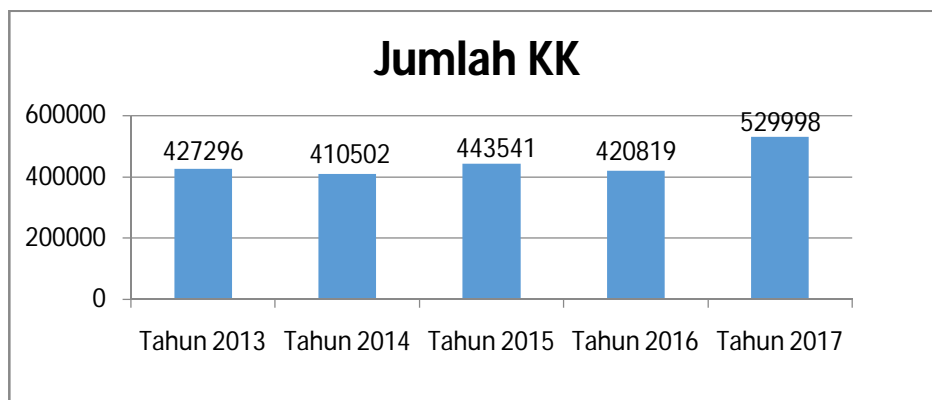
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 Dan Laju Pertumbuhan di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Tahun					Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		2013	2014	2015	2016	2017*)			
1	Prambanan	58,448	58,712	59,790	59,818	52,112	-7,706	-12,88%	2,133
2	Gantiwarno	49,498	49,631	50,004	50,036	41,060	-8,976	-17,94%	1,601
3	Wedi	64,400	64,290	64,397	64,447	54,068	-10,379	-16,10%	2,218
4	Bayat	74,425	74,836	75,891	75,912	64,680	-11,232	-14,80%	1,640
5	Cawas	69,967	70,071	70,067	70,117	60,047	-10,070	-14,36%	1,742
6	Trucuk	87,397	87,526	87,721	87,780	79,409	-8,371	-9,54%	2,349
7	Kebonarum	23,890	23,861	23,916	23,919	20,532	-3,387	-14,16%	2,123
8	Jogonalan	68,250	68,260	69,670	69,676	59,808	-9,868	-14,16%	2,240
9	Manisrenggo	47,902	48,084	48,834	48,858	43,245	-5,613	-11,49%	1,604
10	Karangnongko	41,888	42,082	42,585	42,615	37,371	-5,244	12,31%	1,398
11	Ceper	73,337	73,735	75,496	75,524	66,196	-9,328	-12,35%	2,707
12	Pedan	54,408	54,507	55,184	55,210	48,592	-6,618	-11,99%	2,535
13	Karangdowo	53,061	53,061	53,316	53,340	46,144	-7,196	-13,49%	1,579
14	Juwiring	68,172	68,271	68,677	68,692	60,953	-7,739	-11,27%	2,046
15	Wonosari	70,221	70,626	71,480	71,505	64,494	-7,011	-9,80%	2,071
16	Delanggu	49,736	49,739	49,966	49,982	43,917	-6,065	-12,13%	2,338
17	Polanharjo	48,438	48,610	48,585	48,629	42,886	-5,743	-11,81%	1,799
18	Karanganom	51,879	52,034	52,551	52,610	47,102	-5,508	-10,47%	1,958
19	Tulung	61,865	62,049	62,920	62,938	55,386	-7,552	-12,00%	1,731
20	Jatinom	66,301	66,804	68,594	68,620	61,475	-7,145	-10,41%	1,730
21	Kemalang	41,625	41,905	42,990	43,015	39,467	-3,548	-8,25%	764
22	Ngawen	51,168	51,388	51,630	51,640	46,697	-4,943	-9,57%	2,752
23	Kalikotes	40,724	41,052	41,461	41,553	37,877	-3,676	-8,85%	2,918
24	Klaten Utara	50,480	50,804	51,773	51,797	48,315	-3,482	-6,72%	4,641
25	Klaten Tengah	47,033	47,245	47,712	47,731	42,361	-5,370	-11,25%	4,749
26	Klaten Selatan	50,010	50,070	50,400	50,462	44,518	-5,944	-11,78%	3,085
JUMLAH		1.464.523	1.469.253	1.480.271	1.486.426	1.308.712	-177.714	-11,96%	-11,96%

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Berdasar Tabel 2.1 Pertumbuhan penduduk di semua Kecamatan mengalami penurunan atau minus. Hal ini berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa diketemukan adanya data ganda dan data tidak normal, sehingga setelah dibersihkan/validasi administrasi kependudukan oleh pusat maka jumlah penduduk Kabupaten Klaten mengalami kenaikan dari semula 1.300.706 jiwa pada tahun 2016 menjadi 1.308.712 jiwa pada tahun 2017.

Ada peningkatan jumlah KK yang semula sejumlah 420.819 KK pada tahun 2016 menjadi 529.998 KK pada tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri). Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.5



Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kab.Klaten tahun 2013-2017
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

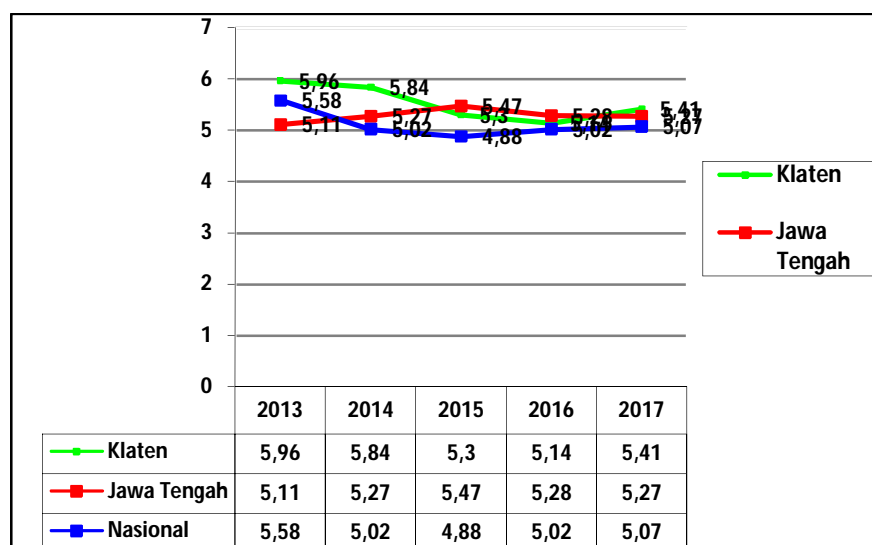
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten dapat dilihat pada aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga serta agama.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2013 tumbuh 5,96%, dan tahun 2014 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 5,84%, pada tahun 2015 dan 2016 juga mengalami penurunan (atau hanya tumbuh 5,30% dan 5,14%) sebagai akibat pengaruh perekonomian nasional, sedangkan tahun 2017 tumbuh sebesar 5,41%. Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Gambar 2.6



Gambar 2.6 Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kab. Klaten,Provinsi JawaTengah dan Nasional selama tahun 2013-2017
Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten, 2018

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2013-2017 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.583.620,33	4,56	2.606.035,81	0,87	2.732.275,47	4,84	2.814.072,17	2,99	2.907,217.96	3.31
2	Pertambangan dan Penggalian	557.451,35	6,45	597.551,15	7,19	617.439,64	3,33	635.253,28	2,89	666,761.84	4.96
3	Industri Pengolahan	6.506.551,46	8,60	7.093.268,56	9,02	7.540.801,78	6,31	8.001.139,74	6,10	8,601,225.22	7.50
4	Pengadaan Listrik dan gas	37.301,57	7,98	38.526,20	3,28	39.160,62	1,65	41.588,12	6,20	43,576.03	4.78
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.062,16	3,46	11.527,87	4,21	11.793,17	2,30	12.047,34	2,16	12,412.37	3.03
6	Konstruksi	1.254.970,42	4,65	1.294.690,29	3,17	1.356.317,55	4,76	1.435.985,49	5,87	1,502,184.42	4.61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.000.471,06	2,24	4.094.285,55	2,35	4.209.074,39	2,80	4.358.461,18	3,55	4,477,883.02	2.74
8	Transportasi dan Pergudangan	469.346,14	10,63	515.457,41	9,82	544.592,24	5,65	566.772,32	4,07	609,506.95	7.54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	755.159,55	2,91	792.087,87	4,89	832.820,90	5,14	883.280,17	6,06	925,235.98	4.75
10	Informasi dan Komunikasi	749.129,31	3,72	794.978,71	6,12	844.708,79	6,26	908.151,37	7,51	961,823.12	5.91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	675.611,17	5,94	718.614,58	6,37	767.642,41	6,82	823.297,85	7,25	877,635.51	6.60
12	Real Estate	290.530,05	6,80	316.062,61	8,79	339.893,73	7,54	360.869,45	6,17	387,285.09	7.32
13	Jasa Perusahaan	60.535,96	18,84	65.626,24	8,41	70.961,66	8,13	77.484,45	9,19	86,116.22	11.14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	543.501,77	2,39	546.822,57	0,61	574.874,57	5,13	591.863,52	2,96	608,258.14	2.77
15	Jasa Pendidikan	1.193.988,37	10,03	1.333.544,38	11,69	1.438.627,68	7,88	1.519.264,74	5,61	1,652,960.04	8.80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	200.873,15	9,90	224.011,39	11,52	241.260,27	7,70	260.076,42	7,80	284,081.47	9.23
17	Jasa Lainnya	351.325,20	10,03	381.431,17	8,57	396.731,26	4,01	428.323,40	7,96	46,104,730.78	7.64
Produk Domestik Regional Bruto		20.241.429,01	5,96	21.424.522,36	5,84	22.558.976,15	5,30	23.717.931,02	5,14	25.001.071.09	5.41

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2017

Dari Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.20.241.429,01 juta pada tahun 2013, meningkat menjadi sebesar Rp.25.001.071,09 juta pada tahun 2017.

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang mengalami penurunan, seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor teknis lapangan yaitu adanya serangan hama wereng batang coklat dan tikus

termasuk terkena bencana banjir, sehingga berpengaruh terhadap produksi maupun produktifitasnya.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 di Kab. Klaten Tahun 2013-2017 (dlm Juta Rupiah)

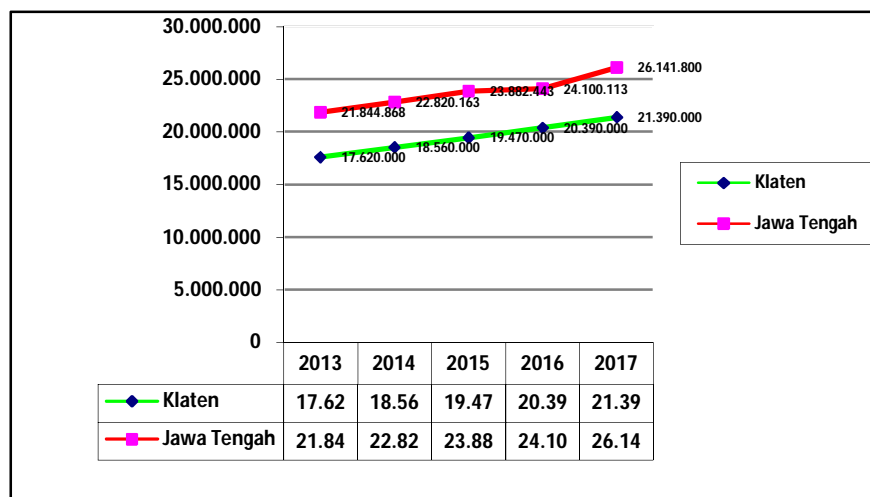
No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.092.353,37	13,24	3.210.623,71	12,3	3.606.172,55	12,32	3,807,648.99	5.12	4,105,407.14	7.82
2	Pertambangan dan Penggalian	662.226,32	2,84	779.207,55	2,98	804.142,19	3,20	1,013,913.84	6.13	1,157,078.47	14.12
3	Industri Pengolahan	7.656.350,45	32,79	9.062.902,26	34,71	12.210.448,21	34,73	11,342,482.65	11.44	12,819,273.89	13.02
4	Pengadaan Listrik dan gas	34.573,28	0,15	37.059,00	0,14	37.122,00	0,17	45,832.98	15.56	49,517.95	8.04
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.475,50	0,05	14.555,27	0,06	14.566,91	0,08	13,246.78	4.32	13,931.64	5.17
6	Konstruksi	1.417.692,47	6,07	1.604.897,56	6,15	1.703.759,25	6,16	1,914,709.83	7.56	2,106,755.23	10.03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.398.186,49	18,84	4.624.131,37	17,17	5.419.481,97	17,20	5,290,031.30	6.92	5,624,890.28	6.33
8	Transportasi dan Pergudangan	482.687,50	2,07	553.015,86	2,12	564.961,00	2,16	645,983.06	5.03	714,844.85	10.66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	802.421,78	3,44	878.387,98	3,36	908.253,17	3,40	1,091,004.92	11.92	1,188,213.46	8.91
10	Informasi dan Komunikasi	795.566,86	3,41	836.098,10	3,2	863.271,29	3,25	948,513.65	7.72	1,005,139.91	5.97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	809.724,85	3,47	872.413,56	3,34	901.639,41	3,35	1,084,247.12	9.99	1,199,394.16	10.62
12	Real Estate	298.881,50	1,28	343.172,57	1,31	347.736,77	1,33	409,138.03	7.36	451,729.30	10.41
13	Jasa Perusahaan	71.050,05	0,30	79.657,41	0,31	79.912,31	0,32	102,385.38	13.18	119,043.48	16.27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	622.229,09	2,66	664.379,58	2,54	681.254,82	2,54	790,819.46	8.19	850,130.92	7.50
15	Jasa Pendidikan	1.548.658,63	6,63	1.805.978,48	6,92	1.931.132,79	6,93	2,159,132.68	8.82	2,447,160.98	13.34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	262.302,13	1,12	303.146,41	1,16	306.662,91	1,16	371,819.69	9.57	424,134.72	14.07
17	Jasa Lainnya	381.500,21	1,63	441.155,71	1,69	448.655,36	1,70	527,780.71	12.13	592,961.63	12.35
Produk Domestik Regional Bruto		23.348.880,48	100	26.110.782,38	100	30.829.172,92	100	31,558,691.06	8.87	34.869.608,02	10.27

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2017

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.23.348.880,48 juta pada tahun 2013, meningkat menjadi sebesar Rp.34.869.608,02 juta pada tahun 2017.

B. PDRB Perkapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Adapun perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja yang cenderung meningkat. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2013 sebesar Rp.17,62 juta, pada tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp.18,56 juta, pada tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp.19,47 juta, dan pada tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp.20,39 juta, sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp.21,39 juta. Gambaran selengkapnya Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.7.

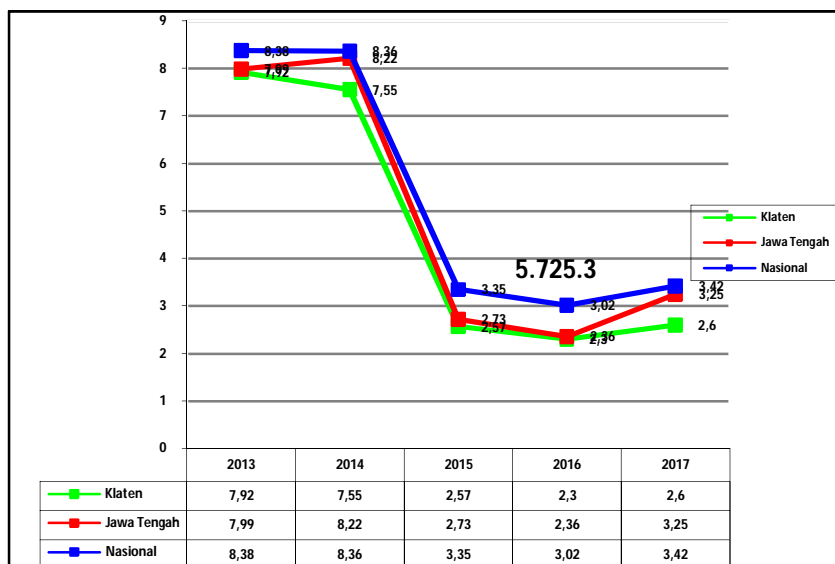


Gambar 2.7 Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2017 & BPS Kabupaten Klaten Tahun 2017 (Ket: Data Tahun 2016 dan 2017 sangat sementara)

C. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama 5 tahun dari tahun 2013-2017 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2013 sebesar 7,92%, atau lebih tinggi dibanding tahun 2017 sebesar 2,60%. Fluktuasi Inflasi ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti adanya fluktuasi harga komoditas pangan maupun harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap laju inflasi. Perbandingan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.8



Gambar 2.8 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2017.

Berdasarkan Gambar 2.8 di atas, laju inflasi selama tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Inflasi pada tahun 2013 sebesar 7,92% dapat disampaikan cukup stabil. Untuk inflasi pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 7,55% dan dilihat dari komponen pembentuknya, kenaikan inflasi pada tahun 2014 disebabkan oleh perubahan musim yang berpengaruh pada

kenaikan harga barang terutama bahan pangan strategis seperti beras, jagung dan bawang, maupun cabe.

Selanjutnya untuk inflansi pada tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,57% untuk tahun 2015 dan sebesar 2,30% untuk tahun 2016. Penurunan ini utamanya dipicu oleh stabilnya harga pangan beberapa komoditas utama dan naiknya daya beli masyarakat, meskipun ada sedikit kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar 41-42 Listrik (TDL).

Mengingat BBM dan TDL sebagai faktor produksi utama, maka secara langsung menyebabkan perubahan harga barang-barang strategis yang sangat mempengaruhi laju inflansi. Sedangkan untuk tahun 2017 inflansi di Kabupaten Klaten sebesar 2,60% disebabkan oleh masih terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berjalannya fungsi Tim Pengendali Inflansi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

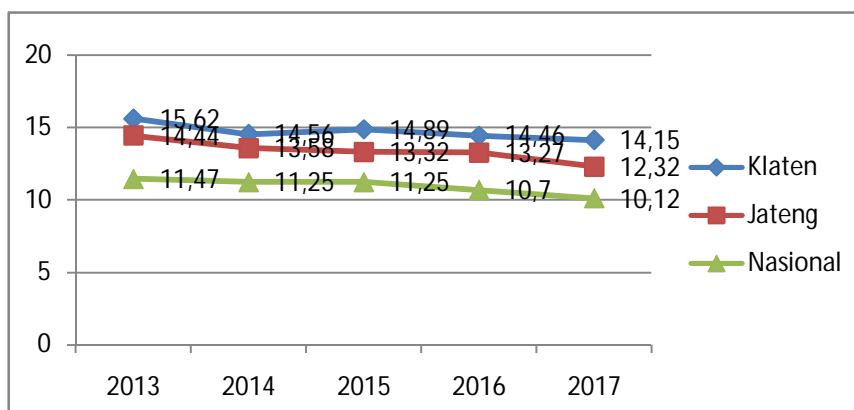
D. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 pendekatan pendataan, yaitu persentase penduduk miskin, dan Jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kriteria yang berbeda.

Tabel 2.4 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk Disdukcapil (Jiwa)	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Prosentase Penduduk Miskin
1	2013	1.246.944	1.149.002	179.500	15,62
2	2014	1.261.606	1.154.028	168.180	14,56
3	2015	1.292.013	1.158.295	172.300	14,89
4	2016	1.300.706	1.163.218	168.010	14,46
5	2017	1.308.712	1.166.100	164.990	14,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018



Gambar 2.9 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 mengalami penurunan namun penurunannya masih relatif kecil. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin sebesar 15,62% turun menjadi

14,56% pada Tahun 2014, namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,89%, pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi sebesar 14,46% dan pada tahun 2017 kembali menurun sebesar 14,15%.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, maupun nasional sesuai Gambar 2.9 dan Kabupaten Klaten masih masuk ke dalam 15 Kabupaten miskin di Provinsi Jawa Tengah. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten masih relatif tinggi, hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pendapatan masyarakat miskin dan non miskin, dan *base data* awal kemiskinan yang masih bias. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di antaranya dengan memberikan pembekalan ketrampilan dan akses modal usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, serta melaksanakan Pemuktakhiran *base data* kemiskinan.

2. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Kondisi rumah tangga miskin dihitung berdasarkan variabel jenis dan jumlah permasalahan yang dihadapi rumah tangga atau kepala rumah tangga. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan variabel tersebut, kondisi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Klaten tahun 2015 berdasarkan pada data hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 dengan menggunakan data status kesejahteraan 40% terendah secara nasional, maka dapat digambarkan hasil pemutakhiran data Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Klaten dengan jumlah KK sebanyak 168.543 (atau 531.673 jiwa), dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Klaten

NAMA KECAMATAN	Jumlah KK	Jumlah Individu
Jumlah Total	168.543	531.673
BAYAT	11.047	36200
CAWAS	9.838	29307
CEPER	7.899	25557
DELANGGU	4.846	14516
GANTIWARNO	7.072	21351
JATINOM	8.876	27467
JOGONALAN	7.127	2.2790
JUWIRING	8.095	2.6243
KALIKOTES	3.431	1.1473
KARANGANOM	6.045	18.956
KARANGDOWO	6.808	21.229
KARANGNONGKO	4.772	14.917
KEBONARUM	2.331	6.695
KEMALANG	6.494	21.278
KLATEN SELATAN	3.077	9.628
KLATEN TENGAH	2.717	8.701
KLATEN UTARA	2.908	9.703
MANISRENGGO	6.269	20.016
NGAWEN	5.551	17.507
PEDAN	6.124	20.948
POLANHARJO	4.548	13.295
PRAMBANAN	6.681	20.814

NAMA KECAMATAN	Jumlah KK	Jumlah Individu
Jumlah Total	168.543	531.673
TRUCUK	12.395	39.694
TULUNG	7.296	22.211
WEDI	8.086	24.957
WONOSARI	8.210	26.220

Sumber : Pemutakhiran Basis Data Terpadu TNP2K, 2016

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Bidang Tenaga Kerja

Kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang cukup erat dengan suksesnya program-program pembangunan. Dalam hal ini gambaran profil SDM merupakan suatu informasi untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi pada tahap sebelumnya, dan merencanakan tahapan pembangunan berikutnya. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara teori, penduduk dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) penduduk usia kerja, dan (ii) penduduk bukan usia kerja, seperti pada Gambar 2.10



Gambar 2.10 Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Gambaran indikator kependudukan dan ketenagakerjaan selama Tahun 2013-2017, dapat dilihat seperti pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Beberapa Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017

INDIKATOR	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk Usia Kerja	orang	993.961	975.789	963.189	894.546	894.536
Kegiatan utama penduduk usia kerja						
Bekerja	%	38,87	60,15	52,44	42,84	54,56
Mencari pekerjaan	%	33,8	12,98	15,11	26,03	18,77
Sekolah	%	11,44	12,79	14,19	14,25	16,34
Mengurus rumah tangga	%	24,64	22,48	26,91	26,42	9,08
Lainnya	%	1,25	1,6	1,35	1,46	1,25

INDIKATOR	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,03	72,22	73,1	70,46	70,46
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,34	4,75	2,51	3,94	4,35
Lapangan Pekerjaan Penduduk Yang Bekerja						
Pertanian	%	16,89	17,26	16,79	16,68	7,43
Penggalian	%	1,32	1,3	1,31	1,38	-
Industri	%	21,16	20,72	20,35	20,75	0,15
Listrik, gas & Air Bersih	%	0,81	0,84	0,83	0,91	0,01
Konstruksi	%	7,37	7,29	8,09	7,37	0,05
Perdagangan	%	29,77	29,9	30,11	30,4	10,15
Angkutan	%	3,1	3,15	3,12	3,16	0,52
Lembaga Keuangan	%	4,08	4,1	4,08	4,27	0,00
Jasa dan Lainnya	%	15,5	15,44	15,32	15,08	81,69
Status pekerjaan penduduk yang bekerja						
Berusaha sendiri	%	24,97	22,39	21,29	23,29	55,57
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	%	13,15	17,03	19,2	19,2	13,73
Berusaha dibantu buruh tetap	%	3,42	4,25	2,5	2,5	24,54
Buruh/karyawan & pekerjaan bebas	%	48,08	44,14	45,82	42,82	6,05
Pekerja keluarga	%	10,38	12,19	11,19	12,19	0,10

**) data diolah berdasarkan Database Pelayanan SIAK Dinas Dukcapil, 2018*

Kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2013-2017 selalu meningkat karena disesuaikan dengan meningkatnya persentase Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Data KHL pada Tahun 2016-2017 kosong karena sudah tidak dilakukan survey lagi. Persentase UMK terhadap KHL dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7 Persentase UMK terhadap KHL di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017

Tahun	Rata-Rata UMK (Rp)	KHL (Rp)	Persentase UMK Terhadap KHL
2013	871.500	1.015.262	85,84
2014	1.170.000	1.169.976	100,00
2015	1.400.000	1.365.550	102,52
2016	1.528.500,00	0	100,00
2017	1.661.632,35	0	100,00

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten, 2018

Tenaga kerja di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 sebagian besar bekerja di sektor primer (pertanian), namun telah terjadi pergeseran ke sektor sekunder (perdagangan dan industri) serta sektor tersier (bidang jasa dan lainnya). Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017

Tahun	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	3.097	26.800	9.721	1.085	6.794
2014	1.418	19.507	9.221	3.387	7.321
2015	32.773	1.488	17.795	2.504	49.714
2016	32.093	1.348	16.957	6.351	42.762
2017	25.972	699	13.635	287.472	880.934

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, 2017

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kurun waktu tahun 2013-2015 menunjukkan perkembangan yang meningkat, prosentase tertinggi

terlihat pada tabel 2.9 tahun 2015 sebesar 96,42, namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang optimal.

Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Periode 2013-2017

No	Indikator	Periode							
		2013		2014		2015		2016	2017
		L	P	L	P	L	P		
1	Usia Harapan Hidup	70,18	74,03	74,51	78,46	74,52	78,49	76,59	76,62
2	Harapan Lama Sekolah	96,29	86,26	12,58	12,96	12,59	13,06	12,85	12,97
3	Rata-rata Lama Sekolah	9,13	7,66	8,7	7,2	8,8	7,56	8,22	8,23
4	Pengeluaran per kapita	63,08	36,92	12.117	10.894	12.214	10.908	11.227	11.369
5	IPG	95,16		95,90		95,90		96,42	73,97

Sumber : Dinsos P3AKB, 2018

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam kurun waktu tahun 2013-2015 menunjukkan perkembangan yang meningkat, prosentase tertinggi terlihat pada tabel 2.10 pada Tahun 2015 sebesar 96,42, namun relatif rendah dibandingkan Propinsi Jawa Tengah (IDG Tahun 2015 sebesar 74,80) dan Nasional (IDG tahun 2015 sebesar 70,83). Peningkatan ini disebabkan Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan peningkatan anggaran program untuk PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Tabel 2.10 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2013-2017

No.	Indikator	Periode									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	70,18		74,51		74,52		94	6	94	6
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	96,29		12,58		12,59		50,3	49,7		
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	9,13		8,7		8,8					
4	IDG	95,16		95,90		96,42					

Sumber : Dinsos P3AKB, 2018

2. Peran Perempuan dalam Pemerintahan

Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Klaten seperti terlihat pada tabel 2.11 pada Tahun 2017 sebesar 6% relatif rendah dibandingkan Propinsi Jawa Tengah (sebesar 24,24 %) dan Nasional (sebesar 17,32). Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kesadaran dan kemampuan perempuan untuk berdaya masih rendah dan masih kurangnya daya saing perempuan, Daya Saing yang kompetitif. Akan tetapi Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Klaten didukung dengan adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi PPRG dengan fokus Anggaran berbasis PPRG.

Tabel 2.11 Data Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif Dan Legislatif di Kabupaten Klaten

No.	Jenis Jabatan	Periode				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Eksekutif (%)	(7.441/22.379) = 33,25	(7.159/24.195) = 29,6	(7.417/26.518) = 27,97	(7.072/27.344) = 25,86	n/a
2	Legislatif (%)	(9/50) = 18,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka (2018).

3. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat pada Tabel 2.12

Tabel 2.12 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2013-2017

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Traficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2017	8	5	5	13	1	11	-	5	-	-	48
2016	11	-	2	-	-	28	-	-	-	-	41
2015	-	-	-	2	-	15	-	-	-	-	17
2014	6	-	-	-	-	30	-	-	-	-	36
2013	-	39	1	2	-	8	1	16	-	-	66

Sumber : P2TP2A Kabupaten Klaten, 2016

Kondisi kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dipengaruhi dengan belum optimalnya sarana dan prasarana kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak, masih lemahnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah, dan belum tersedianya data berbasis gender dan anak. Namun hal tersebut dapat didorong dengan adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota atau Kabupaten Layak Anak.

Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik perlu didukung dengan adanya regulasi/kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan PUG dan PPRG dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah melalui koordinasi lintas sektor serta penambahan anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender. Berikut tabel program dan kegiatan serta anggaran yang responsif gender dan anak.

Tabel 2.13 Program dan Kegiatan Penunjang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017

No.	Program & Kegiatan	Pagu Anggaran
	TAHUN 2013	TH 2013
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000
	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	100.000.000

No.	Program & Kegiatan	Pagu Anggaran
2.	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	82.000.000
	Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)	30.000.000
	Pertemuan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu	12.000.000
	Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan	4.000.000
	Fasilitasi Forum Anak	8.000.000
	Pendidikan Keterampilan Perempuan	8.000.000
	Fasilitasi Replikasi Desa Layak Anak	5.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan	15.000.000
	Total	182.000.000
	TAHUN 2014	TH 2014
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000
	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	100.000.000
2.	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	87.000.000
	Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)	30.000.000
	Pertemuan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu	12.000.000
	Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan	4.000.000
	Fasilitasi Forum Anak	13.000.000
	Pendidikan Keterampilan Perempuan	8.000.000
	Fasilitasi Replikasi Desa Layak Anak	5.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan	15.000.000
	Total	187.000.000
	TAHUN 2015	TH 2015
1.	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	65.000.000
	Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)	26.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan	27.000.000
	Pendidikan Keterampilan Perempuan	12.000.000
2.	Program Perlindungan Anak	122.000.000
	Sosialisasi Pembinaan tentang Perlindungan Anak	26.000.000
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	32.000.000
	Pendampingan 9 Desa Layak Anak (DLA)	27.000.000
	Rintisan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kec	15.000.000
	Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan	4.000.000
	Fasilitasi Forum Anak	13.000.000
	Replikasi Desa Kelurahan Layak Anak (DLA) Kelurahan Tonggalan Kec. Klaten tengah	5.000.000
	Total	187.000.000
	TAHUN 2016	2016
1.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	70.000.000
	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	50.000.000
	Advokasi Keadilan Restoratif	20.000.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	66.500.000
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)	12.000.000
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	4.500.000
	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG	50.000.000
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.000.000
	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking	4.000.000
4.	Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	125.500.000
	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan forum anak pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)	4.000.000
	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi	15.500.000
	Fasilitasi Peningkatan Peran serta Organisasi Wanita	6.000.000
	Total	266.000.000

	TAHUN 2017	TH 2017
1.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	131.500.000
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	26.500.000
	Advokasi Keadilan Restoratif	30.000.000
	Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	75.000.000
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	60.000.000
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)	10.000.000
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	5.000.000
	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG	35.000.000
	Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak	10.000.000
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	114.000.000
	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking	4.000.000
	Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak	10.000.000
	Penyusunan Kebijakan tentang Perlindungan Anak	100.000.000
4.	Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	169.500.000
	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan forum anak	4.000.000
	pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)	10.000.000
	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi	55.500.000
	Fasilitasi Peningkatan Peran serta Organisasi Wanita	100.000.000
	Total	475.000.000

C. Bidang Pangan

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini ada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun demikian masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan pola pertanian terpadu dengan berbasis pada teknologi. Hal tersebut mengingat potensi pertanian di Kabupaten Klaten cukup besar.

Dengan demikian kedaulatan pangan menjadi isu penting dalam pembangunan Kabupaten Klaten ke depan, melalui kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode dan ramah lingkungan, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan bagi petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan.

Kedaulatan pangan di Kabupaten Klaten diwujudkan dalam 4 (empat) pilar, yaitu :

- a. Regulasi terkait lahan pertanian berkelanjutan
- b. Pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi dan kearifan lokal;
- c. Menciptakan lumbung-lumbung pangan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pangan dan harga di Kabupaten Klaten.; dan
- d. Mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 dengan produksi padi sawah 380.268 ton per tahun (Gabah Kering Panen), produksi

jagung 90.343 ton (tongkol), dan produksi kedelai sebanyak 4.440 ton (Kedelai Kering Panen). Adapun jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2016 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2016

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus/ Minus (Ton)	Konsumsi per kapita (kg/kap/th)	Faktor Konversi (100-angka susut)
1	Padi sawah	426,028	244,539	108,439	136,100	83.93	*)
2	Jagung	72,583	64,599	4,238	60,361	3.28	89.00%
3	Kedelai	2,759	2,612	29,729	-27,118	23.01	94.66%
4	Kacang tanah	1,784	1,543	711	832	0.55	86.49%
5	Kacang Hijau	260	242	271	-30	0.21	93.00%
6	Ubi Kayu	32,224	30,893	11,047	19,846	8.55	95.87%
7	Ubi Jalar	356	313	2,481	-2,167	1.92	88.00%
8	Daging	1,099	1,088,342	16,162	-15,073,658	1.97	99,02%
9	Gula	5,041,545	4,789,468	15,692	-10,902,532	10.68	95,00%
10	Telur	9,167,179	8,979,252	5,877	3,102,252	4.0	97,95%
11	Susu	3,198,765	2,696,599	5,231	-2,534,401	3.56	84,31%
12	Ikan	22,550,802	21,874,278	13,664	8,210,278	10.96	97,00%

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2017

Dari Tabel 2.14 di atas diketahui bahwa untuk data pada tahun 2016 ketersediaan beras mencapai 244.539 ton yang berasal dari produksi padi sawah 380.268 ton per tahun (Gabah Kering Panen), sedangkan untuk kebutuhan beras 108.439 ton sehingga masih surplus beras 136.100 ton. Ketersediaan beras dan surplus beras pada tahun 2016 ini.

Tabel 2.15 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2013 - 2017

Kelompok Pangan	2013	2014	2015	2016	2017
1. Padi-padian	16.5	16.7	18.8	20.2	20.8
2. Umbi-umbian	2.5	2.5	2.1	1.2	1.4
3. Pangan Hewani	24.0	24.0	24.0	24	24
4. Minyak dan Lemak	5.0	5.0	4.3	3.8	3,7
5. Buah/Biji Berminyak	1.0	1.0	0.3	0.5	0.7
6. Kacang-kacangan	10.0	10.0	10.0	10	10.0
7. Gula	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9
8. Sayur dan Buah	30.0	30.0	30.0	30	30.0
9. Lain-lain	0.0	0.0	0.0	0	0
Total	91.5	91.7	91.4	91.6	92,5

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan Kabupaten Klaten, 2017

Dari Tabel 2.15 tersebut di atas terlihat bahwa Skor Pola Harapan Pangan terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun belum signifikan. Pada tahun 2013 sebesar 91,5 dan tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 92,5. Masih rendahnya tingkat pendapatan dikarenakan dengan ketersediaan lapangan kerja yang masih terbatas, sedangkan jumlah angkatan kerja meningkat.

Tabel 2.16 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sampai dengan tahun 2017

No	Nama Gapoktan	Desa	Kecamatan
1	Krida Tani	Bowan	Delanggu
2	Agawe Santoso	Jimbung	Kalikotes
3	Karya Bumi	Jurang Jero	Karanganom
4	Tani Bahagia	Sribit	Delanggu
5	Konco Tani	Kemiri	Tulung
6	Ngudi Makmur	Senden	Ngawen
7	Towangsan Makmur	Towangsan	Gantiwarno
8	Kerto Raharjo	Ngemplak	Kalikotes
9	Sri Mulih	Cokro	Tulung

No	Nama Gapoktan	Desa	Kecamatan
10	Sumber Untung	Sidowarno	Wonosari
11	Tani Manunggal	Babadan	Karangdowo
12	Sidowayah	Sidowayah	Polanharjo
13	Tani Makmur	Kepanjen	Delanggu
14	Tani Mulyo	Kajen	Ceper
15	Tirto Mulyo	Kujon	Ceper
16	Tunas Makmur	Demangan	Karangdowo

Sumber data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2017

Sampai dengan tahun 2017 Kabupaten Klaten memiliki 389 Gapoktan, tetapi berdasarkan table tersebut di atas terlihat bahwa baru terdapat 16 Gapoktan yang telah mendapatkan kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), sehingga masih banyak Gapoktan yang perlu mendapatkan penguatan sebagai Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Tabel 2.17 Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2013-2017

No	Tahun	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kelompok
1	2013	26	14	26
2	2014	37	24	37
3	2015	29	15	29
4	2016	20	14	20
5	2017	22	13	22
	Jumlah	132	80	132

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, Tahun 2018

Dari tabel 2.18 dapat dilihat bahwa lokasi pemanfaatan lahan pekarangan/rumah pangan lestari mengalami perkembangan yang fluktuatif, walaupun jika dibandingkan pada tahun 2014 di tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Sampai dengan tahun 2017 ini baru tersebar di 132 kelompok di 132 desa/kelurahan dari 401 desa/kelurahan yang ada. Namun demikian program tersebut tetap berjalan dan dikembangkan di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten.

D. Bidang Kelautan dan Perikanan

Daya dukung dan melimpahnya air mendorong petani dan masyarakat setempat memanfaatkan potensi air untuk berbudidaya ikan di sawah dan kolam. Gambaran Produksi Ikan dan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.18

Tabel 2.18 Produksi dan Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2013 - 2017

No.	Tahun	Produksi Benih (ekor)	Produksi Ikan (Kg)	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)
1.	2013	90.915.000	19.257.599	12,92
2.	2014	78.511.000	25.624.538	13,06
3.	2015	119.057.900	27.344.097	15,14
4.	2016	133.000.780	28.316.544	17,78
5.	2017	131.106.900	25.029.969	18,49

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Dari Tabel 2.18 dapat dilihat pada tersebut di atas dapat disampaikan bahwa produksi benih ikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif, hanya sedikit penurunan di tahun

2017. Benih tersebut kebanyakan dihasilkan dari Unit Perkolaman Rakyat (UPR) dan Unit Benih Ikan (UBI). Sedangkan untuk produksi ikan juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi dan hanya mengalami penurunan di tahun 2017. Hal ini disebabkan disamping adanya penurunan ketersediaan benih ikan juga terus naiknya harga pakan ikan dan menurunnya jumlah populasi budidaya ikan air tawar.

Produksi ikan dalam daerah yang dihasilkan pada Kawasan Minapolitan (Kecamatan Karangnom, Tulung, Polanharjo, Ngawen, Klaten Selatan dan Kebonarum) maupun diluar Kawasan Minapolitan didominasi oleh jenis ikan Nila dan Lele. Untuk belut, produksi dalam daerah belum mencukupi, setiap tahun masih mendatangkan dari luar daerah khususnya dari daerah Jawa Timur. Produksi perikanan ini terkait erat dengan pola atau tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten. Untuk memahami tingkat konsumsi ikan dapat diturunkan dari jumlah produksi ikan (kg) sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.18 dibagi dengan kapita setiap tahun.

Untuk perkembangan tingkat konsumsi ikan sebagaimana tabel tersebut diatas setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 12,92 Kg per kapita per tahun meningkat menjadi 18,49 Kg per kapita per tahun. Pencapaian tersebut masih jauh dari target nasional yang sebesar 47 Kg per kapita per tahun.

E. Bidang Transmigrasi

Kepadatan penduduk yang semakin besar serta daya dukung dari sektor ekonomi tidak memungkinkan untuk tetap meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang merantau, pilihan lain bertransmigrasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama 3 (tiga) tahun terakhir ada 5 (lima) pulau yang menjadi tujuan transmigrasi yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Namun, dalam kurun waktu dari Tahun 2013-2017 tujuan transmigrasi masyarakat yang tercatat di dalam dokumen transmigrasi hanya pada tujuan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Pada tahun 2017 terjadi penurunan angka pemberangkatan transmigrasi karena dipengaruhi oleh kondisi beberapa transmigran pada tahun sebelumnya yang kembali ke kampung halaman. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 2.19

Tabel 2.19 Realisasi Pemberangkatan Transmigrasi PIR, Umum Menurut Kecamatan dan Daerah Yang Dituju di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Sumatera		Kalimantan	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	8	26	307	1.198
2014	16	52	614	2.396
2015	32	104	1.228	4.792
2016	64	208	2.456	9.584
2017	4	13	-	-
Jumlah	124	403	4.605	17.970

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan jumlah organisasi kepemudaan mengalami peningkatan, sedangkan kegiatan keolahragaan dan jumlah organisasi olahraga relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga masih kurang. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo. Jumlah perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 2.20

Tabel 2.20 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun 2013-2017				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	21	31	31	31	31
2.	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	26	26	26	29	29
4.	Jml Organisasi Olahraga	Organisasi	8	8	8	35	35

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

Lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar secara organisasi bisa berjalan namun kualitas dan kapasitasnya masih rendah, sehingga masih perlu adanya pembinaan secara simultan oleh pihak-pihak yang terkait.

B. Bidang Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel 2.21

Tabel 2.21 Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun 2013-2017				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Budaya	kegiatan	52	52	52	52	52
2	Jumlah sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya	Tempat	12	12	12	12	12

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

Dengan banyaknya keaneka ragaman seni budaya adat lokal yang lahir sejak zaman nenek moyang dan berproses turun menurun, kemudian

berpadu dengan munculnya seni budaya barulainnya merupakan wujud kekayaan aset seni dan budaya di Kabupaten Klaten. Sejumlah festival seni dan budaya digelar di Kabupaten Klaten, namun masih dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang relatif sangat terbatas, hal ini bisa berakibat pada rapuhnya ketahanan budaya di Kabupaten Klaten.

Promosi, Pengembangan dan pembinaan terhadap seni budaya daerah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten, yaitu dengan pengiriman tim kesenian Kabupaten ke TMII, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain; pagelaran wayang kulit, pentas seni dan festival seni budaya; Pembinaan seni budaya daerah dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten untuk pembelian sarana dan prasana kesenian. Namun kegiatan promosi, pengembangan dan pembinaan tersebut baru dilakukan kepada kelompok seni budaya yang masih sangat terbatas jumlahnya, belum menyentuh pada keseluruhan dari kelompok seni budaya yang ada di Kabupaten Klaten. Sehingga kegiatan promosi, pengembangan dan pembinaan kepada kelompok seni budaya di Kabupaten Klaten masih perlu terus ditingkatkan.

Kabupaten Klaten memiliki kekayaan budaya daerah yang mendesak perlu perlindungan dan pelestarian, dan akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual). Kekayaan budaya daerah yang akan didaftarkan tersebut adalah:

- a. Lurik ATBM
- b. Tari Lurik Payung
- c. Tari Lurik Asri

Namun sampai dengan tahun 2017 belum ada kekayaan seni budaya di Kabupaten Klaten yang didaftarkan melalui HAKI.

Terkait dengan pelestarian nilai luhur, bahasa dan sastra yang semakin melemah, maka Kabupaten Klaten menaruh perhatian cukup serius dalam pemasyarakatan kembali penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten.

2. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten relatif tidak ada perubahan, sebagai informasi, Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22 Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun 2013-2017				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	Jumlah	4	4	4	4	4
3	Pemandangan Alam	buah	2	2	2	2	2

No	Uraian	Satuan	Tahun 2013-2017				
			2013	2014	2015	2016	2017
4	Museum	buah	1	1	1	1	1

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

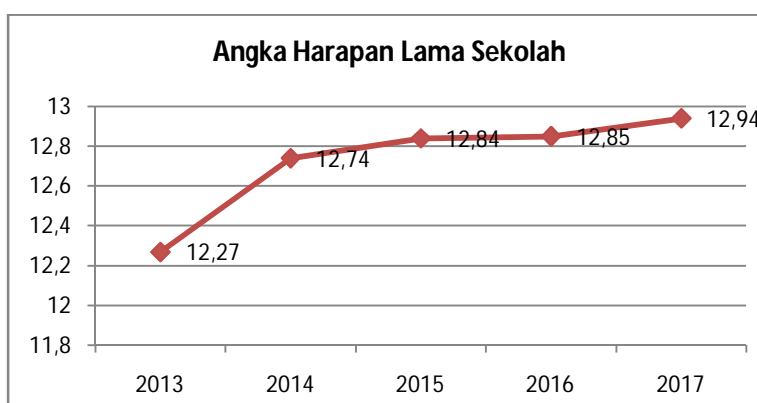
2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Pelayanan Dasar

A. Bidang Pendidikan

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.8 bahwa Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017, yaitu dari sebesar 12,12 pada tahun 2013 menjadi sebesar 12,27 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka harapan lama sekolah dapat dilihat pada gambar 2.11

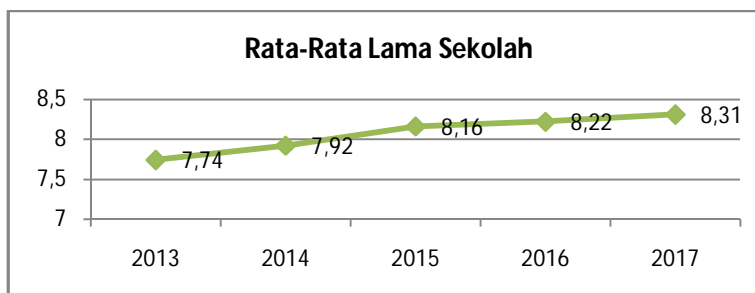


Gambar 2.11 Perkembangan Angka Harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2018

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.9 bahwa perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Dari 7,74 pada tahun 2013 naik menjadi 8,31 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dari tahun 2013-2017 semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Gambaran perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.12



Gambar 2.12 Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2018

3. Jumlah Anak Umur 0-6 tahun yang mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Salah satu upaya perluasan dan pemerataan pelayanan akses pendidikan adalah dilakukannya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia dini (*umur 0-6 tahun*) yang dilakukan melalui penyelenggaraan PAUD yang bertujuan untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Adapun perkembangan akses dan partisipasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten tahun 2017

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	p		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PAUD		1,428				
1	Satuan PAUD sejenis	122	1,364	1,502	2,866	338
2	Taman Penitipan Anak	32	383	331	714	98
3	Kelompok Bermain	402	4,331	4,551	8,882	1,234
4	RA/ BA	345	6,902	6,568	13,470	867
5	TK	527	8,871	8,464	17,335	1,594

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan data Tabel 2.23 tersebut di atas, dapat diketahui beberapa hal yang perlu diantisipasi terhadap penyelenggaraan PAUD kedepan, diantaranya:

- a. Rasio ketersediaan Sekolah terhadap penduduk anak usia sekolah pada jenjang PAUD sebesar 0,025 (*dengan catatan jumlah lembaga PAUD ada 1.428 lembaga dan jumlah anak usia 4-6 tahun pada tahun 2017 sebanyak 43.267 anak*) dengan jumlah guru sebanyak 4.131 guru.
- b. Rasio siswa per sekolah (R-S/Sek) sebesar 30,30
- c. Rasio murid terhadap guru sebesar 10,78

Sedangkan angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) cenderung bersifat fluktuatif, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan anak usia dini sebenarnya menjadi budaya dan kebutuhan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan, dan seiring dengan munculnya kebijakan pendidikan non formal bagi pengembangan Anak Usia Dini (PAUD). Sebagai gambaran Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.24

Tabel 2.24 Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
APK PAUD	55,73	58,32	92,19	92,37	78,61

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Gambaran selengkapnya Penyebaran Angka Partisipasi Kasar PAUD, Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Angka Partisipasi Kasar PAUD, Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun	APK PAUD	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prambanan	1,995	2,170	91.94	50	209
Gantiwarno	1,130	1,626	69.50	47	134
Wedi	2,117	2,015	105.06	51	194
Bayat	1,966	2,705	72.68	63	191
Cawas	1,618	2,188	73.95	62	195
Trucuk	1,974	3,408	57.92	72	185
Kalikotes	1,058	850	124.47	30	80
Kebonarum	784	2,338	33.53	28	117
Jogonalan	1,563	2,019	77.41	65	173
Manisrenggo	1,666	1,474	113.03	51	149
Karangnongko	1,027	2,811	36.54	53	108
Ngawen	1,109	1,993	55.64	45	83
Ceper	1,588	1,715	92.59	83	185
Pedan	1,944	2,603	74.68	56	164
Karangdowo	1,176	2,902	40.52	47	111
Juwiring	2,171	1,838	118.12	63	171
Wonosari	1,600	1,810	88.40	64	189
Delanggu	1,906	2,094	91.02	47	185
Polanharjo	1,238	2,482	49.88	50	123
Karanganom	2,100	2,830	74.20	72	191
Tulung	1,717	1,747	98.28	57	136
Jatinom	2,273	2,091	108.70	65	173
Kemalang	1,118	1,589	70.36	37	100
Klaten Selatan	1,531	2,140	71.54	51	162
Klaten Tengah	2,688	1,785	150.59	58	218
Klaten Utara	2,210	1,819	121.50	61	205
Jumlah 2017	43,267	55,042	78.61	1,428	4,131

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2013 sudah mencapai 108,10% namun turun menjadi 97,45% pada tahun 2017, hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A ingin sekolah di luar daerah yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya, juga dikarenakan proporsi penduduk anak usia sekolah jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A mengalami penurunan.

Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 90,35% pada tahun 2013 menjadi 90,93% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B meningkat dikarenakan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga ditunjang angka melanjutkan dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat.

Untuk jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C pada tahun 2013 mencapai 65,07%, meningkat menjadi 81,00% pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan anak usia SMA/SMK/MA/SMALB/PaketC disamping semakin baiknya peningkatan layanan pendidikan. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.26.

Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

No	Tahun	SD/ MI/ SDLB/ Paket A	SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	SMA/ MA/ SMK/ SMALB/ Paket C
1	2013	108.20	90.35	65.07
2	2014	92.27	87.26	68.69
3	2015	94.53	87.58	93.06
4	2016	105.23	97.57	81.00
5	2017	97.45	90.93	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten untuk semua Jenjang Pendidikan terutama di daerah perbatasan dan pedesaan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan, oleh karena itu perlu adanya pemerataan mutu dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di semua tingkatan perlu mendapat perhatian agar penyelenggaraan pendidikan tidak terkonsentrasi di sekolah-sekolah unggulan dan perkotaan.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A mengalami penurunan, pada tahun 2013 sudah mencapai 92,84% turun menjadi 86,84% pada tahun 2017. Kondisi ini disebabkan karena adanya anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A ingin bersekolah di luar daerah yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya, juga dikarenakan proporsi penduduk anak usia sekolah jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A mengalami penurunan.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Sekolah Menengah jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B cenderung bersifat fluktuatif, pada tahun 2013 sudah mencapai 64,61% meningkat menjadi 72,77%, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 68,22%, hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B ingin bersekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C perkembangannya pada tahun 2013-2016

mengalami peningkatan, pada tahun 2013 mencapai 42,75% meningkat menjadi 54,41% pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan anak usia SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C disamping semakin baiknya peningkatan layanan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C. Secara lengkap perkembangan APM di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.27

Tabel 2.27 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

No	Tahun	SD/ MI/ SDLB/ Paket A	SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	SMA/ MA/ SMK/ SMALB/ Paket C
1	2013	92.84	64.61	42.75
2	2014	79.13	62.48	44.08
3	2015	81.60	63.94	60.46
4	2016	91.26	72.77	54.41
5	2017	86.84	68.22	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua Jenjang Pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

6. Angka Putus Sekolah

Selama kurun waktu tahun tahun 2013-2017 angka putus sekolah semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya dana alokasi khusus bidang pendidikan, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Sebagai gambaran perkembangan persentase angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28. Perkembangan Prosentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/ MI						
1) Dalam Jumlah	Kasus	32	31	27	33	44
2) Dalam Persentase	%	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/ MTs						
1) Dalam Jumlah	Kasus	81	36	56	43	92
2) Dalam Persentase	%	0.16	0.07	0.10	0.08	0.23
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/ MA/ SMK						
1) Dalam Jumlah	Kasus	374	285	295	283	
2) Dalam Persentase	%	0.92	2.12	0.73	0.69	

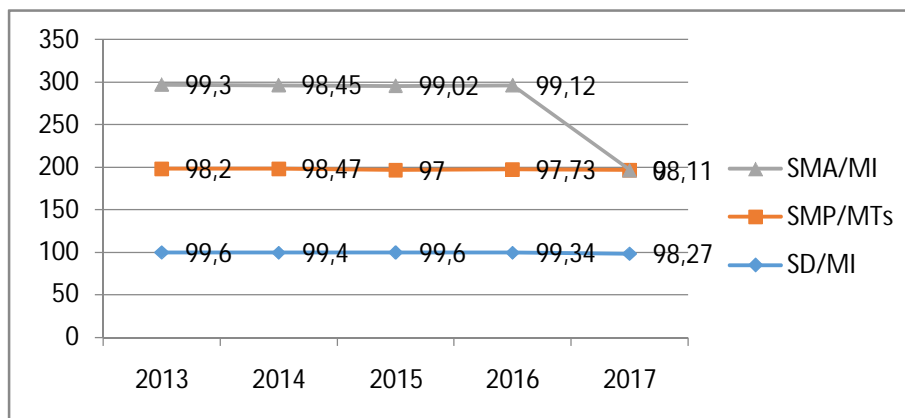
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

NB : Untuk data jenjang SMA/ MA/ SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis administrasi sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 2.28 di atas, perkembangan angka putus sekolah, untuk jenjang pendidikan SMK terutama di SMK swasta, mengindikasikan bahwa kualitas lembaga yang bersangkutan hanya dapat memperoleh siswa yang kurang berprestasi, disamping layanan pendidikan kejuruan belum bisa memberi jaminan kebutuhan lapangan kerja. Dipihak lain, anak usia sekolah jenjang pendidikan SMA/MA/SMK lebih ingin cepat bekerja di sektor non formal (pekerja/tukang perumahan) daripada sekolah formal berlama-lama.

7. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif, dan gambaran selengkapnya perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.13 dan Tabel 2.29.



Gambar 2.13 Angka Kelulusan (AL)
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Tabel 2.29 Perkembangan Persentase Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Uraian	Satuan	Tahun	
		2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	99.34	98.27
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	97.73	98.11
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK	%	99.12	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2018

Berdasarkan data pada Tabel 2.29 di atas, angka kelulusan jenjang SD/MI pada dua tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2016 mencapai 99,34 namun menurun menjadi 98,27 pada tahun 2017. Akan tetapi untuk kelulusan jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 97,73% naik menjadi 98,11% pada tahun 2017 dan untuk jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 99,02% pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar 99,12%.

8. Pendidikan Non Formal

Selain menempuh pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan, dalam rangka menunjang kecakapan hidup upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten adalah dengan menyelenggarakan pendidikan non formal. Adapun data pendidikan non formal di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.30

Tabel 2.30 Perkembangan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Klaten Tahun 2017

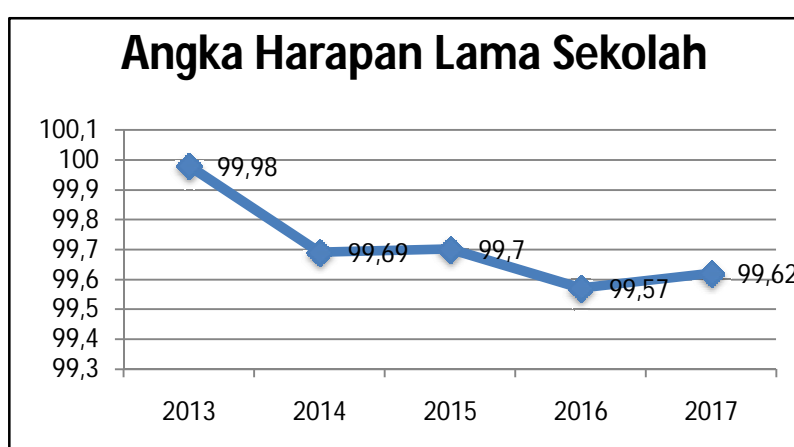
No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kejar Paket A	3	16	37	53	7
2	Kejar Paket B	6	98	85	183	31
3	Kejar Paket C	9	148	131	279	64

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

9. Pendidikan Keaksaraan & Perkembangan Capaian Keaksaraan Kabupaten Klaten

Indikator keberhasilan pembangunan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 tahun ke atas. Beberapa langkah nyata telah ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 tahun ke atas dirumuskan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat disajikan pada Gambar 2.14



Gambar 2.14 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Berdasarkan Gambar 2.14 sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun sudah berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, maupun nasional. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klaten sudah lebih maju dibanding rerata kabupaten/kota lainnya yang berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional.

10. Akses dan Partisipasi Program Keaksaraan

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dalam menangani pendidikan keaksaraan adalah sebagaimana Tabel 2.31.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dalam menangani pendidikan keaksaraan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.31 Perkembangan Penanganan Pendidikan Keaksaraan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	Keaksaraan Fungsional (KF)	95	-	1.200	1.200	91
	Taman bacaan Masyarakat	33	434	753	1.187	32
2014	Keaksaraan Fungsional (KF)	116	129	1.510	1.639	128
	Taman Bacaan Masyarakat	42	985	1.351	2.336	44
2015	Keaksaraan Fungsional (KF)	77	75	1.036	1.111	87
	Taman Bacaan Masyarakat	33	230	200	430	33

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	Keaksaraan Fungsional (KF)	88	18	818	836	95
	Taman Bacaan Masyarakat	22	466	690	1.156	-
2017	Keaksaraan Fungsional (KF)	53	10	607	617	67
	Taman Bacaan Masyarakat	13	240	327	567	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2018

11. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya dana tunjangan profesi guru yang sudah memiliki sertifikat profesi, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitasnya. Sebagai gambaran perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	63.53	72.32	79.09	81.99	84.16
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	89.54	90.70	92.09	91.51	60.33
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK	%	95.10	96.11	96.71	97.06	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Keterangan: Untuk data jenjang SMA/ MA/ SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis pengelolaan administrasi sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Perkembangan jenjang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan, dari 63,53% tahun 2013 menjadi 84,16% pada tahun 2017. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs perkembangan bersifat fluktuatif, dan pada tahun terakhir (2017) mengalami penurunan sangat tajam.

Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2011-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.33

Tabel 2.33 Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2017

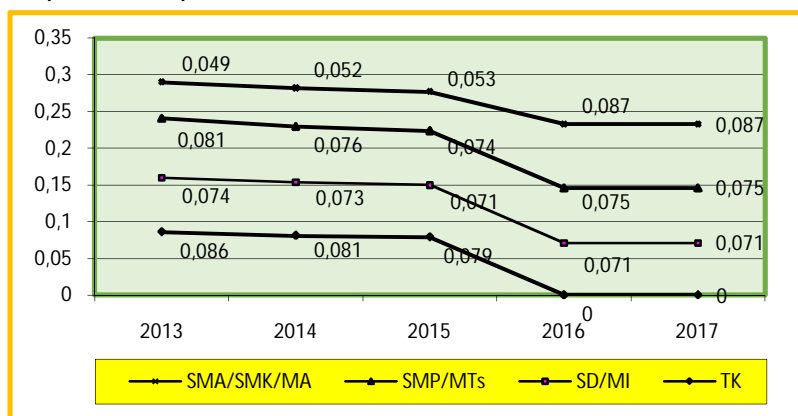
Uraian	Satuan	Tahun 2013-2017				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/MI	Orang	713	713	713	713	713
Jenjang Pendidikan SMP/MTS	Orang	81	81	81	81	81

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.33 tersebut di atas, Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS yang telah memenuhi kulaifikasi S1/D4 standar sistem Pendidikan Nasional. Kepala Sekolah masing-masing telah tercapai 100%. Hal ini menandakan bahwa tingkat mutu guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

12. Rasio Murid terhadap Guru

Rasio murid dan guru menunjukkan perbandingan antara guru dan murid per 10.000 mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar. Kondisi di Kabupaten Klaten dari semua jenjang pendidikan pada Tahun 2013-2017 cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena banyak guru yang pensiun, serta formasi pengadaan guru baru tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga pendidikan yang dibutuhkan. Adapun gambaran selengkapnya Rasio Murid dan Guru di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.15



Gambar 2.15. Rasio Murid dan Guru Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Tabel 2.34 Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	31	3,718	249	120	8	15
2	Gantiwarno	23	2,595	208	113	9	12
3	Wedi	28	3,681	254	131	9	14
4	Bayat	34	3,681	288	108	8	13
5	Cawas	39	3,596	361	92	9	10
6	Trucuk	39	4,586	312	118	8	15
7	Kalikotes	21	2,593	188	123	9	14
8	Kebonarum	11	1,011	97	92	9	10
9	Jogonalan	26	4,259	243	164	9	18
10	Manisrenggo	28	3,034	219	108	8	14
11	Karangnongko	25	2,611	186	104	7	14
12	Ngawen	23	2,628	203	114	9	13
13	Ceper	30	3,945	262	132	9	15
14	Pedan	24	3,189	235	133	10	14
15	Karangdowo	30	2,435	212	81	7	11
16	Juwiring	33	3,564	300	108	9	12
17	Wonosari	38	4,469	321	118	8	14
18	Delanggu	25	3,461	236	138	9	15
19	Polanharjo	28	2,350	230	84	8	10
20	Karanganom	26	2,382	200	92	8	12
21	Tulung	29	2,536	235	87	8	11
22	Jatinom	35	4,693	319	134	9	15
23	Kemalang	25	3,004	199	120	8	15
24	Klaten Selatan	20	2,579	193	129	10	13
25	Klaten Tengah	20	4,068	218	203	11	19
26	Klaten Utara	14	2,997	156	214	11	19
Jumlah	2017	705	83,665	6,124	119	9	0,071
	2016	710	85,849	6,258	124	9	0,071
	2015	716	87,698	6,322	125	9	0,071
	2014	727	90,413	6,469	127	9	0,073
	2013	741	92,818	6,777	129	9	0,074

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Tabel 2.35 Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	2	480	31	240	16	15
2	Gantiwarno	2	448	29	224	15	15
3	Wedi	7	1,753	98	250	14	18
4	Bayat	3	597	38	199	13	16
5	Cawas	3	990	79	330	26	13
6	Trucuk	2	268	25	134	13	11
7	Kalikotes	-	-	-	-	-	-
8	Kebonarum	1	244	21	244	21	12
9	Jogonalan	2	315	29	158	15	11
10	Manisrenggo	1	65	7	65	7	9
11	Karangnongko	-	-	-	-	-	-
12	Ngawen	1	415	22	415	22	19
13	Ceper	3	301	26	100	9	12
14	Pedan	2	573	40	287	20	14
15	Karangdowo	2	112	16	56	8	7
16	Juwiring	4	502	59	126	15	9
17	Wonosari	3	356	31	119	10	11
18	Delanggu	5	1,573	89	315	18	18
19	Polanharjo	1	166	12	166	12	14
20	Karanganom	3	656	62	219	21	11
21	Tulung	1	319	28	319	28	11
22	Jatinom	2	606	39	303	20	16
23	Kemalang	-	-	-	-	-	-
24	Klaten Selatan	2	186	15	93	8	12
25	Klaten Tengah	10	2,699	156	270	16	17
26	Klaten Utara	4	1,355	79	339	20	17
	Jumlah						
	2017	66	14,979	1,031	227	16	15
	2016	65	14,280	973	188	13	12
	2015	57	13,015	883	191	14	11
	2014	53	11,437	789	177	13	11
	2013	53	10,364	750	154	12	10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Tabel 2.36 Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	2	1155	77	578	39	15
2	Gantiwarno	3	1720	106	573	35	16
3	Wedi	2	1574	87	787	44	18
4	Bayat	3	1624	118	541	39	14
5	Cawas	3	1378	113	459	38	12
6	Trucuk	3	1602	106	534	35	15
7	Kalikotes	1	867	42	867	42	21
8	Kebonarum	1	655	39	655	39	17
9	Jogonalan	2	1408	83	704	42	17
10	Manisrenggo	3	1883	111	628	37	17
11	Karangnongko	2	1102	68	551	34	16
12	Ngawen	1	751	38	751	38	20
13	Ceper	3	1662	116	554	39	14
14	Pedan	3	1958	118	653	39	17
15	Karangdowo	3	2109	117	703	39	18
16	Juwiring	2	1238	80	619	40	15
17	Wonosari	2	1532	93	766	47	16
18	Delanggu	4	2536	159	634	40	16
19	Polanharjo	3	1229	92	410	31	13
20	Karanganom	4	1965	131	491	33	15
21	Tulung	3	1461	99	487	33	15
22	Jatinom	3	1890	110	630	37	17
23	Kemalang	2	873	67	437	34	13
24	Klaten Selatan	1	694	44	694	44	16
25	Klaten Tengah	3	2435	136	812	45	18

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	Klaten Utara	3	2626	158	875	53	17
Jumlah	2017	65	39,927	2,508	614	39	16
	2016	65	40,672	2,721	640	42	15
	2015	65	40,927	2,740	637	42	15
	2014	65	40,441	2,777	633	43	15
	2013	65	39,354	2,842	616	44	14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

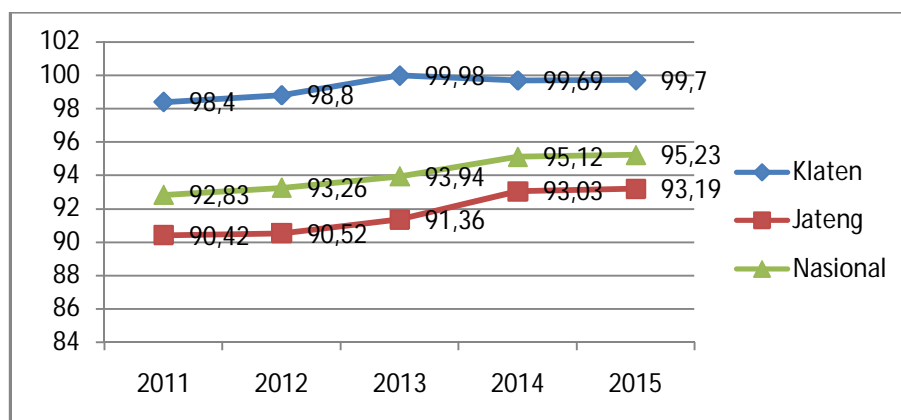
Tabel 2.37 Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	1	212	12	212	12	18
2	Gantiwarno	2	146	12	73	6	12
3	Wedi	3	386	27	129	9	14
4	Bayat	2	377	24	189	12	16
5	Cawas	3	265	18	88	6	15
6	Trucuk	4	139	27	35	7	5
7	Kalikotes	-	-	-	-	-	-
8	Kebonarum	-	-	-	-	-	-
9	Jogonalan	1	138	17	138	17	8
10	Manisrenggo	1	66	7	66	7	9
11	Karangnongko	1	21	4	21	4	5
12	Ngawen	3	490	35	163	12	14
13	Ceper	-	-	-	-	-	-
14	Pedan	1	33	2	33	2	17
15	Karangdowo	1	47	5	47	5	9
16	Juwiring	2	186	17	93	9	11
17	Wonosari	2	61	14	31	7	4
18	Delanggu	4	304	27	76	7	11
19	Polanharjo	-	-	-	-	-	-
20	Karanganom	2	173	14	87	7	12
21	Tulung	1	67	6	67	6	11
22	Jatinom	2	268	17	134	9	16
23	Kemalang	2	72	14	36	7	5
24	Klaten Selatan	2	559	38	280	19	15
25	Klaten Tengah	3	379	28	126	9	14
26	Klaten Utara	4	1,242	63	311	16	20
Jumlah	2017	47	5,631	428	120	9	3
	2016	46	4,855	611	106	13	9
	2015	45	5,357	607	99	12	7
	2014	42	5,379	627	105	13	7
	2013	44	5,534	662	108	14	7

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

13. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 tahun ke atas dirumuskan dengan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan komparasi angka melek di Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 2.16 dan Tabel 2.38.



Gambar 2.16 Komparasi Angka Melek di Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017

Tabel 2.38 Komparasi Angka Melek di Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2017

TAHUN	PENDUDUK > 15 TAHUN			BUTA HURUF > 15 TAHUN			MELEK HURUF > 15 TAHUN			ANGKA MELEK HURUF > 15 TAHUN		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
2016	511,774	524,126	1,035,900	888	3,563	4,451	510,886	520,563	1,031,449	99.83	99.32	99.57
2017	503,982	516,308	1,020,290	615	3,299	3,914	503,367	513,009	1,016,376	99.88	99.36	99.62

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2018

Berdasar tabel 2.38 perkembangan angka melek di kabupaten Klaten tahun 2011-2017 mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2013 mencapai 98,4% naik menjadi 99,62% pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan angka melek huruf sangat optimal.

14. Manajemen Pelayanan Pendidikan

Angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2013-2017 ditunjukkan pada Tabel 2.39

Tabel 2.39 Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah Dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	99.30	98.47	99.02	92.43	88.28

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.39 sebagaimana tersebut di atas, Peserta didik di jenjang pendidikan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 perkembangannya bersifat fluktuatif, namun didua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari 92,43 pada tahun 2016 menjadi 88,28 pada tahun 2017.

15. Sarana dan Prasarana Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten.

Data ketersediaan sarana prasarana berupa Gedung, Ruang Kelas Sekolah Negeri menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.40

Tabel 2.40 Gedung, Ruang Kelas Sekolah Negeri Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Gedung Sekolah				Ruang Kelas			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prambanan	31	2			193	31		
2	Gantiwarno	23	3			138	52		
3	Wedi	28	2			173	45		
4	Bayat	34	3			205	56		
5	Cawas	39	3			202	55		
6	Trucuk	39	3			159	52		
7	Kalikotes	21	1			144	21		
8	Kebonarum	11	1			71	9		
9	Jogonalan	26	2			163	44		
10	Manisrenggo	28	3			173	61		
11	Karangnongko	25	2			151	29		
12	Ngawen	23	1			133	24		
13	Ceper	30	3			174	55		
14	Pedan	24	3			100	59		
15	Karangdowo	30	3			125	62		
16	Juwiring	33	2			200	44		
17	Wonosari	38	2			228	36		
18	Delanggu	25	4			171	85		
19	Polanharjo	28	3			169	49		
20	Karanganom	26	4			140	77		
21	Tulung	29	3			152	54		
22	Jatinom	35	3			225	47		
23	Kemalang	25	2			119	36		
24	Klaten Selatan	20	1			128	12		
25	Klaten Tengah	20	3			154	69		
26	Klaten Utara	14	3			108	35		
	Jumlah 2017	705	65	-	-	4,098	1,199	-	-
	2016	710	65	15	11	4,518	1,304	382	320
	2015	716	65	16	11	4,574	1,212	349	288
	2014	727	65	16	11	4,709	1,222	370	250
	2013	741	65	16	11	4,768	1,216	395	261

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Tabel 2.41 Gedung, Ruang Kelas Sekolah Swasta Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Gedung Sekolah				Ruang Kelas			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prambanan	2	1			19	8		
2	Gantiwarno	2	2			21	9		
3	Wedi	7	3			70	29		
4	Bayat	3	2			24	22		
5	Cawas	3	3			35	21		
6	Trucuk	2	4			10	11		
7	Kalikotes	-	-			-	4		
8	Kebonarum	1	-			11	12		
9	Jogonalan	2	1			15	7		
10	Manisrenggo	1	1			6	3		
11	Karangnongko	-	1			-	8		
12	Ngawen	1	3			15	22		
13	Ceper	3	-			22	-		
14	Pedan	2	1			18	4		
15	Karangdowo	2	1			11	4		
16	Juwiring	4	2			22	11		
17	Wonosari	3	2			15	9		
18	Delanggu	5	4			41	14		
19	Polanharjo	1	-			9	-		
20	Karanganom	3	2			13	12		
21	Tulung	1	1			-	4		
22	Jatinom	2	2			24	24		
23	Kemalang	-	2			-	4		
24	Klaten Selatan	2	2			14	32		

No	Kecamatan	Gedung Sekolah				Ruang Kelas			
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	Klaten Tengah	10	3			94	24		
26	Klaten Utara	4	4			48	79		
Jumlah 2017		66	47	-	-	557	377	-	-
	2016	65	46	12	43	682	279	100	635
	2015	57	45	12	44	579	322	97	657
	2014	53	42	13	45	494	292	108	642
	2013	53	44	13	42	467	319	109	630

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Gedung sekolah dan ruang kelas sudah tersedia merata di setiap kecamatan, hal itu dapat dilihat pada kedua tabel di atas. Namun demikian sampai pada tahun 2017 masih terdapat 3 kecamatan yang tidak ada gedung SD swasta dan 4 kecamatan yang tidak ada gedung SLTP swasta. Hal ini tidak begitu menjadi permasalahan yang berarti mengingat pada kecamatan-kecamatan tersebut sudah berdiri gedung SD dan SLTP negeri, selain itu juga mempertimbangkan bahwa pendirian gedung sekolah harus memperhitungkan jumlah murid yang memadai. Untuk jenjang pendidikan SD dengan jumlah murid sedikit tentunya akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan regrouping dalam rangka efisiensi dan perwujudan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Dari gedung yang sudah ada tersebut kondisi ruang kelas maupun induk gedungnya tidak semua dalam kondisi baik dan layak untuk kegiatan belajar mengajar. Terdapat beberapa gedung rusak berat/ringan dan perlu dilakukan rehab atau perbaikan. Gambaran kondisi gedung sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.42

Tabel 2.42 Perkembangan Prosentase ruang kelas Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	71,55	69,67	69,29	73	79
Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	%	89,20	89,61	88,23	89	92

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2018

Tabel di atas menggambarkan perkembangan lima tahun terakhir kondisi ruang kelas gedung sekolah di Kabupaten Klaten. Masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun persentasenya kecil namun tetap harus diperhatikan.

Selain sarana prasarana berupa gedung/ruang kelas dalam rangka mewujudkan peserta didik yang cerdas, kompeten dan berkualitas, dibutuhkan fasilitas pendukung proses belajar mengajar yang memadai, seperti perpustakaan, lapangan olahraga, UKS, laboratorium, tempat ibadah, komputer/laptop, dan sebagainya. Karena hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pendidikan di Kabupaten Klaten. Tabel 2.43 dan tabel 2.44 merupakan data pokok pendidikan yang terkait dengan ketersediaan sarana prasarana pendukung tersebut.

Tabel 2.43 Data Pokok SD/MI Di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Indikator	SD	MI	SD+MI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah			
	a. Negeri	705	3	708
	b. Swasta	66	77	143
2	Siswa Baru Kelas I			
	a. Laki-laki	7,751	1,521	9,272
	b. Perempuan	7,462	1,403	8,865
3	Siswa			
	a. Laki-laki	50,916	7,172	58,088
	b. Perempuan	47,728	6,571	54,299
4	Lulusan	15,388	1,357	16,745
5	Ruang Kelas (Milik)			
	a. Baik	3,116	426	3,542
	b. Rusak Ringan	1,456	154	1,610
	c. Rusak Berat	292	28	320
6	Ruang Kelas Bukan Milik	213	76	289
7	Kelas/Rombel	5,144	2,261	7,405
8	Guru			
	a. Layak Mengajar	5,955	799	6,754
	b. Tidak Layak	1,200	71	1,271
9	Fasilitas			
	a. Perpustakaan	561	42	603
	b. Lapangan Olahraga	427	43	470
	c. UKS	443	39	482
	d. Tempat Ibadah	282	44	326
	e. Toilet	2,980	285	3,265
	f. Air Bersih	771	80	851

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.43 terlihat bahwa belum semua Sekolah Dasar memiliki sarana prasarana (perpustakaan, lapangan olahraga, UKS dan tempat ibadah) yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perpustakaan dari 771 SD memiliki perpustakaan hanya 561, jumlah lapangan olahraga 427, UKS 443 dan tempat ibadah 282, sehingga masih diperlukan penambahan sarana prasarana untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Tabel 2.44. Data Pokok SMP/MTs Di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Indikator	SMP	MTs	SMP+MTs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah			
	a. Negeri	65	8	73
	b. Swasta	47	10	57
2	Siswa Baru Kelas			
	a. Laki-laki	7,729	1,390	9,119
	b. Perempuan	7,220	1,149	8,369
3	Siswa			
	a. Laki-laki	23,535	3,822	27,357
	b. Perempuan	22,023	3,449	25,472
4	Lulusan	13,611	2,465	16,076
5	Ruang Kelas (Milik)			
	a. Baik	345	236	581
	b. Rusak Ringan	1,194	22	1,216
	c. Rusak Berat	37	7	44
6	Ruang Kelas Bukan Milik	10	5	15
7	Kelas/Rombel	1,557	268	1,825
8	Guru			
	a. Layak Mengajar	1,625	466	2,091
	b. Tidak Layak	1,311	64	1,375
9	Fasilitas			
	a. Perpustakaan	105	17	122
	b. Lapangan Olahraga	20	5	25
	c. UKS	95	18	113
	d. Laboratorium	247	29	276
	e. Tempat Ibadah	95	13	108
	f. Toilet	518	136	654
	g. Air Bersih	112	18	130
	h. Listrik	112	18	130

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.44 terlihat bahwa belum semua Sekolah Menengah Pertama memiliki sarana prasarana (perpustakaan, lapangan olahraga, UKS dan tempat ibadah) yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perpustakaan dari 112 SMP yang memiliki perpustakaan hanya 105, jumlah lapangan olahraga 20, UKS 95 dan tempat ibadah 95, sehingga masih diperlukan penambahan sarana prasarana untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

16. Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUS TS)

Pendidikan untuk semua menjadi salah satu tujuan dari SDG's 2016 – 2030. Namun demikian kebijakan Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang selama ini ada belum mampu mengentaskan masalah pendidikan di Kabupaten Klaten. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah di Kabupaten Klaten.

Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUS TS) di Kabupaten Klaten bisa dilihat pada tabel 2.45

Tabel 2.45 Jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUS TS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016

NO.	KECAMATAN	DATA PBDT 2015						DATA TAMBAHAN			GRAND TOTAL		TOTAL
		DATA PBDT 2015			HASIL VALIDASI			L	P	Grand Total	L	P	
		L	P	Grand Total	L	P	Grand Total				(6)+(9)	(7)+(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	BAYAT	310	297	607	244	233	477	37	34	71	281	267	548
2	CEPER	187	172	359	76	90	166	19	16	35	95	106	201
3	DELANGGU	122	102	224	74	56	130	25	14	39	99	70	169
4	CAWAS	231	238	469	209	202	411	11	12	23	220	214	434
5	GANTIWARNO	168	133	301	88	78	166	21	7	28	109	85	194
6	JATINOM	375	386	761	181	197	378	47	32	79	228	229	457
7	JUWIRING	246	244	490	58	74	132	23	11	34	81	85	166
8	KALIKOTES	118	100	218	106	90	196	18	3	21	124	93	217
9	JOGONALAN	231	168	399	117	71	188	75	22	97	192	93	285
10	KARANGANOM	173	187	360	96	90	186	42	10	52	138	100	238
11	KARANGDOWO	186	191	377	138	150	288	31	15	46	169	165	334
12	KARANGNONGKO	226	177	403	138	121	259	16	7	23	154	128	282
13	KEBONARUM	62	55	117	35	28	63	3	4	7	38	32	70
14	KEMALANG	492	423	915	206	145	351	55	30	85	261	175	436
15	KLATEN SELATAN	96	77	173	96	77	173	0	0	0	96	77	173
16	KLATEN TENGAH	100	78	178	88	66	154	23	4	27	111	70	181
17	KLATEN UTARA	94	77	171	68	60	128	22	2	24	90	62	152
18	MANISRENGGO	230	204	434	185	144	329	12	8	20	197	152	349
19	NGAWEN	129	127	256	94	81	175	33	8	41	127	89	216
20	PEDAN	230	203	433	197	153	350	15	5	20	212	158	370
21	POLANHARJO	132	116	248	96	84	180	25	7	32	121	91	212
22	PRAMBANAN	160	169	329	82	102	184	41	10	51	123	112	235
23	TRUCUK	437	352	789	341	262	603	43	12	55	384	274	658
24	TULUNG	184	164	348	114	97	211	41	16	57	155	113	268
25	WEDI	270	217	487	63	41	104	33	15	48	96	56	152
26	WONOSARI	288	276	564	140	118	258	54	24	78	194	142	336
	TOTAL	5477	4933	10410	3330	2910	6240	765	328	1093	4095	3238	7333

Sumber: PBDT TNP2K, 2015

Dari tabel 2.45 dapat dilihat masih sangat banyak Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah di Kabupaten Klaten. Data tersebut diperoleh dari hasil verifikasi analisis data PBDT 2015 untuk anak usia sekolah yang tidak sekolah di tahun 2016. Dan ada kemungkinan besar jumlah tersebut meningkat di tahun 2017, dikarenakan data tersebut di atas hanya memuat data anak rumah tangga miskin yang diverifikasi dan validasi. Sedangkan di

luar anak rumah tangga miskin masih banyak lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah dengan berbagai penyebabnya.

Masih tingginya jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah ini juga ditunjukkan dengan masih banyaknya anak putus sekolah. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah 2.46

Tabel 2.46 Perkembangan Prosentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/ MI						
1) Dalam Jumlah	Kasus	32	31	27	33	44
2) Dalam Persentase	%	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/ MTs						
1) Dalam Jumlah	Kasus	81	36	56	43	92
2) Dalam Persentase	%	0.16	0.07	0.10	0.08	0.23
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/ MA/ SMK						
1) Dalam Jumlah	Kasus	374	285	295	283	
2) Dalam Persentase	%	0.92	2.12	0.73	0.69	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

NB : Untuk data jenjang SMA/ MA/ SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis administrasi sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasar pada tabel 2.46 di atas, terlihat bahwa Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada dua tahun terakhir terjadi kenaikan. Jenjang pendidikan SD/MI dari 33 kasus pada tahun 2016 menjadi 44 kasus pada tahun 2017. Jenjang pendidikan SMP/MTs dari 43 kasus pada tahun 2016 menjadi 92 kasus pada tahun 2017. Sedangkan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK pada dua tahun terakhir mengalami penurunan kasus, dari 295 kasus pada tahun 2015 menjadi 283 kasus pada tahun 2016.

Tabel 2.47 Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Negeri					Swasta				
		SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Prambanan	1	1			2	-	-			-
2	Gantiwarno	-	2			2	-	-			-
3	Wedi	2	4			6	1	-			1
4	Bayat	-	2			2	-	4			4
5	Cawas	1	1			2	-	-			-
6	Trucuk	2	3			5	-	-			-
7	Kalikotes	-	7			7	-	-			-
8	Kebonarum	3	-			3	-	-			-
9	Jogonalan	-	2			2	-	4			4
10	Manisrenggo	1	-			1	-	-			-
11	Karangnongko	3	3			6	-	-			-
12	Ngawen	-	-			-	-	-			-
13	Ceper	2	2			4	-	-			-
14	Pedan	-	-			-	-	-			-
15	Karangdowo	-	4			4	-	3			3
16	Juwiring	7	-			7	-	-			-
17	Wonosari	1	1			2	-	-			-
18	Delanggu	8	-			8	-	-			-
19	Polanharjo	-	1			1	-	-			-
20	Karanganom	1	1			2	-	1			1
21	Tulung	1	2			3	-	2			2
22	Jatinom	2	3			5	-	4			4

No	Kecamatan	Negeri					Swasta				
		SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Kemalang	-	2			2	-	2			2
24	Klaten Selatan	1	2			3	-	1			1
25	Klaten Tengah	-	-			-	-	-			-
26	Klaten Utara	-	5			5	-	21			21
Jumlah 2017		36	48	-	-	84	1	42	-	-	43
2016		27	22	22	69	140	1	13	1	179	194
2015		22	20	24	70	136	-	22	4	186	212
2014		28	19	15	37	99	-	5	4	210	219
2013		56	37	29	69	191	-	22	7	249	278

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

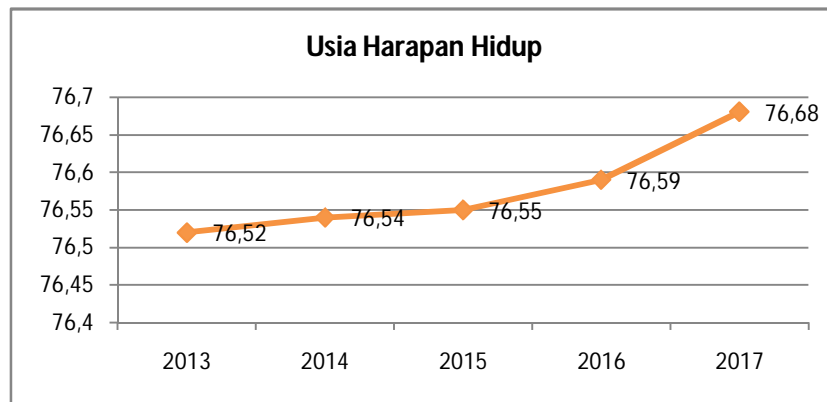
Dari tabel 2.47 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah anak putus sekolah di usia sekolah. Ditunjukkan pada tahun 2016 jumlah anak putus sekolah dari jenjang SD sampai pada tingkat SLTP di sekolah negeri sebanyak 84 anak, sedangkan di jenjang SD sampai tingkat SLTP pada sekolah swasta sebanyak 43 anak. Sedangkan di tahun 2016 jumlah anak putus sekolah pada jenjang SD sampai pada tingkat SLTP di sekolah negeri sebanyak 49 anak, sedangkan di jenjang SD sampai tingkat SLTP pada sekolah swasta sebanyak 14 anak. Dalam hal ini angka anak putus sekolah sampai dengan tingkat SLTP dari tahun terakhir dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan dari 22 anak menjadi 48 anak untuk sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta ada kenaikan dari 13 anak menjadi 42 anak. Untuk jenjang pendidikan SLTA tidak ada data dikarenakan mulai tahun 2017 urusan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Dari kedua tabel tersebut diatas mengindikasikan bahwa anak usia sekolah yang tidak sekolah menjadi salah satu permasalahan yang muncul dalam bidang pendidikan di Kabupaten Klaten dan harus menjadi prioritas untuk segera mendapat intervensi kebijakan maupun program untuk segera dituntaskan.

B. Bidang Kesehatan

1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2013-2017 masyarakat Kabupaten Klaten cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini atau anak usia Bawah Lima Tahun (BALITA). Perkembangan UHH masyarakat di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17 Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2018, diolah

2. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Proporsi puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat didominasi Puskesmas sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Gambaran Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.48

Tabel 2.48 Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017

Tahun	Puskesmas		Puskesmas Keliling		Pustu	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2014	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2015	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2016	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2017	34	0,003	34	0,003	86	0,007

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2018

Puskesmas merupakan prasarana kesehatan umum yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat ini dimaksudkan agar masyarakat terjaga kualitas kesehatannya sehingga masyarakat di wilayah Puskesmas tersebut tetap bisa menjalankan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan Posyandu diharapkan mampu menjadi sarana melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dan simultan. Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

3. Rasio Dokter

Proporsi dokter umum di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 lebih besar dibanding dokter spesialis dan dokter gigi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih didominasi oleh dokter umum sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada

masyarakat. Adapun gambaran Rasio Dokter Per Satuan Penduduk secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	138	0,030	38	0,002	34	0,002
2014	146	0,020	29	0,002	27	0,002
2015	115	0,078	41	0,028	19	0,0128
2016	352	0,237	110	0,074	97	0,0653
2017	507	-	136	-	70	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2018

4. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunisation* (UCI) di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 adalah sama, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada cakupan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sudah lebih baik, adapun gambaran Cakupan Desa/Kelurahan UCI secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.50

Tabel 2.50 Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah desa/kel	Jumlah ds/kel UCI	Cakupan
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	401	401	100 %
2014	401	401	100 %
2015	401	401	100 %
2016	401	401	100 %
2017	401	401	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

5. Tenaga Medis Puskesmas dan sarpras

Tenaga dokter umum di setiap kecamatan rata-rata ada 1 sampai 3 orang dokter merata disetiap kecamatan. Dokter gigi ada 1 orang merata disetiap kecamatan kecuali di kecamatan Klaten Selatan dan Klaten Utara ada 2 orang tenaga dokter gigi. Tenaga bidan rata-rata ada 5 sampai 18 orang disetiap kecamatan. Tenaga Kesehatan Asisten Apoteker, Gizi dan Kesehatan Lingkungan ada 1 sampai 2 orang merata disetiap kecamatan. Sedangkan tenaga medis yang tidak merata disetiap kecamatan adalah tenaga kesehatan Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Terapi Fisik dan Fisio Terapi. Dari data tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan tenaga medis di Kabupaten Klaten terutama di Puskesmas Pembantu. Berikut daftar jumlah tenaga medis menurut Puskesmas dan Kecamatan seperti yang tertera pada tabel 2.51

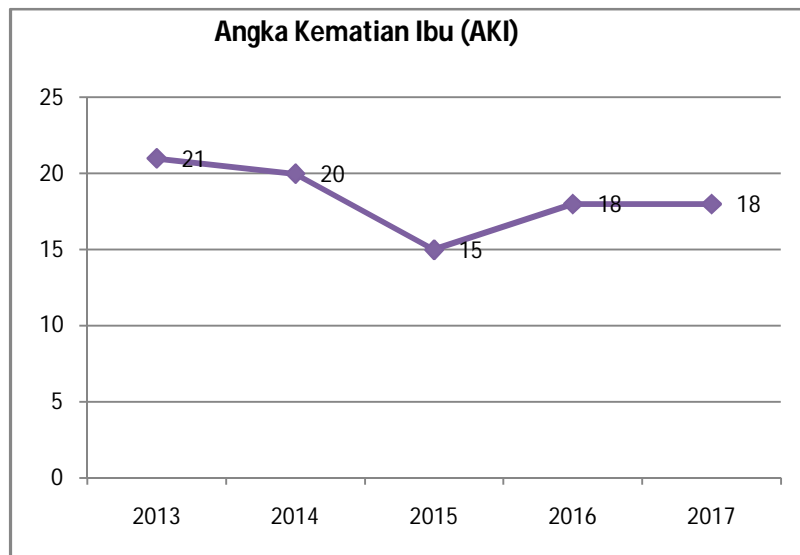
Tabel. 2.51 Jumlah Tenaga Medis Menurut Puskesmas dan Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Kecamatan	Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan		Tenaga Kesehatan						
				PNS	PTT	Kefarmasian (Apoteker)	Kesehatan Masyarakat	Asisten Apoteker	Gizi	Kesehatan Lingkungan	Terapi Fisik	Fisioterapi
Prambanan	Prambanan	3	1	11		-	1	1	1	-		1
	Kebondalem Lor	1	1	11		1	-	1	1	2		-
Gantiwamo	Gantiwamo	2	1	16		-	-	1	-	1		1
Wedi	Wedi	3	1	16		-	1	1	1	2		-
Bayat	Bayat	2	1	15		1	-	1	1	2		1
Cawas	Cawas I	2	1	10		-	-	1	1	1		1
	Cawas II	1	1	6		-	-	1	1	3		-
Trucuk	Trucuk I	2	1	10		1	-	-	1	2		1
	Trucuk II	1	1	11		-	-	1	1	1		-
Kalikotes	Kalikotes	1	1	8		1	-	-	1	1		-
Kebonarum	Kebonarum	1	1	8		-	1	1	1	1		1
Jogonalan	Jogonalan I	2	1	12		-	1	1	1	1		1
	Jogonalan II	1	2	8		-	-	1	1	1		-
Manisrenggo	Manisrenggo	2	1	14		-	1	1	1	1		-
Karangnongko	Karangnongko	1	1	14		-	1	1	1	-		-
Ngawen	Ngawen	1	1	13		-	-	1	1	2		1
Ceper	Ceper	2	1	10		-	1	1	1	1		-
	Jambukulon	1	1	10		-	-	1	1	1		-
Pedan	Pedan	3	1	15		-	-	1	1	1		1
Karandowo	Karandowo	2	1	22		-	-	2	1	1		1
Juwiring	Juwiring	2	1	17		-	-	1	1	2		-
Wonosari	Wonosari I	3	1	8		-	-	2	1	-		1
	Wonosari II	1	1	10		-	-	1	1	1		-
Delanggu	Delanggu	3	1	17		-	-	1	1	-		1
Polanharjo	Polanharjo	1	1	18		-	-	1	1	2		-
Karanganom	Karanganom	3	1	18		-	-	1	1	2		-
	Tulung	1	-	11		-	-	1	2	1		-
Jatinom	Majegan	2	1	9		1	1	-	1	-		-
	Jatinom	3	1	11		-	1	1	2	1		1
Kemalang	Kayumas	1	1	7		-	-	1	-	2		-
	Kemalang	3	1	14		-	-	1	1	2		1
Klaten Selatan	Klaten Selatan	2	2	12		-	1	1	1	-		-
Klaten Tengah	Klaten Tengah	2	1	5		-	-	1	1	2		1
Klaten Utara	Klaten Utara	2	2	8		1	-	1	1	1		2
Jumlah 2017		63	36	405	0	6	10	33	34	41	0	17

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2018

6. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kondisi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun angka kasus kematian ibu yang tinggi berada di kecamatan: Bayat, Juwiring, Ceper dan Jogonalan. Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Gambar 2.18 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2018

Tabel 2.52 Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Prambanan	Prambanan	0	0	2	0	0
		Kebondalem Lor	0	0	0	0	0
2	Gantiwarno	Gantiwarno	0	1	0	0	1
3	Wedi	Wedi	0	0	1	3	0
4	Bayat	Bayat	0	3	1	0	1
5	Cawas	Cawas I	0	1	0	0	2
		Cawas II	0	1	1	0	1
6	Trucuk	Trucuk I	1	1	1	1	1
		Trucuk II	0	1	0	0	1
7	Kalikotes	Kalikotes	1	1	0	1	0
8	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0
9	Jogonalan	Jogonalan I	1	0	2	1	1
		Jogonalan II	1	0	0	0	0
10	Manisrenggo	Manisrenggo	1	0	0	1	0
11	Karangnongko	Karangnongko	0	0	0	0	1
12	Ngawen	Ngawen	1	1	0	0	0
13	Ceper	Ceper	3	1	0	0	2
		Jambukulon	0	2	0	1	0
14	Pedan	Pedan	0	1	1	0	0
15	Karandowo	Karandowo	0	0	0	1	1
16	Juwiring	Juwiring	3	0	0	3	0
17	Wonosari	Wonosari I	2	0	0	0	1
		Wonosari II	0	0	0	1	0
18	Delanggu	Delanggu	2	1	0	1	1
19	Polanharjo	Polanharjo	2	0	1	0	0
20	Karanganom	Karanganom	0	0	1	0	2
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	0
		Majegan	0	0	0	1	0
22	Jatinom	Jatinom	0	1	0	0	0
		Kayumas	0	0	0	1	0
23	Kemalang	Kemalang	0	1	1	0	2
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	2	1	0	0
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	2	1	1	1	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	1	0	1	1	0
Jumlah			21	20	15	18	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.52 diatas bisa dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, perkembangannya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun, dan kasus ini di tahun 2017 jumlahnya sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 18 kasus kematian ibu melahirkan. Hal ini bisa

disebabkan salah satunya karena alur pelayanan di fasilitas kesehatan yang agak panjang, terlebih untuk yang memakai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mana rujukan harus dilakukan ketika ibu yang hendak melahirkan memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih memadai, namun banyak kendala dalam penerapannya. Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat pasien harus mengikuti alur rujukan sesuai aturan dan ini terkadang membuat pasien terlambat ditangani dan masih banyak faktor medis dan non medis lainnya yang menyebabkan angka kematian ibu melahirkan cukup tinggi di Kabupaten Klaten.

7. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Penyebab kematian bayi di samping karena pengaruh ibu dalam kondisi hipertensi dan pendarahan, juga diakibatkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat masih perlu di tingkatkan terutama di wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu melahirkan yang tinggi, seperti kecamatan: Trucuk, Ngawen dan Jogonalan. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.53

Tabel 2.53 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Bayi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Prambanan	Prambanan	3	5	3	2	7
		Kebondalem Lor	3	2	0	1	1
2	Gantiwarno	Gantiwarno	4	12	9	5	2
3	Wedi	Wedi	5	7	7	5	7
4	Bayat	Bayat	7	9	10	15	3
5	Cawas	Cawas I	6	1	5	4	3
		Cawas II	7	4	0	4	1
6	Trucuk	Trucuk I	5	7	13	7	4
		Trucuk II	7	6	5	2	4
7	Kalikotes	Kalikotes	3	3	7	8	2
8	Kebonarum	Kebonarum	1	8	5	6	6
9	Jogonalan	Jogonalan I	2	1	7	6	7
		Jogonalan II	7	3	6	6	1
10	Manisrenggo	Manisrenggo	9	8	12	11	4
11	Karangnongko	Karangnongko	7	6	3	3	5
12	Ngawen	Ngawen	4	6	15	7	4
13	Ceper	Ceper	1	4	4	3	2
		Jambukulon	7	6	5	2	8
14	Pedan	Pedan	10	13	7	12	10
15	Karangdowo	Karangdowo	1	9	5	7	7
16	Juwiring	Juwiring	9	8	11	13	15
17	Wonosari	Wonosari I	1	6	4	6	5
		Wonosari II	1	1	3	2	4
18	Delanggu	Delanggu	1	8	10	10	9
19	Polanharjo	Polanharjo	1	7	5	5	3
20	Karanganom	Karanganom	8	4	8	7	11
21	Tulung	Tulung	3	4	3	9	2
		Majegan	5	3	3	2	1
22	Jatinom	Jatinom	7	6	5	2	2
		Kayumas	1	2	7	1	5
23	Kemalang	Kemalang	7	4	11	9	6
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	1	6	9	10	3

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Bayi				
			2013	2014	2015	2016	2017
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	2	6	5	2	3
26	Klaten Utara	Klaten Utara	4	6	8	3	5
Jumlah			150	191	220	197	162
ANGKA KEMATIAN BAYI DILAPORKAN)			8.5	11.04	12.94	11.69	10.15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

8. Angka Penderita HIV/AIDS

Seiring dengan kemajuan teknologi makin berkembang pula informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Hal ini tidak hanya membawa dampak positif bagi kemajuan masyarakat, namun juga berdampak negatif dari akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut, yaitu dengan munculnya beberapa perilaku menyimpang di masyarakat seperti pergaulan bebas, *free sex* dan lain sebagainya, yang berakibat munculnya penyakit menular HIV/AIDS. Peningkatan persebaran penyakit HIV/AIDS yang cukup tinggi terjadi di kecamatan: Ceper, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Trucuk.

Perkembangan jumlah penderita penyakit HIV/AIDS Di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.54.

Tabel.2.54 Perkembangan Jumlah Penderita AIDS/HIV Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Penderita AIDS/HIV				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Prambanan	Prambanan	3	1	4	2	2
		Kebondalem Lor	1	1	2	1	3
2	Gantiwarno	Gantiwarno	0	5	2	1	2
3	Wedi	Wedi	3	1	5	6	6
4	Bayat	Bayat	2	3	2	4	8
5	Cawas	Cawas I	1	1	1	5	5
		Cawas II	1	2	1	2	1
6	Trucuk	Trucuk I	0	1	4	6	2
		Trucuk II	6	1	8	0	1
7	Kalikotes	Kalikotes	3	5	3	5	7
8	Kebonarum	Kebonarum	1	1	2	1	2
9	Jogonalan	Jogonalan I	0	1	1	3	7
		Jogonalan II	4	2	2	2	2
10	Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	1	2	1
11	Karangnongko	Karangnongko	3	0	1	1	2
12	Ngawen	Ngawen	1	4	8	6	6
13	Ceper	Ceper	6	2	7	8	14
		Jambukulon	1	0	2	5	1
14	Pedan	Pedan	2	3	4	6	4
15	Karangdowo	Karangdowo	0	2	6	2	3
16	Juwiring	Juwiring	1	0	2	8	3
17	Wonosari	Wonosari I	0	0	2	0	2
		Wonosari II	0	2	0	1	1
18	Delanggu	Delanggu	2	1	2	2	5
19	Polanharjo	Polanharjo	0	1	0	1	1
20	Karanganom	Karanganom	3	3	7	4	4
21	Tulung	Tulung	0	0	2	5	1
		Majegan	0	1	2	0	2
22	Jatinom	Jatinom	2	3	2	3	7
		Kayumas	1	0	1	0	0
23	Kemalang	Kemalang	0	2	4	5	1
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	2	6	3	6	5
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	6	5	5	9	8
26	Klaten Utara	Klaten Utara	3	1	2	3	6
Jumlah			58	61	100	115	125

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.54 di atas dapat dilihat perkembangan jumlah penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun di Kabupaten Klaten terjadi peningkatan yang cukup tinggi.

9. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Cakupan dalam pencegahan dan penanganan skrining kesehatan diusia produktif maupun diusia lansia telah optimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, demikian juga terhadap penderita penyakit TBC Paru, BTA di Kabupaten Klaten juga sudah cukup optimal dilakukan, sejak tahun 2011 hingga 2017 sudah mencapai 99%. Dalam cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD selama ini di Kabupaten Klaten telah menunjukkan tingkat yang optimal. Selama periode 2013-2017 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sudah mencapai 100%.

Jumlah kasus penyakit Hipertensi dan Diabetusmilletus dari tahun ke tahun angka kesakitannya mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, hal ini disebabkan banyak hal terutama adalah adanya perubahan perilaku atau gaya hidup dari masyarakat, dimana saat ini masyarakat lebih menyukai hal-hal yang praktis sehingga fasilitas yang tersedia saat ini sangat mendukung keinginan dari masyarakat tersebut. Karena adanya perubahan perilaku tersebut sehingga berdampak kepada peningkatan angka kesakitan Hipertensi dan Diabetusmilletus. Untuk melihat perkembangan kasus penyakit Hipertensi dan Diabetusmilletus maka mulai tahun 2014 yang dilaporkan adalah jumlah kasus baru bukan lagi semua kasus lama dan baru. Sehingga dalam rekapan mulai tahun 2014 jumlah kasus yang dilaporkan angkanya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan.

Jumlah kasus yang ada di Kabupaten Klaten yang dilaporkan lewat Puskesmas dan beberapa RS dari tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.55 Kasus Hipertensi dan Diabetusmilitus yang Terlaporkan lewat Puskesmas Tahun 2013-2017

No	Kasus	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
1	Hipertensi	59.579	45.556	23.670	8.319	71.067	Mulai Tahun 2014 hanya kasus baru yang dilaporkan
2	Diabetusmilletus	13.349	12.170	5.842	1.667	29.811	

TB dan HIV menjadi penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kabupaten Klaten. Angka Prevalensi TB di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan, begitu pula dengan penemuan kasus HIV mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk meningkatkan langkah preventif melalui advokasi, dan pemberian pemahaman bagi masyarakat serta pendampingan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

10. Kasus Gizi Buruk

Kasus Gizi Buruk adalah Jumlah balita yang berat badan dan tinggi badannya (BB/TB) kurang dari standar deviasi.

Tabel 2.56 Jumlah Kasus Gizi Buruk Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kasus Gizi Buruk				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Prambanan	Prambanan	0	2	0	0	1
		Kebondalem Lor	0	0	1	1	0
2	Gantiwarno	Gantiwarno	0	1	1	3	5
3	Wedi	Wedi	0	0	0	0	0
4	Bayat	Bayat	0	0	0	0	0
		Cawas I	0	0	0	0	1
5	Cawas	Cawas II	0	1	1	1	0
		Trucuk I	0	0	1	0	0
6	Trucuk	Trucuk II	0	0	1	1	0
		Kalikotes	3	3	2	3	2
7	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0
9	Jogonalan	Jogonalan I	1	0	2	1	2
		Jogonalan II	2	2	1	0	1
10	Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	1	0	1
11	Karangnongko	Karangnongko	0	1	0	0	0
12	Ngawen	Ngawen	1	0	0	0	0
13	Ceper	Ceper	0	1	0	1	0
		Jambukulon	0	0	0	0	1
14	Pedan	Pedan	2	0	0	0	0
15	Karangdowo	Karangdowo	0	0	0	0	0
16	Juwiring	Juwiring	0	0	0	0	0
17	Wonosari	Wonosari I	0	1	0	0	0
		Wonosari II	0	0	0	0	0
18	Delanggu	Delanggu	0	2	0	0	0
19	Polanharjo	Polanharjo	0	1	0	0	0
20	Karanganom	Karanganom	0	0	0	0	0
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	0
		Majegan	0	0	0	0	0
22	Jatinom	Jatinom	0	0	0	2	0
		Kayumas	1	0	2	0	0
23	Kemalang	Kemalang	0	0	0	0	0
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	1	0	0	0
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	0	0	1	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	0	0	0	1	0
Jumlah Kasus			11	16	13	15	14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan tabel 2.56 diatas, Kondisi jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab balita gizi buruk karena kondisi sosial ekonomi keluarga dan faktor medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus balita gizi buruk yang tinggi.

11. Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Upaya mengubah perilaku masyarakat buang air besar sembarangan menjadi salah satu program prioritas di Kabupaten Klaten. Upaya ini dilakukan dengan menggugah hati dan menyadarkan masyarakat secara terus-menerus untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sekaligus mengajak masyarakat untuk memiliki jamban sehat atau jamban keluarga di rumahnya masing-masing. Melalui kegiatan jambanisasi

Kabupaten Klaten berupaya untuk mewujudkan Desa Open Defecation Free (ODF) atau desa bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Kabupaten Klaten terus berusaha mewujudkan akses masyarakat terhadap jamban sehat mencapai 100%. Berikut capaian Desa ODF Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2017 :

Tabel 2.57 Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	BABS	% Akses Progres	Desa ODF	Desa Belum ODF
CAWAS	20	0	100.00	20	0
BAYAT	18	0	100.00	18	0
KEMALANG	13	157	98.67	10	3
KARANGDOWO	19	315	97.74	11	8
KLATEN TENGAH	9	282	97.67	3	6
KLATEN UTARA	8	271	97.46	1	7
CEPER	18	517	97.40	6	12
PRAMBANAN	16	470	96.89	9	7
KALIKOTES	7	508	96.71	4	3
PEDAN	14	546	95.47	0	14
GANTIWARNO	16	662	94.51	8	8
JATINOM	18	1171	93.17	7	11
MANISRENGGO	16	788	92.87	6	10
JOGONALAN	18	1267	92.44	5	13
KARANGNONGKO	14	925	91.52	5	9
WEDI	19	1391	91.44	3	16
DELANGGU	16	1170	89.86	3	13
TRUCUK	18	2141	89.84	7	11
NGAWEN	13	1737	88.33	0	13
KARANGANOM	19	1792	87.28	4	15
POLANHARJO	18	2154	83.64	0	18
KEBONARUM	7	914	83.35	0	7
JUWIRING	19	2955	83.05	1	18
WONOSARI	18	3971	78.24	0	18
KLATEN SELATAN	12	2619	76.02	0	12
TULUNG	18	4134	72.03	1	17
	401	32988	90.77	132	269

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah desa/kelurahan yang belum ODF berjumlah 269 masih lebih banyak dibanding desa/kelurahan yang sudah ODF yang berjumlah 132. Sehingga dengan pencapaian Desa/kelurahan ODF seperti tertera dalam tabel 2.57, sehingga hal tersebut masih menjadi permasalahan yang perlu segera dituntaskan.

12. Stunting

Stunting adalah Kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama dan menyebabkan terlambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Penyebab dari stunting sendiri adalah kekurangan gizi dalam waktu yang lama 1000 hari pertama kehidupannya pada masa kehamilan, janin akan berdampak pada pertumbuhan kerdil ketika anak lahir. Kesadaran masyarakat terhadap pemberian gizi yang salah atau kurang tepat, pola asuh yang tidak sesuai, infeksi bakteri/kuman yaitu pola hidup yang tidak bersih (BAB sembarangan). Akibat dari stunting adalah perkembangan otak dan fisik terhambat, sulit berprestasi, rentan terhadap penyakit, dan ketika dewasa mudah menderita kegemukan sehingga

beresiko terkena penyakit jantung, diabetes dan penyakit tidak menular lainnya.

Gizi buruk merupakan salah satu dari sekian banyak faktor penyebab stunting. Gangguan gizi pada masa janin akan berdampak pada pertumbuhan kerdil ketika anak lahir. Kesadaran masyarakat terhadap pemberian gizi pada anak yang salah atau tidak tepat juga akan berdampak pada naiknya prevalensi stunting di Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten menjadi salah satu dari 100 Kabupaten/Kota prioritas penanganan stunting. Hal ini dikarenakan angka stunting di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2017 masih mencapai 27,2 % dari jumlah balita yang ada. Berikut angka kecenderungan Prevalensi Stunting di Kab. Klaten. Dari 391 desa ada 10 desa prioritas penanganan stunting di 7 (tujuh) kecamatan, Yaitu :

- a. Desa Sanggrahan (Prambanan)
- b. Desa Randusari (Prambanan)
- c. Desa Titang (Jogonalan)
- d. Desa Sumyang (Jogonalan)
- e. Desa Granting (Jogonalan)
- f. Desa Ngaren (Pedan)
- g. Desa Butuhan(Delanggu)
- h. Desa Keprabon (Polanharjo)
- i. Desa Tibayan (Jatinom)
- j. Desa Gemblegan (Kalikotes)



Gambar 2.19 Kecenderungan Prevalensi Stunting dan *Underweight* pada Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017

Dari gambar 2.19 diatas bisa dilihat bahwa perkembangan Prevalensi Stunting dan *Underweight* pada balita selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif.

Angka stunting dari hasil survey Penilaian Status Gizi (PSG) dari 400 responden angka stunting sebanyak 27,2%. Sedangkan dari angka pengukuran serentak yang dilaksanakan tahun 2017 diperoleh angka prevalensi sebanyak 8,11%. Pengukuran ini didapat dari hasil status gizi TB/U yaitu dengan status gizi sangat pendek ditambah dengan status gizi pendek dibagi dengan jumlah balita yang diukur TB/BB nya.

13. Kesehatan Lingkungan

Tabel 2.58 Capaian Rumah tangga Sehat Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Rumah Tangga Sehat				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Prambanan	Prambanan	77.50	95.60	100.00	99.03	93.48
		Kebondalem Lor	86.00	91.60	84.10	82.72	83.44
2	Gantiwarno	Gantiwarno	90.50	99.70	93.50	94.18	91.64
3	Wedi	Wedi	50.00	100.00	91.40	84.33	84.29
4	Bayat	Bayat	99.90	100.00	99.80	95.11	99.40
		Cawas I	93.20	96.20	89.50	89.52	85.63
		Cawas II	96.60	95.90	96.00	89.52	95.88
6	Trucuk	Trucuk I	87.80	81.60	91.80	84.08	90.44
		Trucuk II	100.00	100.00	73.30	73.33	88.29
7	Kalikotes	Kalikotes	97.40	95.80	95.30	95.76	99.71
8	Kebonarum	Kebonarum	93.80	86.50	89.90	84.84	91.01
9	Jogonalan	Jogonalan I	78.10	70.60	82.10	99.54	99.00
		Jogonalan II	90.00	98.60	98.70	98.89	90.25
10	Manisrenggo	Manisrenggo	80.10	99.00	100.00	100.00	100.00
11	Karangnongko	Karangnongko	97.90	68.50	100.00	94.03	92.43
12	Ngawen	Ngawen	97.90	99.80	99.00	94.10	97.58
13	Ceper	Ceper	98.10	98.30	97.90	97.11	99.28
		Jambukulon	98.50	92.00	0.00	29.67	28.35
14	Pedan	Pedan	100.00	92.10	98.00	100.00	94.66
15	Karangdowo	Karangdowo	95.60	97.70	97.80	98.48	100.00
16	Juwiring	Juwiring	100.00	96.00	95.00	93.12	88.79
17	Wonosari	Wonosari I	81.10	70.80	76.00	96.19	70.37
		Wonosari II	75.70	82.90	81.00	0.00	82.36
18	Delanggu	Delanggu	53.70	43.90	71.00	73.00	73.01
19	Polanharjo	Polanharjo	97.60	94.50	95.50	95.83	92.80
20	Karanganom	Karanganom	97.80	100.00	98.80	99.39	100.00
21	Tulung	Tulung	71.30	81.30	89.80	91.19	91.55
		Majegan	96.00	95.80	96.70	87.30	44.45
22	Jatinom	Jatinom	92.90	90.10	90.80	96.82	93.34
		Kayumas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Kemalang	Kemalang	100.00	77.30	100.00	100.00	93.42
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	93.40	91.20	92.30	97.29	90.31
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	93.50	74.40	86.80	100.00	81.73
26	Klaten Utara	Klaten Utara	24.60	68.80	100.00	92.62	82.38
Cakupan Rumah Tangga Sehat			84.90	90.80	89.90	92.27	88.69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.58 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan capaian rumah tangga sehat di dua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari 92,27 % menjadi 88,69 %. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan.

14. Tenaga Medis dan Sarpras Kesehatan

Tabel 2.59 Sarana Kesehatan Yang Berizindi Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
SWASTA						
1	Rumah Sakit	9	6	2	9	9
2	Balai Pengobatan	-	-	-	17	17
3	Rumah Bersalin	-	-	-	--	-
4	Dokter Praktek	219	200	202	559	559

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
5	Apotek	121	31	6	44	44
NEGERI						
1	Rumah Sakit Umum	4	1	-	2	2
2	Rumah Sakit Jiwa	1	1	-	1	1
3	Apotek Daerah	1	1	-	-	-
4	Toko Obat Berijin	9	-	2	3	3
5	Balai Pengobatan Kesehatan Paru Masyarakat	1	1	0	-	-
6	Puskesmas / Balai Pengobatan	34	34	34	34	34
7	Puskesmas Pembantu	81	84	84	84	84
8	Puskesmas Yang Ada Fasilitas Rawat Inap	16	15	15	15	15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.59 di atas terlihat bahwa sarana kesehatan yang sangat menonjol adalah tenaga medis swasta berijin yakni tenaga dokter yang pada tahun terakhir (2017) berjumlah 713 orang. Sementara sarana prasarana fasilitas kesehatan yang lain baik swasta maupun negeri jumlahnya relatif masih rendah.

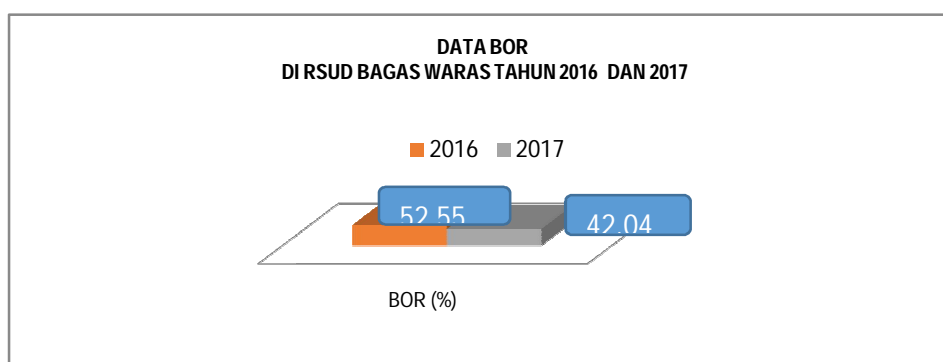
15. Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

RSUD Bagas Waras ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014. Sedangkan untuk Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diterbitkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 445/301 Tahun 2015, dan untuk mendukung operasional RSUD Bagas Waras diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.24/002/OP/2015/29 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit. Adapun kinerja pelayanan RSUD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). Adapun BOR per November 2015 s/d April 2016 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.60. Jumlah Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Klaten Tahun 2017

NO.	BULAN	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	JMLH TT	JUMLAH PASIEN	JUMLAH PASIEN MISKIN	LAMA RAWAT	HARI RAWAT	JUMLAH PASIEN KELUAR			JMLH KEMATI AN	JMH PASIEN KELUAR
									HIDUP	MATI			
										< 48 JAM	> 48 JAM		
1	JAN	3710	493	143	4203	2295	1812	2156	468	16	9	25	493
2	PEB	3649	449	143	4098	2293	1565	2017	432	12	5	17	449
3	MRT	4478	575	143	5053	2360	2645	901	541	17	17	34	575
4	APRL	4180	502	143	4682	2305	1757	1525	481	14	7	21	502
5	MEI	4538	451	143	4989	2318	1359	1525	430	10	11	21	451
6	JUN	3463	383	143	3846	2280	1314	1879	375	3	5	8	383
7	JUL	4218	516	143	4734	2326	1533	1533	495	14	7	21	516
8	AGST	4301	479	143	4780	2319	1608	1642	465	6	8	14	479
9	SEPT	4118	475	143	4593	2326	1334	2101	456	17	2	19	475
10	OKT	4701	573	143	5274	2354	1745	2308	556	12	5	17	573
11	NOP	4850	510	161	5360	2310	1638	2228	500	9	1	10	510
12	DES	3931	560	161	4491	2365	2590	2590	545	10	5	15	560
		50137	5966		56103	27851			5744	140	82	222	5966

Sumber: Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klaten 2018



Gambar 2.20 Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Sumber : RSD Bagas Waras, 2018

Berdasar pada tabel 2.61 dan gambar 2.20 indikator BOR diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan Persentase pemakaian tempat tidur dibanding tahun 2016 sebesar 10,51%.

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang yang harus ditangani sesuai kewenangan Provinsi meliputi jalan dan jembatan, sumberdaya air, air minum dan sanitasi.

1. Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km.

- a. Aksesibilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- b. Mobilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Klaten dalam satuan km/10.000 jiwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk minimal untuk suatu wilayah yang kepadatannya 1000 s/d 5000 jiwa/km² adalah 3 km per 10.000 jiwa. Pencapaian SPM indeks mobilitas pada tahun 2015 sudah mencapai 174,33 termasuk kategori 1 dengan tingkat kerapatan penduduk < 100 jiwa/km².
- c. Keselamatan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, tingkat keselamatan lalu lintas tahun 2017 mencapai 99.77%.
- d. Kondisi jalan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM, tahun 2017 dari total panjang jalan 769,63 km, jalan kondisi baik 470,61 km, jalan kondisi sedang

sepanjang 163,03 km. Untuk jalan rusak ringan 62,90 km dan rusak berat 67,09 km. Dari capaian tersebut, jalan kondisi baik mencapai 61,15%, sedang 21,96 %, rusak ringan 8,17% dan rusak berat 8,72%. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%, artinya kondisi jalan sudah melampaui target yang ditetapkan.

- e. Kondisi jembatan, dengan indikator tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Total jembatan yang ada di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2017 ini tercatat ada 348 buah, kondisi jembatan tersebut 283 buah kondisinya baik sedangkan 65 buah kondisinya rusak dan sedang.

2. Prasarana Sumber Daya Air

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 29.713 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

Kondisi fisik dan tingkat kefungsi jaringan irigasi perlu dikenali untuk menemukan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang dalam keadaan rusak dan memerlukan perbaikan atau rehabilitasi. Bila terdapat kondisi baik maka jaringan irigasi tersebut dapat berfungsi dengan baik pula. Kondisi rusak ringan memerlukan pemeliharaan dan rusak berat mengharuskan rehabilitasi oleh pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Kondisi DI Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebagai berikut :

- DI kondisi baik : 7.208 ha (24,26%)
- DI rusak sedang : 15.303 ha (51,50%)
- DI rusak berat : 7.202 ha (24,24%)

3. Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi

Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi, khususnya jamban sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai target *Millenium Development Goal's*. Capaian air bersih tahun 2017 mencapai 87,31%, dengan perincian untuk wilayah perkotaan 90,15% dan perdesaan 84,47%. Sedangkan cakupan akses sanitasi telah sampai 91,75% akses dengan perincian 92,90% wilayah perkotaan dan 90,60% wilayah perdesaan. Cakupan

Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017*

NO	SEKTOR	SKALA	Capaian Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Air Minum	Kabupaten	987.075	1.186.952	1.270.967	1.290.796	1.138.976
		%	75,29	80,80	83,40	87,2	87,31
		Perkotaan	426.142	469.399	525.706	531.477	470.511
		%	86,52	85,63	87,60	90,02	90,15
		Perdesaan	560.933	717.553	745.261	759.319	668.465
		%	68,53	77,90	80,73	84,38	84,47
2	Sanitasi	Kabupaten	921.757	1.149.253	1.259.221	1.286.924	1.196.896
		%	70,31	84,80	85,40	88,22	91,75
		Perkotaan	384.523	477.656	482.213	487.035	452.964
		%	78,07	87,00	88,42	89,01	92,90
		Perdesaan	537.234	771.597	815.008	822.189	764.672
		%	65,64	84,40	86,88	87,43	90,60

Sumber: BAPPEDA KAB. KLATEN (hasil olahan)

***)2017 merupakan Data Konsolidasi Bersih Semester I-2017**

Sesuai Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi pada tahun 2019. Selain itu, berbagai program juga diarahkan untuk mencapai target akses universal (*universal acces*), yakni tercapainya akses 100 persen air minum dengan perincian 85 persen jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan (BJP) terlindungi dan 15 persen BJP tak terlindungi.

Upaya pemenuhan akses universal khususnya terkait air minum dan sanitasi dilakukan melalui PDAM, optimalisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, CSR, maupun program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, program Kotaku, Sanimas, USRI dan program lainnya.

4. Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2031, yang selama ini dijadikan pedoman oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, termasuk untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pemerintah kabupaten juga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten di wilayahnya. Sampai dengan Tahun 2017 belum ada bagian wilayah perkotaan yang ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/Kota.

Dari aspek pengendalian tata ruang, kondisi hingga Tahun 2015, diketahui tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 85,7%, dengan pengertian terdapat simpangan sebesar 14,7% seperti terlihat pada tabel 2.62. Hal ini menunjukkan perlu adanya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perlu peningkatan kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Tabel 2.62 Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang

No	Prosentase	%
1	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas rencana lahan pertanian	0,04
2	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	0,02
3	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman	19,14
4	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	8,86
5	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai, mata air, dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai, mata air, dan Rel KA	54,40
6	Prosentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai dan mata air terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	5,94
Total Simpangan (%)		14,7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

D. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam aspek penyediaan sarana permukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru dan layak bagi penduduk Kabupaten Klaten. Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten masih menjadi permasalahan dalam penyediaan sarana permukiman. Kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya rumah layak huni di Kabupaten Klaten setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun dalam penanganannya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni dimana pada tahun 2015 sebanyak 24.774 unit berkurang menjadi 23.884 unit pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 23.108 unit. Data jumlah rumah tidak layak huni Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Klaten

No.	Kecamatan	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bayat	4530	4309	4261
2	Cawas	1523	1299	1263
3	Ceper	348	348	295
4	Delanggu	207	207	190

No.	Kecamatan	Tahun		
		2015	2016	2017
5	Gantiwarno	461	461	427
6	Jatinom	2128	1947	1890
7	Jogonalan	454	453	418
8	Juwiring	741	741	698
9	Kalikotes	399	386	379
10	Karanganom	528	518	474
11	Karangdowo	1172	1075	1038
12	Karangnongko	1264	1232	1201
13	Kebonarum	168	167	154
14	Kemalang	1372	1341	1314
15	Klaten Selatan	168	159	141
16	Klaten Tengah	375	369	360
17	Klaten Utara	195	195	184
18	Manisrenggo	1022	1013	975
19	Ngawen	521	514	492
20	Pedan	416	414	400
21	Polanharjo	143	143	119
22	Prambanan	729	719	695
23	Trucuk	2844	2842	2803
24	Tulung	1052	1051	1013
25	Wedi	1268	1248	1214
26	Wonosari	746	733	710
Total		24774	23884	23108

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

Masih belum tercapainya 100% cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi sebagai sarana dan prasarana permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Klaten dan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan adanya permukiman kumuh. Sesuai profil kumuh tahun 2014, luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten seluas 236,5 Ha.

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan stabilitas sosial politik melalui penciptaan kondusivitas daerah, peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan kesadaran politik dan demokratisasi, serta peningkatan kesadaran bela negara. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut maka akan semakin menumbuhkan kesadaran dalam keikutsertaan secara aktif sebagai pemilih dalam Pemilu.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan).

Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos

Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu pelacuran dalam kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangannya bersifat fluktuatif, Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 2.63.

Minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Klaten jumlahnya juga bersifat fluktuatif, temuan terbesar terjadi pada tahun 2015, sedangkan paling sedikit pada tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.64

Tabel 2.64 Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Pelacuran Oleh Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun 2017

NO	TAHUN	JUMLAH KEGIATAN	HASIL OPERASI PENERTIBAN					
			PGOT		PSK/ WTS	PASANGAN TIDAK RESMI	ANJAL/PUNK	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2013	10	6	5	7	20	4	6
2	2014	10	4	8	8	38	8	7
3	2015	10	11	5	10	50	8	2
4	2016	12	14	7	8	46	12	4
5	2017	15	15	8	6	58	12	14
SANKSI								
<ul style="list-style-type: none"> - Bagi profesi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan ; - Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ; - Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut; - Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP. 								

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2018

Tabel 2.65 Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Oleh Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun

NO	TAHUN	JUMLAH KEGIATAN	HASIL OPERASI PENERTIBAN			
			CIU	VODKA	ANGGUR PUTIH	ANGGUR MERAH
1	2013	5	60 liter	45 botol	2 dus	5 dus
2	2014	6	120 liter	60 botol	10 dus	20 dus
3	2015	6	200 liter	40 botol	5 dus	4 dus
4	2016	4	60 liter	-	2 dus	2 dus
5	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
SANKSI						
<ul style="list-style-type: none"> - Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu; - Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten. 						

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2018

- Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan Gerakan yang Bersifat Radikalisme yang Kadang Bersifat Laten serta Kenakalan Remaja.

Tabel 2.66 Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum di Kabupaten Klaten

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ancaman Terorisme	10	7	-	17	-
2.	Konflik Sara	6	5	-	17	3
3.	Gerakan Radikalisme	6	3	4	21	9
4.	Kenakalan Remaja	4	4	3	4	3

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2018

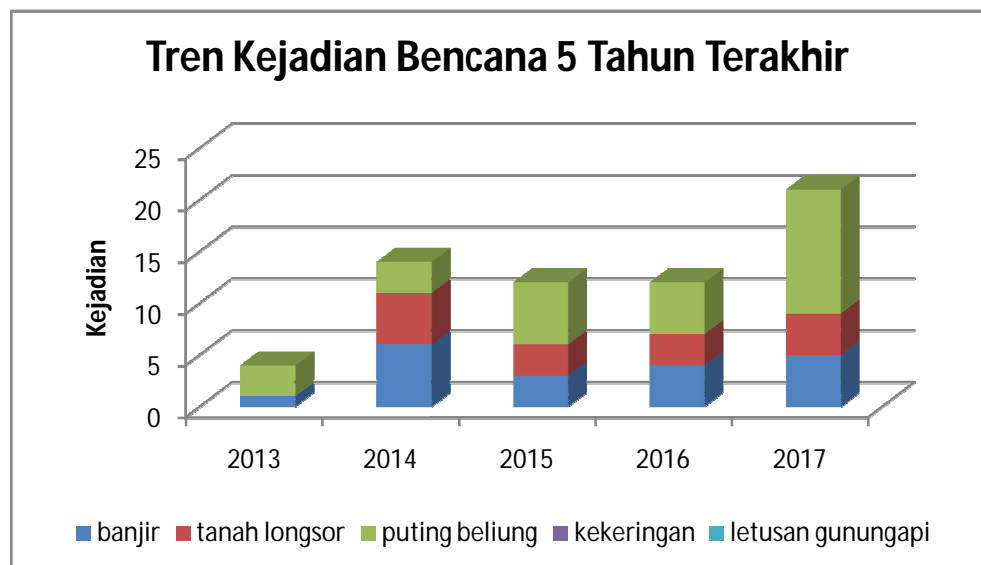
- Kebencanaan

Berikut adalah data kejadian bencana di Kabupaten Klaten yang terekam di dalam DIBI dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.67 dan gambar 2.21

Tabel 2.67 Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2013-2017

Jenis Bencana	Tahun (jumlah kejadian bencana)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Banjir	1	6	3	4	5
tanah longsor		5	3	3	4
puting beliung	3	3	6	5	12
Kekeringan					
letusan gunungapi					
Jumlah	4	14	12	12	21

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>



Gambar 2.21 Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2018

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>

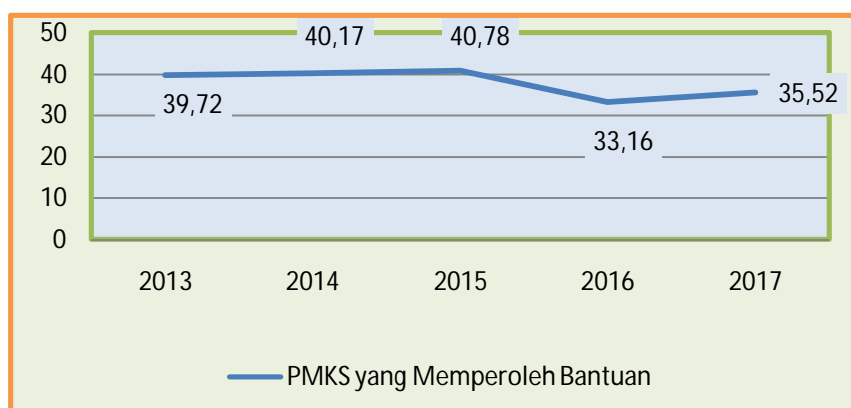
Dari Tabel 2.67 dan Gambar 2.21 bencana banjir adalah kejadian yang paling sering terjadi dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Klaten yaitu 19 kali, kemudian puting beliung 29 kali, dan tanah longsor 15 kali. Kejadian bencana tersebut berdampak kepada penduduk seperti menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan mengungsi. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan bangunan (rumah, fasilitas pendidikan dan kesehatan) serta lahan pertanian. Kejadian bencana tersebut langsung ditangani oleh pemerintah Kabupaten Klaten sampai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan lain-lain, maupun dengan melakukan mitigasi non struktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana. Di Kabupaten Klaten beberapa mitigasi baik struktural maupun non struktural telah dilakukan antara lain :

- a. pembangunan infrastruktur
- b. pengadaan peralatan siaga bencana,
- c. pembangunan taman kebencanaan
- d. pelatihan tanggap bencana,
- e. pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana,
- f. penyelenggaraan Sekolah Sungai,
- g. pembentukan Desa Tangguh Bencana. Sampai dengan tahun 2017 ada tiga desa tangguh bencana yang terbentuk yaitu Desa Ngandong (Kecamatan Gantiwarno), Sidorejo (Kemalang), dan Balak (Cawas).
- h. Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)

F. Bidang Sosial

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Gambaran PMKS yang memperoleh bantuan dapat dilihat pada Gambar 2.22.



Sumber: Dinas Sosial P3AKB, PP dan PA Kabupaten Klaten, 2018

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2016-2017 sudah dipihaki dengan penganggaran dana program dan kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD I,

dan APBD II. Dalam kurun waktu tersebut jumlah PMKS di Kabupaten Klaten bertambah sebanyak 4.052 jiwa. Salah satu bentuk pemihakan yang dilakukan dalam penanganan PMKS adalah dengan program pemberdayaan melalui KUBE, bantuan anggaran dari dana Bantuan Sosial, dan panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Perkembangan Penanganan PMKS Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 2.68.

Tabel 2.68 Perkembangan Pemberian Bantuan Kepada PMKS Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017

Uraian	Jumlah	Prosentase
PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE		
Jumlah PMKS	138.984	
Jumlah Penerima KUBE	100	0,07 %
PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial		
Jumlah PMKS	138.984	
Penanganan PMKS	43.510	31,31 %
Panti Sosial (milik swasta)		
Jumlah panti	25	
Jumlah panti yang menyediakan sarpras pelayanan kessos	16	64 %

Tabel 2.69 Perkembangan Penanganan PMKS Kabupaten Klaten tahun 2016-2017

NO	JENIS PMKS	SATUAN	TAHUN		SUMBER DANA
			2016	2017	
1	Anak Terlantar	jiwa	645	625	APBD II/I
2	Anak Berhadapan dengan Hukum	jiwa	105	622	
3	Anak Jalanan	jiwa	40	-	APBD I
4	Anak Cacat	jiwa	238	250	APBN DAN APBD I
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	jiwa	50	-	APBD I
6	Lanjut Usia Terlantar	jiwa	50	2.550	APBN
7	Penyandang Cacat	jiwa	150	-	APBD II melalui PPCK
8	Bekas penderita penyakit eks kronis	jiwa	-	-	
9	Penyandang HIV/Aids	jiwa	-	-	
10	Tuna Susila	jiwa	-	-	
11	PGOT	jiwa	136	96	
12	Pekerja Migran bermasalah	jiwa	-	-	
13	Fakir Miskin melalui KUBE	jiwa	100	-	APBD I
14	Keluarga berumah tidak layak huni	jiwa	50	-	APBN
15	Keluarga bermasalah psikologis	jiwa	43	-	APBD I/II
16	Komunitas Adat Terpencil	jiwa	40	-	APBD I
17	Korban bencana alam	jiwa	119	2.112	APBD I
	Lain-lain :				
18	Pelayanan Adopsi	jiwa	22	24	
19	Pengunduran diri KIS	jiwa	386	389	
20	Rekomendasi BPJS	jiwa	899	1.601	
21	Kehabisan Bekal	jiwa	250	101	APBD II
22	Bansos tak direncanakan sebelumnya	jiwa	1.083	959	APBD II
23	Mayat terlantar	jiwa	14	8	APBD II
24	PKH	jiwa	41.597	40.732	APBN
	Jumlah		46.017	50.069	

Begitu pula upaya penanganan terhadap penyandang disabilitas juga cenderung bersifat fluktuatif. Gambaran jumlah penyandang disabilitas menurut kecamatan dan jenisnya dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70 Penderita Disabilitas Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2016

Kecamatan	Cacat Tubuh	Cacat Netra	Cacat Mental	Cacat Rungu dan Wicara	Cacat Ganda	Eks Psikotik	Fisik dan Mental
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Prambanan	110	40	32	14	7	29	37
02 Gantiwarno	155	51	44	18	8	49	90
03 Wedi	151	61	55	24	5	50	53
04 Bayat	150	88	52	30	10	55	41
05 Cawas	171	78	55	26	14	70	93
06 Trucuk	130	79	96	38	11	52	76
07 Kalikotes	93	43	14	12	6	28	34
08 Kebonarum	34	16	8	1	1	17	41
09 Jogonalan	135	75	43	14	8	42	47
10 Manisrenggo	92	37	41	13	3	41	57
11 Karangnongko	114	33	20	7	2	33	69
12 Ngawen	105	60	25	4	6	32	27
13 Ceper	85	50	40	11	6	66	84
14 Pedan	115	57	30	18	3	33	49
15 Karangdowo	133	68	26	20	5	38	35
16 Juwiring	121	79	68	23	5	42	80
17 Wonosari	128	51	44	25	10	29	55
18 Delanggu	56	42	25	17	7	39	56
19 Polanharjo	102	43	33	13	8	34	77
20 Karanganom	74	43	14	19	10	48	49
21 Tulung	115	54	21	12	1	27	33
22 Jatinom	114	48	49	16	6	29	44
23 Kemalang	85	50	23	8	1	23	51
24 Klaten Selatan	89	27	17	6	1	25	45
25 Klaten Tengah	31	21	8	4	2	18	25
26 Klaten Utara	51	28	18	6	6	14	24
Jumlah 2016	2.739	1.322	901	399	152	963	1372
2015	561	722	2.870	523	1023	797	
2014	2.810	1.020	1.697	995	481	984	
2013	2.436	850	1.049	714	383	811	

Sumber : Dinsos P3AKB Kab. Klaten, 2017

Dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Terhadap keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak

2.3.2. Fokus Pelayanan Penunjang

A. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015. Lingkungan merupakan tempat bagi kelangsungan makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara, harus bersih atau berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran, sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat.

Berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Klaten di masa datang adalah penyediaan air bersih, sanitasi, sampah, persoalan limbah,

dan polusi udara. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.71

Tabel 2.71 Timbulan Sampah dan Kapasitas Terangkut di Kabupaten Klaten

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (KK)	Timbulan Sampah (m3/hari)	Kapasitas Terangkut (m3/hari)	Prosentase Sampah Terangkut (%)
1	Bayat	18701	187,01	6,33	0,17%
2	Cawas	18309	183,09	8,00	0,22%
3	Ceper	20106	201,06	13,00	0,35%
4	Delanggu	11937	119,37	6,04	0,16%
5	Gantiwarno	10401	104,01	9,67	0,26%
6	Jatinom	15370	153,70	7,33	0,20%
7	Jogonalan	16384	163,84	14,67	0,40%
8	Juwiring	16901	169,01	16,00	0,43%
9	Kalikotes	9319	93,19	10,00	0,27%
10	Karanganom	13212	132,12	14,17	0,38%
11	Karangdowo	14051	140,51	12,04	0,33%
12	Karangnongko	10977	109,77	6,00	0,16%
13	Kebonarum	5766	57,66	5,17	0,14%
14	Kemalang	10496	104,96	12,67	0,34%
15	Klaten Selatan	10888	108,88	22,00	0,60%
16	Klaten Tengah	14547	145,47	36,00	0,97%
17	Klaten Utara	11480	114,80	14,33	0,39%
18	Manisrenggo	11990	119,90	7,00	0,19%
19	Ngawen	15356	153,56	10,00	0,27%
20	Pedan	13130	131,30	6,00	0,16%
21	Polanharjo	12714	127,14	7,00	0,19%
22	Prambanan	14559	145,59	18,00	0,49%
23	Trucuk	22482	224,82	8,00	0,22%
24	Tulung	14743	147,43	16,50	0,45%
25	Wedi	16495	164,95	14,50	0,39%
26	Wonosari	19188	191,88	7,67	0,21%
JUMLAH		369.502	3695,02	308,08	8,34%

Sumber : SSK Kabupaten Klaten, 2017

Besarnya jumlah sampah yang ditimbulkan dan belum terpadunya sistem pengelolannya, maka menjadikan pemikiran bersama untuk mengantisipasi sejak dini, agar tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten di masa datang. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya kesadaran dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta terbatasnya TPA di Kabupaten Klaten. Adapun TPA yang sudah tidak dapat difungsikan adalah TPA di Beteng, Jomboran, dan Joho, dan saat ini TPA yang masih berfungsi adalah TPA Candirejo dan mulai dialihkan ke TPA di Troketon Pedan.

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi persampahan perlu untuk terus dilakukan dan dikembangkan, mengingat jumlah Industri Kecil/UKM di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sudah mencapai 34.155 UMKM, 131 unit usaha industri menengah/besar dan 207 pusat perdagangan/pasar dan jumlah sentra Industri sebanyak 45 buah. Efek dari kegiatan industri di samping menghasilkan limbah cair juga menghasilkan limbah dan polusi udara. Sehingga limbah cair yang dihasilkan dari limbah industri perlu dipantau sebagai langkah pengendalian pencemaran, karena dengan bertambahnya kegiatan industri maka jumlah limbah yang dihasilkan berpotensi terhadap

pencemaran lingkungan, terlebih sebagian besar industri yang berada di Kabupaten Klaten belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL). Permasalahan lain terkait industri di bidang lingkungan adalah masih sedikitnya industri yang telah memiliki izin Amdal. Data terkait izin lingkungan/ perlindungan lingkungan dapat dilihat pada tabel 2.72

Tabel 2.72 Data Izin Lingkungan/ Perlindungan Lingkungan

Izin Lingkungan/ Perlindungan Lingkungan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Izin Amdal	1	0	-	0
Izin UKL /UPL	32	90	52	53
Izin SPPL	85	701	832	546
Izin Pembuangan Air limbah (IPAL)	1	4	1	3
Izin Penyimpanan sementara limbah B3	5	4	9	6
Izin Lingkungan	23	50	52	53

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Klaten, 2017

Pencemaran udara di Kabupaten Klaten di sebabkan oleh aktifitas kegiatan industri dan transportasi. Pencemaran berupa emisi gas ke udara berupa CO, CO², SO², NO², debu dan partikel, serta kebisingan. Untuk membuat lingkungan yang nyaman melalui penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) perlu adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Proporsi ruang terbuka hijau tersebut mencakup 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Proporsi RTH Kabupaten Klaten saat ini masih jauh dari harapan karena hanya sekitar 6,7%. Melihat kondisi RTH tersebut, masih ada kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu untuk mencapai angka 30%. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi ketentuan proporsi Ruang Terbuka Hijau Privat karena menyangkut kepentingan kepemilikan lahan.

Masih sedikitnya dokumen terkait data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Klaten merupakan salah satu permasalahan dalam inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan. Dokumen yang dimiliki terkait sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Klaten adalah SLHD/ IKPLHD dan MIH. Selain keterbatasan dokumen, di Kabupaten Klaten sendiri masih sangat kurang terkait optimalisasi unit laboratorium lingkungan dimana baru dapat menguji 4 parameter dari 7 parameter bidang lingkungan. Rendahnya data dan informasi serta sarana dan prasarana terkait lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Klaten dalam penegakan hukum di bidang lingkungan, dimana dinas terkait hanya menjalankan sebagai fungsi pengawas yang melakukan kegiatan pembinaan sehingga masih banyaknya angka pelanggaran di bidang lingkungan.

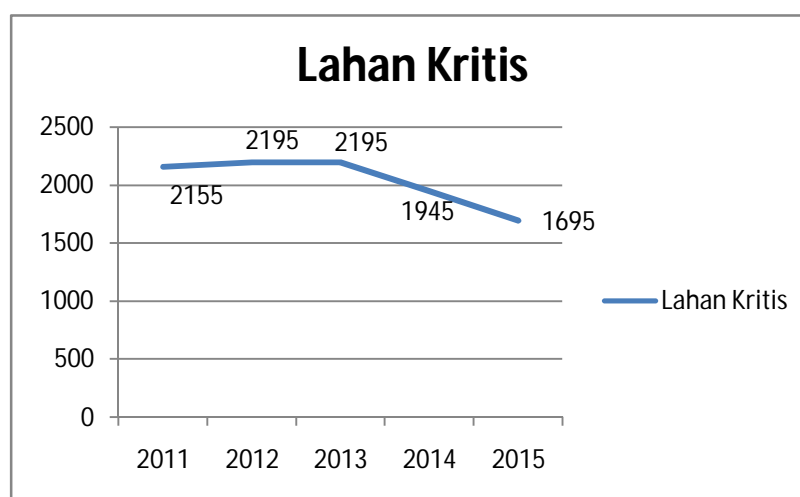
2. Kehutanan

Hutan di Kabupaten Klaten terdapat 2 (dua) jenis hutan yang masuk dalam kawasan hutan negara yaitu Hutan Lindung seluas 810,6 Ha dan Hutan Produksi seluas 639,8 Ha. Hutan negara ini dikelola oleh Perum

Perhutani, sedangkan hutan lainnya adalah Hutan Rakyat seluas 1.202 Ha. Kondisi dan letak hutan di Kabupaten Klaten di antaranya:

- a. Hutan Lindung, terletak di bagian barat dan secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kemalang yang mencakup Desa Tegalmulyo dan Desa Sidoharjo, serta berada di lereng Gunung Merapi pada ketinggian 700 – 1.200 m dpl.
- b. Hutan Produksi, terletak di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: *Kecamatan* Bayat, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Kalikotes. Hutan produksi ini terletak pada perbukitan Sekis –filit dan perbukitan kapur/batu gamping dengan ketinggian antara 300 – 500m dpl.
- c. Hutan Rakyat, hutan rakyat ini merupakan program pemerintah melalui program penghijauan dan *rehabilitasi* lahan serta konservasi tanah. Hutan Rakyat ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang mempunyai lahan kering, diantaranya Kecamatan: Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, Tulung, Prambanan, Bayat dan Wedi.

Sampai dengan saat ini masih terdapat lahan kritis seluas 1.695 Ha pada tahun 2015, mengalami penurunan seluas 250 Ha dibanding Tahun 2014 seluas 1.945 Ha. Sehingga masih diperlukan adanya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, khususnya di wilayah kecamatan Kemalang, Tulung, Jatinom, Karangnongko, Bayat, Prambanan, Wedi, dan Cawas. Adapun perkembangan lahan kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada Gambar 2.23.



Gambar 2.23Perkembangan Lahan Kritis di Kabupaten Klaten Tahun 2011–2015

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2016

Selain itu di Kabupaten Klaten juga terdapat pengembangan hasil hutan non kayu, meliputi: budidaya tawon madu serta penangkaran burung berkicau, seperti: burung jalak bali, kenari, jalak suren, murai, jalak putih, cucak rowo, perkutut, dan burung love bird sampai dengan saat ini di Kabupaten sudah terdapat 190 penangkar burung (yang sudah resmi terdaftar).

B. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) pentahapan, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/ Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada Tabel 2.73

Tabel 2.73 Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis Akte	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kelahiran	30.505	27.550	23.503	22.356	23.256
2	Kematian	137	285	1.336	615	1.400
3	Perkawinan	499	435	595	441	450
4	Perceraian	55	56	58	58	58

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten, 2016

Selain itu untuk mewujudkan penerapan *single identity number* program e-KTP sampai dengan tahun 2017 baru tercatat penduduk yang ber-KTP sebanyak 910.556 orang.

1. Pemahaman masyarakat terhadap dokumen resmi kependudukan

Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang belum memiliki kartu identitas (baik kartu identitas dalam bentuk akta lahir dan Kartu Tanda Penduduk) dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 2.74. Adanya sejumlah masyarakat yang belum memiliki kartu identitas ini disebabkan adanya permasalahan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan perlu ditingkatkan, namun dengan adanya fenomena penurunan angka dari kurun waktu tahun 2013-2017 ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan ini sudah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun meskipun belum signifikan.

Tabel 2.74 Penduduk Kabupaten Klaten Belum Memiliki Akte Lahir Dan KTP Elektronik Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Belum Memiliki Akte LAhir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2013	1.108.611	196.521
2	2014	1.104.326	188.574
3	2015	967.452	106.872
4	2016	927.310	93.846
5	2017	894.986	91.538

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

2. Pelayanan dokumen administrasi kependudukan

Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten sudah menjadi kegiatan rutin oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab terkait akses dan inovasi pelayanan informasi dokumentasi administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Klaten. Peserta kegiatan sosialisasi ini

dalam kurun waktu tahun 2013-2017 sangat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75. Sosialisasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Dana (Rp.)	Peserta	Keterangan
1	2013	59.440.000	760	Camat, Kasi Tapem, Kades/Lurah, Kepala UPTD, Pekerja Sosial Tk. Kec, Penyuluh KB Tk. Kec, Ketua TP PKK Kec, Pokja IV Kecamatan, Pokja IV Kab, Toga, Toma, Pemuka Agama, IBI, Bikor, Forum Anak, SKPD Terkait
2	2014	49.855.000	550	TP PKK, Kades/ Lurah, Pemuka Agama, Aliran Kepercayaan, Klinik Bersalin, Dinas/ Instansi terkait
3	2015	107.802.000	625	Camat, TP PKK, Pemuka Agama, Kemenag, KUA, UPTD Pendidikan, Bikor, Instansi terkait
4	2016	75.000.000	500	Perangkat Desa/ Kelurahan, Kasi Tapem, PKK, Bhayangkari, Persit Candra Kirana, Bikor, Klinik Bersalin, Poliklinik, RS
5	2017	30.000.000	150	TP PKK, Bhayangkari, Persit Chandra Kirana, Bikor, IBI, UPTD Pendidikan, Instansi terkait

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, disamping untuk mendorong kemandirian desa juga untuk menanggulangi kemiskinan. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan didukung oleh lembaga dan atau konsultan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan.

Lembaga ekonomi perdesaan terdiri dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Pasar Desa. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa saat ini gencar untuk mengembangkan beberapa lembaga ekonomi pedesaan.

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2013-2014 masih relatif rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada tahun 2015 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 215 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. BUMDes Dasar sejumlah 47;
2. BUMDes Tumbuh sejumlah 89;
3. BUMDes Berkembang sejumlah 21; dan
4. BUMDes Maju sejumlah 4.

Selain BUMDes yang telah diklasifikasi, terdapat pula BUMDes yang belum diklasifikasi sebanyak 54 BUMDes dikarenakan baru terbentuk.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tabel 2.76 Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola oleh Desa
2013	25	40	5
2014	12	40	5
2015	28	40	5
2016	75	40	5
2017	56	40	5
Jumlah	196		

Lembaga ekonomi perdesaan lainnya yaitu Pasar Desa juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2013-2017 ada 7 jenis pelatihan sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel. 2.77 Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Pembuatan Aneka macam kue Pemanfaatan TTG di Desa Barepan Kec. Cawas peserta dari desa Barepan, Kedungampel, Tugu, Pakisan dan Desa Bendungan Masing-masing Desa sebanyak 5 (lima) orang	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Kalikotes dengan peserta dari semua desa se Kec. Kalikotes masing desa sebanyak 5 (lima) orang	1. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Drono peserta dari Desa Drono, Tempursari, Desa Ngawen Kec. Ngawen Desa Wiro Kec. Bayat Desa Ngawonggo Kec. Ceper	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat 3. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	1. Posyantek Kec. Cawas	1. Posyantek Kec. Kalikotes	1. Posyantek Kec. Ngawen	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karangnom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karangnom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
						2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)

Mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten, diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Data yang tersaji dalam pengembangan kawasan perdesaan hanya ada pada tahun 2016 dan 2017, dikarenakan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan ini baru dimulai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 hanya ada 1 data pengembangan kawasan pedesaan yaitu pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan di Kecamatan Wedi. Pengembangan kawasan perdesaan tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa, Penempatan lokasi tersebut di dasarkan pada hasil penelitian Universitas Tidar Kabupaten Magelang. Sedangkan pada tahun 2017 pengembangan kawasan desa ada 5 data pengembangan kawasan pedesaan dan masih dalam proses penyusunan RPKP, yaitu:

Pengembangan kawasan desa sentra batik di Desa Jarum, Banyuripan, Beluk dan Kebon di Kecamatan Bayat. Pengembangan kawasan desa batik tersebut telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut sebagai sentra penghasil batik di Kabupaten Klaten.

Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik di Desa Tlingsing, Mlese, Balak dan Baran di Kecamatan Cawas. Pengembangan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa secara umum maka diperlukan Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bintek) aparatur desa.

Selain itu sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pelaksanaan tertib administrasi keuangan desa menggunakan system aplikasi bernama SISKEUDES. Dan dalam penerapannya tidaklah serta merta sistem tersebut dapat teraplikasikan dengan baik, karena perlu adanya pendalaman untuk Pelatihan/ Bimbingan Teknis (Bintek) selanjutnya karena sistem SISKEUDESnya sendiri juga masih mengalami penyempurnaan. Berikut datanya,

Tabel 2.78. Pelatihan Siskeudes

No	DATA	2013	2014	2015	2016	2017
1	BINTEK SISKEUDES (ORANG)	-	-	-	391	417
2	BINTEK SID (ORANG)	-	-	-	-	183
3	APARAT YANG SUDAH BINTEK/PELATIHAN (ORANG)	343	391	-	-	48
4	INVENTARISASI ASET DESA	10	16	7	9	11
5	PERMASALAHAN ASET DESA	2	4	3	3	4

Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi di Desa Taskombang, Solodiran, Kranggan, dan Nagsri di Kecamatan Manisrenggo. Pengembangan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi di Desa Balerante, Sidorejo, dan Bumiharjo di Kecamatan Kemalang. Pengembangan kawasan desa wisata alam lereng merapi tersebut sudah sesuai dengan potensi desa yang terletak di lereng gunung merapi. Rician tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.79. Lokasi Pengembangan Wisata.

Tabel 2.79. Lokasi Pengembangan Wisata

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
2013				
2014				
2015				
2016	Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan	Kecamatan wedi : Ds. Kaligayam, Ds. Kadilanggon, Ds. Melikan	Sudah menyusun RPKP	SK Bupati No. 050/221 Tahun 2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Kabupaten Klaten
2017	Kawasan Sentra Batik	Kecamatan Bayat : Ds. Jarum, Ds. Banyuripan, Ds. Beluk, Ds. Kebon	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Sentra Industri Lurik dan Pertanian Organik	Kecamatan Cawas : Ds. Tlingsing, Ds. Mlese, Ds. Balak, Baran	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Budaya Berbasis Ekonomi	Kecamatan Manisrenggo : Ds. Taskombang, Ds. Solodiran, Ds. Kranggan, Ds. Nagsri	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Alam Lereng Merapi	Kecamatan Kemalang : Ds. Balerante, Ds. Sidorejo, Ds. Bumiharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No. 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
Jumlah	5 kawasan			

D. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2013 sebanyak 25.905 peserta KB baru, tahun 2014 naik menjadi 28.254 peserta KB baru, dan pada tahun 2015 turun menjadi 23.559 peserta KB baru, tahun 2016 naik menjadi 28.254 peserta KB baru, namun pada tahun 2017 turun menjadi 26.481 peserta KB baru. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga sejahtera, dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.80

Tabel 2.80 Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
2013	204.998	25.905	168.751
2014	206.812	28.254	172.333
2015	203.448	23.559	154.422
2016	201.950	26.461	158.943
2017	211.577	23.783	169.626

Sumber : Kantor PP dan KB Kab. Klaten, 2018

Adanya keterbatasan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi serta bahan pendukung lainnya, juga masih terbatasnya jumlah penyuluh KB yang hanya berjumlah 69 orang membina 401 desa dan kelurahan, sedang idealnya 1(satu) PLKB membina 2-3 desa/kelurahan. Data terkait jenis metode kontrasepsi dan pelayanan yang telah dilakukan terlihat pada tabel 2.81

Tabel 2.81 Data Pelayanan KB Berdasarkan PUS Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis Pelayanan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Uji P	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	KB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jumlah		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rata-rata		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
%		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Sumber: Dinsos P3KB

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2012-2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2012 jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 68.039 jiwa, jumlah keluarga sejahtera-1 sebanyak 73.848, jumlah keluarga sejahtera sebanyak 211.962 jiwa, pada tahun terakhir (2016) jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 67.400 jiwa, jumlah keluarga sejahtera-1 sebanyak 83.239 jiwa, jumlah keluarga sejahtera sebanyak 239.583 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai hasil yang optimal. Jumlah keluarga sejahtera dan proses perkembangannya bisa terlihat pada tabel 2.82

Tabel 2.82 Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	3.866	4.345	8.083	16.294
02 Gantiwarno	3.567	4.009	5.037	12.641
03 Wedi	2.757	4.839	8.885	16.426
04 Bayat	6.570	3.306	9.584	19.200

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
05 Cawas	3.633	4.100	11.423	19.159
06 Trucuk	8.913	8.276	5.332	23.566
07 Kalikotes	1.971	2.432	6.777	11.180
08 Kebonarum	797	2.308	2.966	6.073
09 Jogonalan	3.311	4.014	11.214	18.539
10 Manisrenggo	2.355	9.399	2.823	14.574
11 Karangnongko	2.300	2.192	7.382	11.873
12 Ngawen	2.485	4.508	6.391	13.384
13 Ceper	1.585	6.411	12.035	20.031
14 Pedan	2.256	3.296	9.285	14.937
15 Karangdowo	3.079	480	8.050	15.209
16 Juwiring	3.273	3.713	10.373	17.359
17 Wonosari	5.488	7.274	5.549	18.311
18 Delanggu	2.453	3.331	7.063	12.847
19 Polanharjo	2.231	6.213	3.572	12.016
20 Karanganom	1.616	4.496	8.281	14.393
21 Tulung	4.252	6.061	5.632	15.945
22 Jatinom	5.411	6.540	5.930	17.881
23 Kemalang	2.441	2.460	7.367	12.268
24 Klaten Selatan	1.436	5.067	6.277	12.780
25 Klaten Tengah	1.016	2.885	8.056	11.957
26 Klaten Utara	1.873	2781	9.627	14.281
Jumlah 2017	80.935	114.736	192.994	393.124
2016	67,400	83,239	239,583	390,222
2015	68,814	80,446	236,200	385,460
2014	65,271	75,559	223,226	364,056
2013	67,205	74,637	216,320	358,162

Sumber: *Dissos P3AKB Kabupaten Klaten, 2018*

E. Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Klaten telah memiliki website yaitu www.klatenkab.go.id, sementara untuk warung internet (warnet) sudah menyebar di 26 kecamatan dan telah menjadi konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Penyiaran radio lokal terdapat 7 stasiun penyiaran (1 milik pemerintah daerah/RSPD, 6 lainnya milik swasta/komunitas) dan terdapat 7 buah surat kabar lokal.

Kurangnya informasi yang disampaikan di website Kabupaten Klaten disebabkan karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dalam bidang komunikasi dan informasi. Jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Klaten juga dirasakan masih belum optimal, karena masih banyaknya wilayah yang minim akan akses internet. Hal ini juga menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi. Selain itu, belum adanya sistem yang memadai dalam mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi birokrasi menjadi kendala tersendiri bagi Kabupaten Klaten dalam komunikasi antar dinas pemerintahan dan masyarakat.

F. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten diantaranya meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat dari koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana

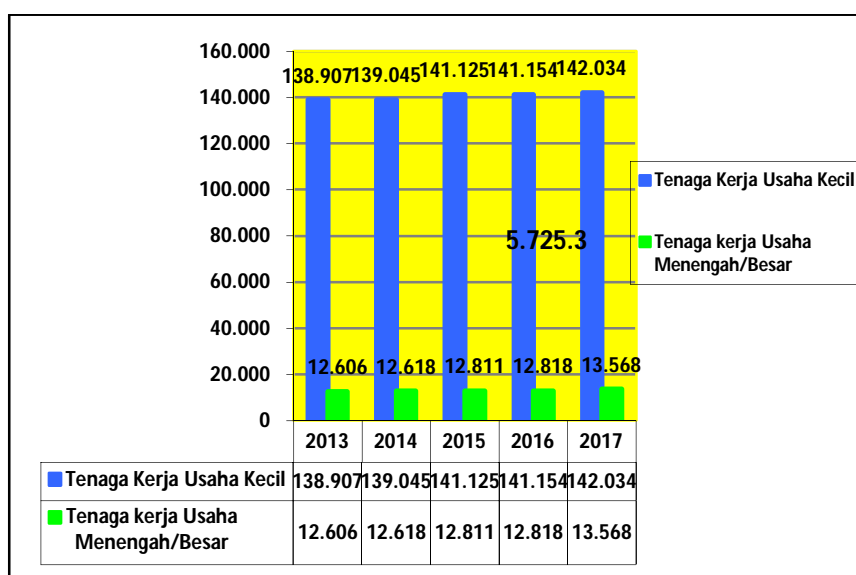
paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Data pengembangan usaha nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada Tabel 2.83

Tabel 2.83 Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2013 – 2017

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Koperasi	890	890	905	943	883
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Koperasi Aktif	534	534	543	566	581
4	Koperasi Tidak Aktif	356	356	362	377	302
5	Koperasi Sehat	10	10	11	12	14
6	Koperasi Cukup Sehat	524	524	532	554	567
7	Jumlah Pengusaha	Jumlah (Orang)				
	a).Pengusaha Kecil	34.251	34.155	34.666	34.672	34.760
	b).Pengusaha Menengah/Besar	130	131	133	134	159
8	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah (Orang)				
	a).Usaha Kecil	138.907	139.045	141.125	141.154	142.034
	b).Usaha Menengah/Besar	12.606	12.618	12.811	12.818	13.568

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, 2018

Penyerapan kerja yang terserap bersifat fluktuatif, terutama usaha kecil dari 138.907 orang pada tahun 2013 menjadi 142.034 orang pada tahun 2017. Sedangkan jumlah tenaga kerja usaha menengah/besar pada tahun 2013 sebanyak 12.606 orang menjadi sebanyak 13.568 orang pada tahun 2017. Gambaran trend jumlah tenaga kerjadi perusahaan kecil dan menengah/besar Tahun 2013–2017dapat dilihat pada Gambar 2. 24.



Gambar 2.24 Trend Jumlah Tenaga Kerja Di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2013 – 2017

Sumber : Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.78 tentang Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif terutama pada usaha kecil. Hal ini disebabkan karena : 1) pemasaran produk, banyak produk-produk yang menumpuk pada para pelaku kecil, yang tentu sajasecara tidak langsung akan berdampak pada pemberhentian tenaga kerja; 2) disamping itu juga disebabkan karena faktor usaha musiman, yaitu bahwa pada musim-musim tertentu pelaku usaha akan kebanjiran pesanan

sehingga akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan begitu juga untuk sebaliknya di saat sepi pesanan.

Sedangkan kondisi UKM sampai dengan saat ini yang memiliki daya saing baru mencapai 5% dari total jumlah UKM sebanyak 34.760 unit usaha. Kemudian dari sejumlah 883 unit koperasi, sampai dengan tahun 2017, koperasi yang aktif sebanyak 581 unit, yang sehat sebanyak 14 unit dan cukup sehat sebanyak 567 unit koperasi dengan manager yang memiliki sertifikat baru ada 65 orang. Sedangkan untuk penurunan jumlah koperasi pada tahun 2017 disebabkan adanya penutupan sejumlah koperasi yang betul-betul sudah tidak aktif dan tidak operasional.

Disamping itu di Kabupaten Klaten juga telah menetapkan 7 (tujuh) Produk Unggulan Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 050/84 Tahun 2016 yaitu Batik, Lurik, Konveksi, Mebel, Logam, Keramik dan Tembakau. Disamping itu Kabupaten Klaten juga telah memiliki 11 (sebelas) Klaster UKM yaitu Klaster Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Mebel, Logam, Handycraft, Makanan Olahan, Lereng Merapi, Desa Wisata dan Minapolitan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 050/91 Tahun 2017.

Pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola klaster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi *trademark* dan *brand image* bagi Kabupaten Klaten.

G. Bidang Statistik

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pengendalian evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

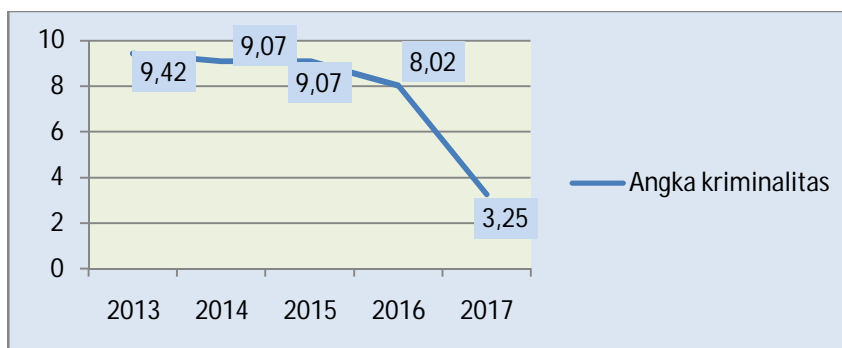
Kualitas data diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: akurat, relevan, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), koheren (*coherence*) yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi (*interpretability*). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan 3 (tiga) langkah: (i) Peningkatan kualitas data; (ii) Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM.

Dalam upaya mewujudkan data dan informasi pemerintah Kabupaten Klaten menerbitkan dokumen Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Kajian Ekonomi Daerah (KED), Input-Output, Profil Desa, Profil Daerah, Evaluasi RKPD, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Semua dokumen ini dimaksudkan sebagai ukuran kinerja daerah untuk setiap tahunnya.

H. Bidang Persandian

1. Angka Kriminalitas

Adapun angka kriminalitas di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 sebagaimana Gambar 2.25.



Gambar 2.25.

Angka Kriminalitas di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Sumber: *Kesbangpol 2018, (diolah)*

Sedangkan kondisi jumlah tindak pidana atau tindak kejahatan di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 cenderung semakin menurun, dari 888 tindak kejahatan pada tahun 2013 menjadi 546 tindak kejahatan pada tahun 2017. Jumlah tindak kejahatan yang relatif menurun di Kabupaten Klaten disebabkan karena intensifnya pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan ketertiban umum, penegakan hukum dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum. Gambaran jumlah tindak kejahatan pada tahun 2013-2017 di Kabupaten Klaten, dapat dilihat pada Tabel 2.84

Tabel 2.84 Data Jumlah Kejahatan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

NO	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	POLRES KLATEN	415	392	298	211	122
2	POLSEK KLATEN	45	34	38	33	15
3	POLSEK KETANDAN	41	44	54	54	37
4	POLSEK KEBONARUM	10	12	6	8	9
5	POLSEK WEDI	34	13	23	18	14
6	POLSEK JOGONALAN	23	9	12	22	21
7	POLSEK GANTIWARNO	10	8	4	15	8
8	POLSEK PRAMBANAN	36	29	28	35	43
9	POLSEK MANISRENGGO	12	13	15	14	18
10	POLSEK KEMALANG	14	11	19	22	14
11	POLSEK KARANGNONGKO	7	3	7	7	7
12	POLSEK JATINOM	14	15	17	9	6
13	POLSEK KARANGANOM	15	7	8	7	16
14	POLSEK TULUNG	11	9	11	11	22
15	POLSEK POLANHARJO	10	17	9	9	11
16	POLSEK DELANGGU	47	19	18	30	22
17	POLSEK WONOSARI	30	22	30	21	14
18	POLSEK JUWIRING	14	19	17	7	23
19	POLSEK CEPER	20	10	16	32	27
20	POLSEK PEDAN	27	18	22	16	36
21	POLSEK KARANGDOWO	7	4	15	17	14
22	POLSEK TRUCUK	13	12	24	24	12
23	POLSEK CAWAS	8	15	12	6	11
24	POLSEK BAYAT	14	15	14	12	12
25	POLSEK KALIKOTES	11	10	13	8	12
JUMLAH		888	760	730	648	546

Sumber : *Polres Kabupaten Klaten, 2018*

2. Kualitas Kehidupan Demokrasi

Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu dalam kurun waktu tahun 2013-2015 bersifat fluktuatif. Partisipasi masyarakat di dalam pemilu paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu pada saat Pemilu Legislatif, sedangkan partisipasi paling rendah terjadi pada tahun 2013 yaitu pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa

Tengah. Hal ini dikarenakan salah satunya banyaknya penduduk yang bekerja dan sekolah diluar daerah provinsi.

Tabel 2.85 Data Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Klaten

No	Pemilu	Jumlah Partisipasi Masyarakat
1.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	74,76 %
2.	Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014	75,73%
3.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013	57,49 %
4.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015	68,23 %

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Klaten, 2018

I. Bidang Perpustakaan

Pada tahun 2017 jumlah perpustakaan desa sebanyak 43 unit dan perpustakaan kelurahan sebanya 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86 Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	36020	38481	41464	43979	44687
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	6.842	7.648	7.673	40.003	41.225

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

1. Pengunjung Perpustakaan

Jumlah angka pengunjung perpustakaan Kabupaten Klaten dapat menggambarkan minat baca masyarakat Kabupaten Klaten. perkembangan lima tahun terakhir minat baca masyarakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel 2.87 Jumlah Pengunjung berdasarkan kalangan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Umum	14
2	Instansi	2
3	Mahasiswa	23
	JUMLAH	39

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengunjung perpustakaan di tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 97,03 % dari tahun sebelumnya. Jumlah pengunjung di tahun tahun 2017 jumlah pengunjung sebanyak 41.225, ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 40.003.

2. Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perpustakaan

Di kantor arsip dan perpustakaan terdapat beberapa Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.88 Jenis Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

NO	URAIAN
1	SOP Pelayanan Perpustakaan Umum
2	SOP Pelayanan Perpustakaan Keliling
3	SOP Rolling Buku
4	SOP Pembinaan dan Pembenahan Arsip
5	SOP Peminjaman Arsip

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2018

Dari beberapa jenis SOP diatas, SOP yang berdampak langsung terhadap pengunjung adalah SOP pelayanan Perpustakaan Umum dan SOP Pelayanan Perpustakaan Keliling. Meskipun SOP pelayanan sudah ada namun pelayanan di Perpustakaan dinilai masih kurang bagus dan masih perlu diperhatikan dan disempurnakan, Karena ada banyak faktor yang mendukung untuk terwujudnya pelayanan prima, selain SOP juga adanya ketersediaan SDM yang kompeten di bidangnya.

3. Perpustakaan Desa

Seiring dengan berkembangnya jaman dan berkembangnya jenis bahan bacaan untuk memenuhi kebutuhan baca masyarakat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi maka bermunculan perpustakaan di lingkup desa. Berikut jumlah perpustakaan yang sudah terbentuk di desa-desa bisa dilihat dalam tabel 2.89.

Tabel 2.89 Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2017

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	DESA	KECAMATAN
1	Perpustakaan Desa Krakitan	Krakitan	Bayat
2	Perpustakaan Desa Paseban	Paseban	Bayat
3	Perpustakaan Desa Ceper	Ceper	Ceper
4	Perpustakaan Desa Jambu Kulon	Jambu Kulon	Ceper
5	Perpustakaan Desa Delanggu	Delanggu	Delanggu
6	Perpustakaan Desa Towangsan	Towangsan	Gantiwarno
7	Perpustakaan Desa Bengking	Bengking	Jatinom
8	Perpustakaan Desa Bonyokan	Bonyokan	Jatinom
9	Perpustakaan Desa Cawan	Cawan	Jatinom
10	Perpustakaan Desa Tibayan	Tibayan	Jatinom
11	Perpustakaan Desa Ngering	Ngering	Jogonalan
12	Perpustakaan Desa Titang	Titang	Jogonalan
13	Perpustakaan Desa Jogosetran	Jogosetran	Kalikotes
14	Perpustakaan Desa Kalikotes	Kalikotes	Kalikotes
15	Perpustakaan Desa Tambongwetan	Tambongwetan	Kalikotes
16	Perpustakaan Desa Gempol	Gempol	Karanganom
17	Perpustakaan Desa Karang	Karang	Karanganom
18	Perpustakaan Desa Pondok	Pondok	Karanganom
19	Perpustakaan Desa Bakungan	Bakungan	Karangdowo
20	Perpustakaan Desa Karangtalun	Karangtalun	Karangdowo
21	Perpustakaan Desa Sentono	Sentono	Karangdowo
22	Perpustakaan Desa Basin	Basin	Kebonarum
23	Perpustakaan Desa Karangduren	Karangduren	Kebonarum
24	Perpustakaan Desa Keputran	Keputran	Kemalang
25	Perpustakaan Desa Gayamprit	Gayamprit	Klaten Selatan
26	Perpustakaan Desa Kabupaten	Kabupaten	Klaten Tengah
27	Perpustakaan Desa Barenglor	Barenglor	Klaten Utara

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	DESA	KECAMATAN
28	Perpustakaan Desa Nglinggi	Nglinggi	Klaten Selatan
29	Perpustakaan Desa Ngawen	Ngawen	Ngawen
30	Perpustakaan Desa Ponggok	Ponggok	Polanharjo
31	Perpustakaan Desa Sidowayah	Sidowayah	Polanharjo
32	Perpustakaan Desa Joho	Joho	Prambanan
33	Perpustakaan Desa Pereng	Pereng	Prambanan
34	Perpustakaan Desa Palar	Palar	Trucuk
35	Perpustakaan Desa Puluhan	Puluhan	Trucuk
36	Perpustakaan Desa Daleman	Daleman	Trucuk
37	Perpustakaan Desa Majegan	Majegan	Tulung
38	Perpustakaan Desa Pucangmiliran	Pucangmiliran	Tulung
39	Perpustakaan Desa Sukorejo	Sukorejo	Wedi
40	Perpustakaan Desa Gunting	Gunting	Wonosari
41	Perpustakaan Desa Tronanggan	Tronanggan	Ngawen
42	Perpustakaan Kelurahan Gergunung	Gergunung	Klaten Utara
43	Perpustakaan Desa Sapen	Sapen	Manisrenggo
44	Perpustakaan Desa Talun	Talun	Kemalang
45	Perpustakaan Kelurahan Kota	Kota	Klaten Tengah

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2018

Perkembangan dalam lima tahun terakhir jumlah perpustakaan yg ada di desa-desa Kabupaten Klaten bisa dilihat pada tabel 2.90

Tabel 2.90 Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017

NO	Tahun	JUMLAH PERPUSTAKAAN
1	2017	45
2	2016	44
3	2015	44
4	2014	42
5	2013	40

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

Dari tabel di atas perkembangan lima tahun terakhir bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir hanya sejumlah 45 desa dari 391 desa. Dengan demikian hanya 11,50 %.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Kepustakawanan

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung kualitas layanan dan tercapainya target kinerja dari pelayanan. Untuk bidang Perpustakaan ketersediaan SDM Kepustakawanan memang sangat diperlukan. Jumlah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Perpustakaan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.91

Tabel 2.91 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017

TOTAL PEGAWAI		25
MENURUT PENEMPATAN		
1	Sekretariat	7
2	Bidang Arsip	8
3	Bidang Perpustakaan	10
MENURUT JENIS KELAMIN		
1	Pria	12
2	Wanita	13
MENURUT PENDIDIKAN FORMAL		
1	Pendidikan S2	2
2	Pendidikan S1	8
3	Pendidikan D3, D2, D1	5
4	Pendidikan SLTA	9
5	Pendidikan SLTP	1
MENURUT GOLONGAN		
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	14
3	Golongan II	9
4	Golongan I	-

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten 2018

J. Bidang Kearsipan

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset pemerintah daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebanyak 65.526 arsip, dan pada tahun 2017 sudah mencapai 78.434 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.92

Tabel 2.92 Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Arsip	Jumlah	65.526	71.161	68.700	74.700	78.434

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2018

Pelayanan arsip untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip.

Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

Begitu pentingnya pengelolaan arsip bagi suatu instansi, SKPD, desa, atau kelurahan, maka perlu adanya peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan penataan arsip daerah.

K. Bidang Umum Pemerintahan

Di samping berdasarkan urusan wajib, dan urusan pilihan Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan dan kepegawaian.

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu Tahun 2014. Sebanyak 17 orang dari Fraksi PDIP, 8 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PAN, 7 orang dari Fraksi Keadilan Sejahtera, 4 orang dari Fraksi PHN

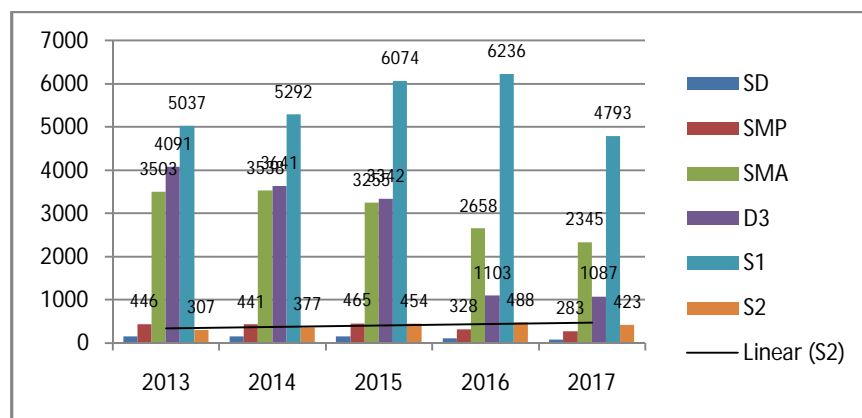
(Pembangunan Hati Nurani), 4 orang dari PKN (Partai Kebangkitan Nasional). Dari sebanyak 50 orang anggota DPRD, terbagi ke dalam 4 komisi, yaitu: (i) Komisi I sebanyak 10 orang, (ii) Komisi II sebanyak 12 orang, (iii) Komisi III sebanyak 10 orang, dan (iv) Komisi IV sebanyak 13 orang. Selama kurun waktu 2014-2015, DPRD periode 2014-2019 telah menghasilkan beberapa produk hukum. Sebagai gambaran kinerja DPRD diukur dari jenis dan jumlah keputusan selama tahun 2013 -2017 berupa Perda, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, keputusan panitia anggaran dan keputusan panitia musyawarah, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.93

Tabel 2.93 Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2013 - 2017

No	Komisi	Fraksi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perda	22	12	13	19	11
2	Keputusan DPRD	47	38	32	50	38
3	Keputusan Pimpinan DPRD	18	23	22	17	18
4	Keputusan Panitia Anggaran	7	6	9	8	18
5	Keputusan panitia Musyawarah	12	13	16	16	12
	Jumlah	106	92	92	110	97

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten, 2018

Dipihak lain, berdasar data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, pada tahun 2017 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten telah mencapai sebanyak 10.756orang. Gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Gambar 2.26.



Gambar 2.26 Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

Sumber : BKD Kabupaten Klaten, 2016

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah mengamanatkan bahwa pembentukan perangkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus dengan pertimbangan rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Klaten pada bulan Oktober 2017 telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan mulai di implementasikan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017.

Melalui peraturan yang ditetapkan, terjadi pembengkakan jumlah jabatan struktural, yang berakibat juga pada struktur organisasinya. Jumlah Dinas bertambah dari 10 (2011) menjadi 16 (2017), kemudian Kantor berkurang

dari 6 (2011) menjadi 1 (2017), jumlah Badan dari 5 (2011) menjadi 4 (2017) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas bertambah dari 75 (2007) menjadi sebanyak 87 (2010).Guna upaya meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah, maka perlu diterapkan sistem merit dalam penempatan jabatan.

L. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan pengamatan terhadap bahan galian dan pertambangan (sumber daya mineral) yang ada di Kabupaten Klaten, bahan galian tersebut pada umumnya termasuk dalam galian golongan C, dapat dilihat pada disajikan pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94 Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m3)	Keterangan
1.	Andesit Karangdowo	Desa Ringin Puiti, Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	1.424.933	Jumlah deposit layak ditambang, belum banyak dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan bangunan
2.	Batu Gamping Kalkarenit	Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat	100.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan
3.	Batu Gamping Keras	Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes	280.803	Masih dapat ditambang, namun jika terlalu dalam mengakibatkan kecelakaan penambangan
		Desa Wiro, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	277.060	
4.	Batu gamping Nummulites	Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
5.	Batu pasir Tufaan	Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
6.	Gabro dan Diorite	Desa Jerukan, Desa Gampingan, Kecamatan Bayat	60.000	Jumlah deposit layak ditambang dapat digunbakan kontruksi dan bahan uruk
7.	Lempung Aluvial	Desa Mlese, Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno	6.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku batu merah
		Desa Semenden, Kecamatan Karangnongko	6.300	
		Desa Rejoso, Desa Pakahan, Desa Kwaran, Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan,	309.000	
		Desa Basin, Desa Gondang Kecamatan Kebonarum	1.895.100	
		Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Nginggi Kec. Klaten Selatan	103.500	
8.	Lempung Residual	Desa Beluk, Desa Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat	85.950	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku keramik, gerabah, genteng dan bata
9.	Marmer	Desa Bawak, Kecamatan Cawas	75	Jumlah deposit tidak layak ditambang,
10.	Pasir Vulkanik & Andesit Vulkaniki	Desa Balerante, Desa Sidorejo, Desa Taluh, Desa Panggang	3.133.849	Jumlah deposit layak ditambang, kualitas pasir vulkanik sangat baik untuk bahan bangunan
11.	Zeolit	Desa Nengahan, Kec. Bayat	100	Deposit tidak layak ditambang

Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

M. Pertanahan

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan

pertanahan. Penerbitan pada kurun waktu 2011-2015 bersifat fluktuatif. Adapun gambaran Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2011-2015 dan sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95 Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2015-2017

No	Detail Kegiatan (Bulan)	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	1,164	1,456	1,010
2	Februari	995	1,099	577
3	Maret	1,179	1,006	590
4	April	1,049	907	1,565
5	Mei	1,171	2,539	1,195
6	Juni	1,241	1,691	1,145
7	Juli	823	875	2,491
8	Agustus	1,191	1,236	2,055
9	September	917	1,281	2,258
10	Oktober	776	843	11,236
11	November	1,251	1,189	5,485
12	Desember	1,021	669	4,365
TOTAL		12,778	14,791	33,972

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, 2017

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.96

Tabel 2.96 Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2011–2015 (dalam persen)

<i>Golongan Pengeluaran</i>	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< 40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000 – 59.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000 – 79.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000 – 99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000 – 149.999	0,64	1,31	1,09	1,02	0,71
150.000 – 199.999	5,01	5,19	5,25	5,11	3,17
200.000 – 299.999	24,56	26,41	25,66	23,07	12,07
> 300.000	69,79	67,09	68,00	70,80	84,05
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk menurut golongan pengeluaran, pada tahun 2015 terjadi peningkatan untuk golongan > Rp.300.000,- sedangkan untuk golongan lainnya mengalami penurunan. Meskipun uang yang dibelanjakan tidak dapat untuk mengkonsumsi banyak pilihan, sedangkan pendapatan tidak ada perubahan/penambahan, maka ada kecenderungan untuk

tidak membeli barang yang sifatnya tidak mendesak karena uang yang dimiliki tidak mencukupi. Pergeseran ke kelompok pengeluaran yang lebih tinggi karena adanya peningkatan harga-harga kebutuhan yang harus dicukupi.

Tabel di bawah ini menunjukkan sebagian besar pengeluaran penduduk adalah untuk makanan dibanding untuk non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan makan sebagai kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan non makan yang sifatnya sekunder. Pemenuhan kebutuhan makanan cenderung menurun, pada tahun 2011 sebesar 55,14% , dan pada tahun 2015 menjadi 48,07%, sebaliknya untuk pemenuhan non makanan pada tahun 2011 sebesar 44,86%, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 51,93%. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.97

Tabel 2.97 Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011– 2015

Rata-rata Pengeluaran Penduduk	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan	55,14	51,30	51,23	51,21	48,07
2. Non Makanan	44,86	48,70	48,77	48,79	51,93
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

A. Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat dari produk wisata dan pasar wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten antara lain mencakup:

1. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada pada Tabel 2.98

Tabel 2.98 Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganom
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu dan Candi Bubrah	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok, Nganten, Siblarak dan	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
	Umbul Nilo		
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karanganyam
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karanganyam
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya dan Industri	Kec. Bayat
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglinggi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Klaten , 2018

Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah masih perlunya peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan. Serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

2. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

3. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwu di Deles.

4. Jumlah Obyek Wisata Dan Pengunjung

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.99

Tabel 2.99 Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2013	82	256.150	50	1	0,5	350	500
2014	82	320.687	185	1	0,5	475	750
2015	82	329.021	220	1	0,5	550	1.000
2016	82	377.409	372	1	1	750	1.500
2017	82	320.693	510	1	1	1.000	2.000

Sumber: Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.99 dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relative lebih sedikit. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh karena banyaknya bermunculan destinasi wisata baru di wilayah sekitar Kabupaten Klaten yang dikelola oleh Bumdes maupun swasta, sehingga banyak pengunjung yang ingin merasakan suasana yang baru dan destinasi alternatif. Sedangkan wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung di Candi Prambanan. Selain itu juga kurangnya promosi pariwisata dan belum dimilikinya Kawasan Wisata Unggulan serta masih kurangnya sarana prasarana pendukung pariwisata.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,5 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relative belum begitu besar, untuk wisatawan nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,-

Tabel 2.100 Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis Obyek Wisata/ Perayaan	Target (Rp. 000)					Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perayaan Padusan	57.500	57.500	57.500	52.500	52.500	57.500	57.500	57.500	52.500	57.500
2	Perayaan	26.450	26.000	26.000	28.000	28.000	21.000	26.100	26.000	28.000	28.000

No	Jenis Obyek Wisata/ Perayaan	Target (Rp. 000)					Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Maleman										
3	Perayaan Syawalan	86.250	47.000	47.000	51.700	51.700	46.080	47.000	47.000	51.700	52.500
4	Perayaan Yagowiyu	23.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
5	Deles Indah	11.500	12.500	12.500	14.000	14.000	4.379,4	12.500	12.500	14.000	15.600
6	OMAC	679.000	555.045	555.045	600.000	600.000	437.956	481.149	559.175	609.976	739.919
7	Jombor Permai	86.250	62.500	62.500	65.000	65.000	86.250	72.915	68.205	65.495	68.050
8	Makam Pandanaran	57.500	100.000	100.000	134.000	114.000	37.590,85	162.900	152.300	143.300	144.500
9	Makam Ronggowarsito	1.180	1.605	1.605	1.800	1.800	1.250	1.740	1.880	1.890	2.000
10	Pemandian Jolotundo	17.250	22.000	22.000	24.200	24.200	6.300	22.000	22.017,5	24.200	50.170
11	Candi Plaosan	690	2.500	2.500	5.000	50.000	623,5	7.101	7.758	53.883	80.454
12	Makam Ki Ageng Gribig	1.725	2.000	2.000	3.000	3.000	1.725	2.000	2.000	3.000	3.030
13	Lain-lain	10.350	21.350	21.350	21.350	21.350	6.425	20.717	21.350	23.850	13.450
	Jumlah	1.058.645	910.000	910.000	1.000.550	1.025.550	727.679,75	913.622	977.685,5	1.071.794	1.255.173

Sumber data : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih belum optimal. Pada tahun 2013 realisasi pendapatan tidak memenuhi target, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2014-2017 pencapaiannya diatas target, tetapi masih belum signifikan. Sehingga pendapatan dari sektor pariwisata tersebut masih perlu dioptimalkan.

B. Pertanian

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km². Pada Tahun 2017 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 33.022 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.581 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 25.996 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19,012 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10,877 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 1.484 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1,649 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering.

Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.101

Tabel 2.101 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Lahan Bukan Pertanian (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.240	13	1.190	2.443
02 Gantiwarno	1.625	155	784	2.564
03 Wedi	1.553	18	867	2.438
04 Bayat	814	785	2.344	3.943
05 Cawas	2.314	46	1.087	3.447
06 Trucuk	1.907	2	1.472	3.381
07 Kalikotes	750	8	540	1.298
08 Kebonarum	716	2	249	967
09 Jogonalan	1.571	1	1.098	2.670
10 Manisrenggo	1.508	139	1.049	2.696

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Lahan Bukan Pertanian (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11 Karangnongko	764	851	1.059	2.674
12 Ngawen	1.038	8	651	1.697
13 Ceper	1.526	7	912	2.445
14 Pedan	868	445	604	1.917
15 Karangdowo	2.046	69	808	2.923
16 Juwiring	1.996	12	972	2.979
17 Wonosari	2.213	14	892	3.114
18 Delanggu	1.292	1	576	1.878
19 Polanharjo	1.820	92	473	2.384
20 Karanganom	1.679	11	716	2.406
21 Tulung	1.735	467	997	3.200
22 Jatinom	602	1.543	1.406	3.553
23 Kemalang	54	1.848	3.264	5.166
24 Klaten Selatan	799	3	641	1.443
25 Klaten Tengah	291	1	600	892
26 Klaten Utara	301	40	680	1.041
Jumlah 2017	33.022	6.581	25.996	65.556
2016	33.066	6.581	25.909	65.556
2015	33.111	6.581	25.684	65.556
2014	33.166	6.581	25.809	65.556
2013	33.220	6.581	25.755	65.556

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.102

Tabel 2.102 Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukkan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
2017	45,7611	40,2981	4,515	-	0,948	45,7611
2016	45,392	33,058	8,910	0,113	3,311	45,392
2015	55,230	40,899	13,663	-	0,668	55,230
2014	54,140	40,480	13,660	-	-	54,140
2013	79,7688	44,893	31,160	-	3,7158	79,7688

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Di Kabupaten Klaten juga dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten. Hal ini mengingat sampai dengan saat ini pengembangan kawasan Agropolitan belum dapat direalisasikan.

Tabel 2.103 Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	2013		2014		2015		2016		2017	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	65.552	63.145	65.678	65.671	69.158	68.661	76.029	73.627	74.964	73.962
2	Jagung	9.665	9.664	15.256	11.427	11.784	11.484	9.682	9.549	11.713	11.085
3	Kedelai	742	676	2.245	2.244	2.820	2.816	1.935	1.523	2.562	2.234
4	Kacang Tanah	1.954	1.927	2.102	1.919	2.074	2.073	1.224	1.067	955	909
5	Kacang Hijau	80	75	180	175	116	115	350	299	240	228
6	Ubi Kayu	827	631	801	704	707	707	822	685	435	395
7	Ubi Jalar	123	86	124	108	32	28	24	20	26	21

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Tabel 2.104 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	2013		2014		2015		2016		2017	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Padi	406.674	59,64	359.474	56,12	437.623	63,29	426.028	57,87	380.268	51,41
2	Jagung	80.140	82,93	87.422	76,50	94.416	82,22	72.583	74,97	90.343	81,50
3	Kedelai	823	12,17	3.485	15,52	5.656	20,06	2.759	18,12	4.440	19,87
4	Kacang Tanah	2.379	12,18	713,24	3,72	3.151	15,20	1.784	14,58	1.527	16,79
5	Kacang Hijau	97	12,13	284.608	15,81	134.634	11,61	260	8,72	285	12,50
6	Ubi Kayu	14.623	231,74	11.992	170,35	20.370	288,12	32.224	392,11	9.778	224,99
7	Ubi Jalar	1.193	138,32	1.215	112,54	369,15	131,84	356	143,55	251	119,28

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.103 dan 2.104 terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi. Produksi tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 437.623 Ton dan terendah pada tahun 2014 sebesar 359.474 Ton.

Tabel 2.105 Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	PRODUKSI (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tebu					
2	Tembakau Rajangan	1.026,890	1.201,755	2.191,360	2.193,575	1.233,527
3	Tembakau Asepan	1.640,374	1.167,656	1.164,270	1.038,530	1.070,724
4	Tembakau Vorsterland	109,000	164,552	453,740	303,930	239,455
5	Kelapa Dalam	5.312,531	5.203,615	5.384,477	4.097,630	4.697,582
6	Kelapa Hibrida	45,123	45,023	43,556	45,510	45,600
7	Kelapa Deres	122,193	115,917	82,861	99,470	98,740
8	Kopi Arabica	101,564	101,361	101,940	105,250	81,320
9	Kopi Robusta	1,828	4,856	4,856	9,830	9,990
10	Cengkeh	33,691	42,339	46,378	44,220	45,630
11	Lada	14,223	14,256	9,717	13,150	12,110
12	Tebu	5.041,545	4.352,390	4.184,222	6.289,000	3.258,940

Sumber Data: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Komoditas perkebunan sebagaimana tersebut pada tabel 2.105 merupakan komoditas andalan dan unggulan di Kabupaten Klaten. Tetapi perkembangan produksi dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, untuk komoditas unggulan Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 2.193,575 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar 1.640,374 Ton.

Hal ini disebabkan adanya fluktuasi luas areal tanam dan luas panen serta pengaruh iklim maupun ketersediaan benih unggul. Sedangkan untuk produksi tebu tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 6.289,000 Ton dan terendah pada tahun 2017 sebesar 3.258,940 Ton. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas areal tanam dari tahun 2016 seluas 1.027,780 Ha menjadi 807,070 Ha di tahun 2017. Kemudian untuk produksi Kopi Arabica pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 81,320 Ton jika dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 105,250 Ton. Hal ini disebabkan adanya tanaman kopi yang sudah mulai menurun produksinya dan perlu dilakukan peremajaan tanaman kopi.

Tabel 2.106 Produksi Holtikultura (Buah-buahan dan Sayuran) Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	PRODUKSI (Kw)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kacang Panjang	7.844	6.709	5.424	6.553	6.650
2	Terong	6.442	4.573	2.719	7.075	6.510

No	Jenis Komoditas	PRODUKSI (Kw)				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Kobis	492	395	89	300	168
4	Kembang Kol	15	17	17	16	18
5	Bayam	140,03	215,97	134,97	161	182
6	Kangkung	60	220	7	161	190
6	Petsai/Sawi	4.355	4.376	2.972	1.879	1.971
7	Mentimun	13.166	8.018	6.799	7.361	8.142
8	Tomat	4.515	4.465	4.560	4.664	4.759
9	Cabe Merah	7.878	6.851	7.366	8.512	5.957
10	Cabe Rawit	3.575	4.197	2.834	8.424	8.631
11	Melon	3.485	4.183	6.230	2.505	3.316
12	Semangka	597	2.995	3.635	8.371	2.938
13	Rambutan	20.202	45.427	20.807	26.268	25.176
14	Jeruk Siam	1.759	15.135	6.001	10.495	10.225
15	Mangga	24.270	192.842	24.723	270.454	271.890
16	Pisang	37.348	41.093	34.544	38.757	40.200
17	Pepaya	16.628	67.750	16.551	53.517	54.325
16	Durian	2.501	24.626	15.291	11.803	16.702

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan Kab. Klaten, 2018

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa perkembangan produksi tanaman hortikultura baik sayur-sayuran maupun buah-buahan mengalami fluktuatif, hal ini disamping dipengaruhi oleh luas areal tanam dan panen juga dipengaruhi oleh adanya iklim global serta serangan organisme pengganggu tanaman. Sedangkan untuk tanaman mangga pada tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan produksi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 270,454 Ton dan 271,890 Ton. Hal ini disebabkan tanaman mangga sudah memasuki puncak masa produksi.

Tabel 2.107 Populasi Ternak Tahun 2013-2017

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi Potong	95,913	98,753	99,438	88,343	88,850
2	Sapi Perah	6,170	5,340	5,486	5,795	6,098
3	Kambing	91,629	86,367	92,014	88,343	88,957
4	Domba	42,336	42,894	43,982	38,489	38,570
5	Ayam Bukan Ras	1,057,109	1,359,177	1,446,963	2,801,581	3,256,177
6	Ayam Pedaging	1,436,496	1,866,432	1,936,862	2,898,344	3,385,400
6	Ayam Petelur	1,187,867	1,044,474	1,045,869	867,822	930,234
7	Itik	243,987	323,839	292,929	395,436	575,100
8	Burung Puyuh	456,268	448,226	454,596	451,193	452,332

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa populasi ternak sapi potong mengalami penurunan sebesar 88.343 ekor pada tahun 2016 jika dibanding pada tahun 2015 yang sebesar 99.438 ekor. Penurunan terbanyak dari sapi potong betina yang disebabkan sudah memasuki usia tidak produktif dan banyak yang dipotong. Sedangkan untuk sapi perah mengalami peningkatan populasinya. Sedangkan untuk jenis hewan ternak yang lain perkembangan populasinya juga mengalami fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya penyakit hewan ternak, keterlambatan peremajaan dan tingkat kegagalan inseminasi buatan masih cukup tinggi.

Tabel 2.108 Produksi Peternakan Tahun 2013-2017

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Susu (Liter)	4,259,568	4,200,567	4,030,895	4,878,662	5,903,181
2	Daging (Kg)	3,109,024	2,750,101	2,549,885	2,749,351	2,963,800
3	Telur (Butir)	279,151,338	278,730,823	246,585,003	375,376,131	570,571,719

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab Klaten, 2018

Untuk perkembangan produksi susu, daging dan telur rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh tingkat populasi hewan ternak serta pemeliharaan yang sudah cukup baik.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

A. Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik yang dapat dilihat pada pada Tabel 2.109

**Tabel 2.109 Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017**

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)
1	2	3	4	5	6
01 Sepeda Motor					
02 Mobil Penumpang					
03 Mobil Barang	10.241	10.819	11.049	10.657	9.622
04 Mobil Bus					-
* Umum	347	344	386	464	397
Bus Besar	13	119	80	44	65
Bus Sedang	105	125	196	131	261
Bus Kecil	229	100	110	289	71
* Bukan Umum	214	199	155	137	105
05 Kendaraan Khusus/Alat Berat	9	3	9	9	6
06 Mobil Penumpang Umum					
07 Kendaraan Roda Tiga					-
Jumlah	10.811	11.365	11.599	11.267	10.130

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Adapun data terkait fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.110

Tabel 2.110 Data Pemasangan Perlengkapan Jalan

PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN 2017																
No	Jenis	Satuan	Kebutuhan	Terpasang										Jumlah Terpasang	Persentase	Sisa Kebutuhan
				s/d 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Rambu lalu lintas biasa	buah	3979	1998	77	55	42	112	126	120	23	81	247	2881	72,41%	1098
2	Rambu RPPJ	buah	200	24	7	4	4	28	20	5	12	11	12	127	63,50%	73
3	Rambu tipe F	buah	100	-	-	-	5	5	-	16	-	-	12	38	38,00%	62
4	Marka Jalan	m ²	34965	8240	1384	980	2575	1847	1216	1235	1058	-	-	18535	53,01%	16430
5	Traffic Light	unit	40	28	-	-	-	1	-	-	-	-	-	29	72,50%	11
6	Guardrail	m	3000	-	-	-	-	-	-	-	888	1060	520	2468	82,27%	532
7	Paku marka/ mata kucing	buah	97125	-	-	-	-	-	-	-	1685	-	-	1685	1,73%	95440
8	Traffic cone	buah	500	-	-	-	-	-	-	-	-	40	15	55	11,00%	445
9	Delinator	buah	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	10000
10	Cermin tikungan	buah	200	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	24	12,00%	176
11	Zona Selamat Sekolah	unit	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,00%	9
12	Lampu kedip	buah	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	25,00%	15
13	Rambu elektronik VMS	unit	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	5
14	Kamera CCTV Jalan	unit	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6,00%	47
	Jumlah														447,42%	
	Rata-rata														31,96%	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Kabupaten Klaten mempunyai terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi, dengan luasan dan kapasitas yang berbeda-beda. Secara umum, kondisi Adapun data terkait dengan Kondisi

sub terminal angkutan penumpang umum di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.111 Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Klaten

NO	TERMINAL	ALAMAT	TYPE	LUAS	FASILITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²	1. Kantor pengawas 2. Loket/ retribusi 3. Kios/ toko/ warung makan 4. Kamar mandi/ WC 5. Parkir antar jemput 6. Taman/ penghijauan 7. Loket agen bus	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²	1. Kantor pengawas 2. Loket/ retribusi 3. Kios/ toko/ warung makan 4. Kamar mandi/ WC 5. Musholla 6. Ruang tunggu penumpang	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²	1. Kantor pengawas 2. Loket/ retribusi 3. Kios/ toko/ warung makan 4. Kamar mandi/ WC 5. Parkir antar jemput 6. Ruang tunggu penumpang	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²	1. Loket/ retribusi 2. Kios/ toko/ warung makan 3. Ruang tunggu penumpang	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²	1. Loket/ retribusi 2. Kios/ toko/ warung makan 3. Ruang tunggu penumpang	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²	1. Loket/ retribusi 2. Ruang tunggu penumpang	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²	1. Kantor pengawas 2. Ruang tunggu penumpang 3. Kamar mandi/ WC	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²	1. Kantor pengawas 2. Loket/ retribusi 3. Kios/ toko/ warung makan 4. Kamar mandi/ WC 5. Musholla 6. Taman/ penghijauan 7. Ruang tunggu penumpang 8. Loket agen bus	Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kondisi Kurang Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Banyaknya sarana dan prasarana angkutan di Kabupaten Klaten memerlukan pengujian untuk mengetahui kondisi sarana angkutan. Adapun alat uji untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana angkutan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.112

Tabel 2.112 Alat Uji Sarana dan Prasaran Angkutan

No.	JENIS ALAT UJI	FUNGSI ALAT UJI	KETERANGAN
1	BRAKE TESTER	MENGUJI GAYA REM KENDARAAN	TERKALIBRASI
2	AXLE LOAD TESTER	MENGUJI BERAT KENDARAAN	TERKALIBRASI
3	SIDE SLIP TESTER	MENGUJI KINCUP RODA DEPAN KENDARAAN	TERKALIBRASI
4	HEADLIGHT TESTER	MENGUJI KEKUATAN PANCAR LAMPU UTAMA KENDARAAN	TERKALIBRASI
5	SOUND LEVEL TESTER	MENGUJI TINGKAT KEBISINGAN KLAKSON KENDARAAN	TERKALIBRASI
6	TINT TESTER	MENGUJI KEGELAPAN KACA KENDARAAN	TERKALIBRASI
7	SMOKE TESTER	MENGUJI KETEBALAN ASAP KENDARAAN (BENSIN DAN SOLAR)	RUSAK
8	KOMPRESOR	SUPLAI ANGIN BERTEKANAN UNTUK ALAT UJI CARLIFT DAN BRAKE	TERKALIBRASI
9	JANGKA SORONG	MENGUJI KETEBALAN BAN KENDARAAN	TERKALIBRASI
10	CARLIFT	MENGANGKAT KENDARAAN YANG DIUJI	TERKALIBRASI
11	TOOLKIT	PERALATAN MEKANIK LENGKAP	TERSEDIA
12	GAS ANALYZER MODULE	MENGUJI EMISI GAS BUANG MESIN BENSIN	BELUM TERSEDIA
13	DISEL SMOKE TESTER MODULE	MENGUJI EMISI GAS BUANG MESIN DIESEL	BELUM TERSEDIA
14	SPEDOMETER TESTER	MENGUJI KECEPATAN KENDARAAN	BELUM TERSEDIA
15	AXLE PLAY DETECTOR	MENGUJI KAKI - KAKI KENDARAAN (SUSPENSIS&SISTEM KEMUDI)	BELUM TERSEDIA
16	GENSET	SUMBER LISTRIK DARURAT JIKA ALIRAN LISTRIK PLN MATI	BELUM TERSEDIA

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Pelayanan pengujian sarana dan prasarana angkutan di Kabupaten Klaten masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya alat uji yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Data terkait pengujian sarana dan prasarana angkutan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.113

Tabel 2.113 Data Uji Sarana dan Prasarana Angkutan

No.	BULAN	PENGUJI	IJIN TRAYEK
	1	2	3
1	Januari	63.684.660	155.000
2	Februari	69.380.920	125.000
3	Maret	74.388.420	385.000
4	April	61.355.420	125.000
5	Mei	74.094.200	292.500
6	Juni	52.843.040	-
7	Juli	71.642.540	277.500
8	Agustus	76.590.040	500.000
9	September	68.561.420	-
10	Oktober	73.250.730	125.000
11	November	73.152.320	382.500
12	Desember	58.844.630	125.000
	2017	817.788.340	2.492.500
	2016	971.713.370	2.555.000
	2015	969.686.510	5.037.500
	2014	1.034.951.980	3.798.000
	2013	99.170.060	5.321.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Di Kabupaten Klaten keterpaduan sistem jaringan jalan antar moda, antara lain perlintasan sebidang masih belum memadai. Perlintasan sebidang kereta api yang tidak terpasang palang pintu perlintasan sebanyak 22 (dua puluh dua) lokasi dengan rincian sebagai berikut :

1. 6 (enam) lokasi dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua); dan
2. 16 (enam belas) lokasi hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 (dua), sepeda dan pejalan kaki. Adapun daftar perlintasan kereta api di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.114
- 3.

Tabel 2. 114 Jumlah Perlintasan Sebidang Kereta Api

No	Jumlah Perlintasan Sebidang Kereta Api			Lokasi
	Jumlah	Berpalang Pintu dan Berjaga	Tidak Berpalang Pintu dan Tidak Berjaga	
1	2	2	0	Jalan Nasional
2	1	1	0	Jalan Provinsi
3	49	27	22	Jalan Kabupaten dan Jalan Desa
Total	52	30	22	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2018

Tingginya mobilitas dan belum optimalnya pengawasan pada angkutan golongan C di Kabupaten Klaten, khususnya daerah Kemalang dan Karangdowo menyebabkan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kelebihan batas muatan/tonase. Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.115.

Tabel 2.115 Data Operasional Penertiban Lalu Lintas

No.	BULAN	JUMLAH PEMERIKSA	JUMLAH DITINDAK (DITILANG)
1	Januari	2.256	154
2	Februari	253	157
3	Maret	209	127
4	April	792	45
5	Mei	865	256
6	Juni	405	32
7	Juli	379	87
8	Agustus	249	28
9	September	499	160
10	Oktober	253	131
11	November	2.791	235
12	Desember	230	90
	JUMLAH	8.181	1.502

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2017

B. Pasar

Pasar merupakan pendukung keberhasilan daerah dalam memasarkan produk daerah. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya, dapat dibedakan menjadi: (i) milik pemerintah, (ii) milik desa, dan (iii) milik perorangan. Gambaran Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang dapat dilihat pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116 Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
01 Prabanan	2	0	-	114	32	113
02 Gantiwarno	3	2	-	43	13	197
03 Wedi	3	1	-	285	18	503
04 Bayat	3	1	-	106	57	495
05 Cawas	3	5	-	272	18	694
06 Trucuk	1	3	-	85	23	137
07 Kalikotes	1	2	-	119	14	216
08 Kebonarum	1	-	-	13	0	13
09 Jogonalan	1	2	-	73	23	300
10 Manisrenggo	1	-	-	61	9	181
11 Karangnongko	1	-	-	74	4	142
12 Ngawen	2	3	-	43	8	178
13 Ceper	-	1	1	2	16	27
14 Pedan	1	1	-	226	6	1.340
15 Karangdowo	2	2	-	55	6	206
16 Juwiring	3	1	-	173	17	573
17 Wonosari	1	1	-	28	2	247
18 Delanggu	1	-	-	319	2	98
19 Polanharjo	-	1	-	12	4	4